

RENCANA KERJA

(R E N J A)

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2024



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN 2024

HALAMAN VERIFIKASI

**RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN
KELUARGA BERENCANA**

TAHUN 2024

Disusun Oleh :

TIM PENYUSUN

**RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

TAHUN 2024

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator

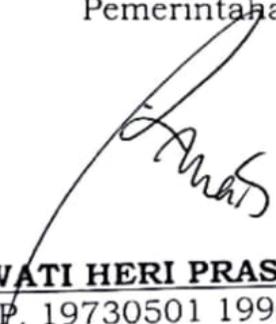
Pada Tanggal : 3 Juli 2023

Koordinator

Sub Koordinator

Bidang Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan

Bidang Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan


RINAWATI HERI PRASTUTI, SE.MM
NIP. 19730501 199603 2 004


WAHYUNINGSIH, SH, MM
NIP. 19760726 200312 2 010

Mengetahui,

KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN TEMANGGUNG


DWI SUKARMEI, ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19740508 200312 1 008

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, kesempatan, dan kesehatan sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2024.

Penyusunan Renja DPPPAPPKB Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman RENJA tahun 2024. Renja disusun untuk menyesuaikan program dan kegiatan yang tertuang pada RKPD Tahun 2024, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja DPPPAPPKB Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPPPAPPKB yang telah ditetapkan pada kondisi dan permasalahan yang ada, utamanya di tahun 2024 dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati Temanggung.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja DPPPAPPKB Tahun 2024 ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan untuk Renja DPPPAPPKB, terutama apabila dilakukan review atas Renja DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung di masa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap semoga Renja DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2024 ini dapat berguna dan bermanfaat dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 3 Juli 2023

KEPALA DPPPAPPKB

DRA. SRI ENDANG PRAPTANINGSIH, M.Si
NIP. 19660712 199403 2 006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
LEMBAR VERIFIKASI	2
KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR GAMBAR.....	5
DAFTAR TABEL.....	6
BAB I PENDAHULUAN	8
1.1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan	8
1.2. Landasan Hukum	13
1.3. Maksud dan Tujuan.....	15
1.4. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPPPAPPKB SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023	17
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN.....	141
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	147
BAB IV PENUTUP	175

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 9

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja.....	18
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja.....	37
Tabel 2.3	Capaian Kinerja Pembangunan Daerah.....	58
Tabel 2.4	Indek Pembangunan Gender	68
Tabel 2.5	Indikator IPG Kabupaten Temanggung Tahun 2022	69
Tabel 2.6	Persentase Perempuan dan Anak korban kekerasan	70
Tabel 2.7	Jumlah korban kekerasan Perempuan dan Anak	71
Tabel 2.8	Persentase keterwakilan dilembaga pemerintah	73
Tabel 2.9	Keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah	73
Tabel 2.10	Rasio PD yang menerapkan kebijakan Responsif Gender dalam penyusunan Renja SKPD.....	76
Tabel 2.11	PD yang menerapkan kebijakan Responsif Gender dalam penyusunan Renja.....	76
Tabel 2.12	Pervalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan	81
Tabel 2.13	Kasus Kekerasan terhadap anak dan Perempuan.....	82
Tabel 2.14	Persentase Desa sayang ibu dan bayi.....	83
Tabel 2.15	Daftar Desa yang mempunyai satgas GSI.....	83
Tabel 2.16	Persentase Rumah sakit sayang ibu dan bayi.....	86
Tabel 2.17	Kecamatan Layak Anak Kabupaten Temanggung	87
Tabel 2.18	Persentase anak korban kekerasan kabupaten Temanggung.....	89
Tabel 2.19	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan.....	89
Tabel 2.20	Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga	90
Tabel 2.21	KDRT per kecamatan Kabupaten Temanggung.....	91
Tabel 2.22	Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Temanggung	91
Tabel 2.23	Persentase Penyediaan Data Mikro Keluarga di Desa/Kelurahan ...	92
Tabel 2.24	Persentase Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB tidak Terpenuhi (Unmetneed)	93
Tabel 2.25	PUS yang ingin ber-KB tapi tidak terlayani (unmetneed)	94
Tabel 2.26	PUS < 20 TH	95
Tabel 2.27	PUS Dibawah 20 Tahun	95
Tabel 2.28	Angka kelahiran remaja usia 15-19 th (ASFR 15-19th).....	97
Tabel 2.29	ASFR 15 – 19 TH.....	97
Tabel 2.30	PUS Yang mengetahui dan memahami tentang alat kontrasepsi modern.....	98
Tabel 2.31	PUS Yang mengetahui dan memahami tentang alat kontrasepsi modern.....	99
Tabel 2.32	Perkawinan Usia Anak	100
Tabel 2.33	Perkawinan Usia Anak	100
Tabel 2.34	Jumlah Peserta KB Aktif Kabupaten Temanggung.....	101
Tabel 2.35	Persentase kepesertaan KB aktif	103
Tabel 2.36	Jumlah PUS MKJP Kabupaten Temanggung	104
Tabel 2.37	Jumlah Pus yang menggunakan alokon MKJP	106
Tabel 2.38	Rekapitulasi Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2022.....	109
Tabel 2.39	Data kampung KB.....	116
Tabel 2.40	Presentase kampung KB yang memenuhi IDM	118
Tabel 2.41	Indek Pembangunan Keluarga/i Bangsa	121
Tabel 2.42	<i>Review</i> terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2024	124

Tabel 2.43 Usulan usulan program dan kegiatan Masyarakat 139
Tabel 2.44 Daftar Inovasi Perangkat Daerah..... 139
Tabel 2.45 Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung 140

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

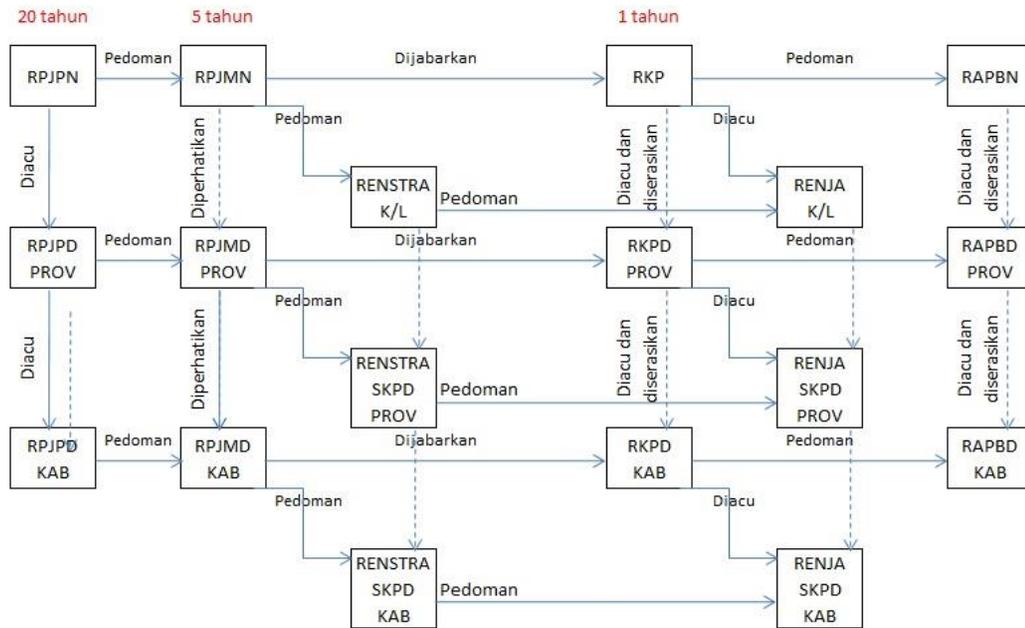
RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah, serta rencana pendanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Perubahan renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sesuai dengan jangka waktu RPD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2024 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2024.

Renja DPPAPPKB Tahun 2024 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja DPPAPPKB Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja DPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2024 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja DPPAPPKB, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal DPPAPPKB, yang menyangkut aspek:

- 1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan DPPAPPKB;
- 2) Kondisi pelayanan DPPAPPKB;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPPAPPKB;
- 4) Data Pokok Pembangunan DPPAPPKB;
- 5) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan DPPAPPKB;

- 6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
- 7) Informasi lain terkait pelayanan DPPPAPPKB.

b. Analisis gambaran pelayanan DPPPAPPKB;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan DPPPAPPKB adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan DPPPAPPKB.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra DPPPAPPKB untuk kondisi tahun 2024-2026;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan I tahun 2023, dan perkiraan realisasi tahun 2023 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2023;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada DPPPAPPKB.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPPPAPPKB tahun lalu berdasarkan renstra DPPPAPPKB;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan DPPPAPPKB. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra DPPPAPPKB dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;

- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra DPPAPPKB tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja renstra DPPAPPKB;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan renstra DPPAPPKB;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja renstra DPPAPPKB sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPAPPKB;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPAPPKB, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPAPPKB berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPPAPPKB tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra DPPAPPKB.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan DPPAPPKB dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan DPPAPPKB;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi DPPAPPKB;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan DPPAPPKB;
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau

kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk DPPPAPPKB.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPPAPPKB yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra DPPPAPPKB.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayananserta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi DPPPAPPKB.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh DPPPAPPKB. Namun dalam proses ini DPPPAPPKB mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh DPPPAPPKB terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPPAPPKB dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja DPPPAPPKB;

Penyusunan dokumen rancangan Renja DPPPAPPKB merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan

mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja DPPPAPPKB;

Penyempurnaan rancangan Renja DPPPAPPKB perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja DPPPAPPKB dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja DPPPAPPKB dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja DPPPAPPKB yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja DPPPAPPKB Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2024;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2024;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja DPPPAPPKB Tahun 2024 adalah sebagai pedoman bagi DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja DPPPAPPKB untuk Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPPPAPPKB.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja DPPPAPPKB Tahun 2024 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;

2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan DPPPAPPKB selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2024;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan DPPPAPPKB Tahun 2024;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan DPPPAPPKB Tahun 2024; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) DPPPAPPKB Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja DPPPAPPKB Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPPPAPPKB

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPPPAPPKB****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPPPAPPKB Tahun 2022 dan Capaian Renstra DPPPAPPKB Tahun 2019-2023**

Dalam melakukan penyusunan Renja DPPPAPPKB Tahun 2024, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja DPPPAPPKB Tahun 2022 terhadap capaian Renstra DPPPAPPKB Tahun 2018-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2023.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja DPPPAPPKB sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2022 dan Triwulan I Tahun 2023 terhadap target di Tahun 2023.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra DPPPAPPKB Tahun 2018-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2022 sebagai tahun ke-empat pelaksanaan Renstra DPPPAPPKB 2018-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPPAPPKB
s.d Tahun 2022

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEG IATAN	SAT UAN	TARGET 2022			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2022		CAPAIAN 2022		CAP AIAN s/d 2020 Rp	K E T	
							I		II		III		IV				K	Rp			
				K	Rp(Renj a)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		2 8	
Dinas Pember dayaan Peremp uan, Perlindu ngan Anak, Pengend alian Pendudu k dan Keluarga Berenca na																					
208.02.0 0	URUSAN PEMERINTAHA N BIDANG PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK				190.000 .000	601.800.00 0		6.872. 750		40.657. 250		100.858 .475		140.580 .621		288.969.096		48, 02			0
208.02.0 01	PROGRAM PENGARUSUTA MAAN GENDER DAN PEMBERDAYA AN PEREMPUAN				70.000. 000	75.000.000		3.567. 200		24.457. 500		26.612. 400		16.587. 675		71.224.775		94, 97			

		Persentase keterwakilan perempuan di lembaga Pemerintah	%	2,33			1,90		2,31		1,91		2,64		2,64		100,00			
		Rasio perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan dokumen perencanaan	%	38,57			82,61		89,13		95,65		100		100		100,00			
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				20.000.000	50.000.000		2.618.450		9.219.750		23.991.150		11.614.825		47.444.175		94,89	100	
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	keg	5	20.000.000	50.000.000	0,26	2.618.450	1,00	9.219.750	2,3	23.991.150	1,2	11.614.825	4,76	47.444.175	95,24	94,89		
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			5	50.000.000	25.000.000		948.750		15.237.750		2.621.250		4.972.850		23.780.600		95,12	100	

2.08.02. 2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlayannya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	keg	5	50.000.000	25.000.000	0,19	948.750	3,50	15.237.750	0,25	2.621.250	1	4.972.850	4,94	23.780.600	98,80	95,12			
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		97,02			
																Predikat		Sangat tinggi			
2:08:03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				20.000.000	187.497.000	0	0	0	0	0	27.665.200	0	21.009.580	0	48.674.780	0	83			
		Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak Perempuan	%	0,011			0,001		0,002		0,002		0,003		0,003		100,00				
		Persentase Perempuan korban kekerasan	%	0,012			0,001		0,001		0,00101		0,004		0,0040		100,00				
208032 01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				10.000.000	56.475.000		0		0		27.665.200		18.156.405		45.821.605		81,14	100		

208032 0101	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	terlaksannnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	keg	7	10.000.000	56.475.000,00	0	0	0	4	27.665.200	2,50	18.156.405	6,50	45.821.605	81,14		
208032 02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				10.000.000	131.022.000	0	0	0	0	2.853.175		2.853.175		2,18			

208032 0202	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksannnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	keg	6	10.000.000	131.022.000	0	0	0	0	0	0	1	2.853.175	1,00	2.853.175	16,67	2,18		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	16,67			
Predikat																	Rendah			
2:08:04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				20.000.000	25.000.000		0		881.500		4.312.500		16.515.100		21.709.100		86,84		
		Persentase desa sayang ibu dan bayi		41,52			31,49	31,49		31,4879		39,79		39,79			95,84			
		persentase rumah sakit sayang ibu dan bayi		100			100	100		100		100		100			100,00			
2.08.04.2.02	Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah				20.000.000	25.000.000		0		881.500		4.312.500		16.515.100		21.709.100	100	86,84		

	Kabupaten/Kota																			
2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas sumber daya lembaga Penyedia Layanan Peningkatan kualitas Keluarga tingkat daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas sumber daya lembaga Penyedia Layanan Peningkatan kualitas Keluarga tingkat daerah Kabupaten/Kota	keg	5	25.000.000	25.000.000	0,00	0	0,10	881.500	1	4.312.500	3,5	16.515.100	4,60	21.709.100	92,00	86,84		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	92,00			
Predikat																	Sangat Tinggi			
2:08:06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				70.000.000	50.000.000		3.305.550		14.145.050		22.184.150		3.477.250		43.112.000		86,22		
		persentase terbentuknya kota layak anak		50			80,00	80,00		80,00		80,00		80		100,00				
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan				70.000.000	50.000.000		3.305.550		14.145.050		22.184.150		3.477.250		43.112.000		86,22		

	Kabupaten/Kota																			
2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	keg	5	70.000.000	50.000.000	0,5	3.305.550	1,5	14.145.050	2	22.184.150	0,7	3.477.250	4,7	43.112.000	94,00	86,22		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	94,00			
Predikat																	sangat tinggi			
2:08:07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				10.000.000	264.303.000	0	0	0	1.173.200	0	20.084.225	0	82.991.016	0	104.248.441		39,44		
		Persentase anak korban kekerasan		0,012			0,04		0,005		0,0047		0,0048		0,0048		100			
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				10.000.000	56.475.000		0		0		18.027.725		27.709.150		45.736.875	100	80,99		
2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/kota	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/kota	keg	6	10.000.000	56.475.000	0	0		-	2	18.027.725	3	27.709.150	5,0	45.736.875	83,33	80,99		

208072 02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0	131.022.000		0		0		0	4.599.366		4.599.366		3,51		0
208072 0202	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksannnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	keg	1	0	131.022.000	0	0		0		0,3	4.599.366	0,3	4.599.366	30,00	3,51		
208072 03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0	76.806.000		0	1.173.200	2.056.500		50.682.500			53.912.200		70,19		

208072 0302	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terlaksannnya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	bula n	12	0	76.806.000	3	0	3	1.173.200	3	2.056.500	3	50.682.500	12, 0	53.912.200	100	70, 19		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	71,11			
Predikat																	Seda ng			
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				7.963.630.866	14.542.506.470		938.405.090		2.253.131.524		2.969.825.185		4.399.741.508		10.561.103.307		72, 62		
2:14:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.425.801.166	4.092.679.470		798.538.737		1.084.190.085		1.107.751.752		932.930.633		3.923.411.207		95, 86		
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.614.060.166	3.337.099.470		666.990.112		914.480.041		937.803.593		742.360.799		3.261.634.545		97, 74		

2.14.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	bula n	14	2.917.9 11.122	3.337.099. 470	3	666.99 0.112	3	914.480 .041	4	937.803 .593	4	742.360 .799	14	3.261.634.545	100	97, 74		
2.14.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				78.170. 000	52.000.000		7.525. 650		19.242. 025		18.165. 015		5.167.3 50		50.100.040		439		0
2.14.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	bula n	12	2.000.0 00	2.000.000	3	150.00 0	3	830.000	3	637.000	3	360.000	12	1.977.000	100	98, 85		
2.14.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tercukupinya Bahan Logistik Kantor	bula n	12	22.500. 000	11.000.000	3	3.809. 500	3	2.519.5 00	3	2.903.0 00	3	1.686.0 00	12	10.918.000	100	99, 25		
2.14.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Barang Cetak dan Penggandaan	bula n	12	10.820. 000	6.000.000	3	675.50 0	3	1.797.2 50	3	1.997.0 00	3	1.530.2 50	12	6.000.000	100	100, 00		
2.14.01. 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya Fasilitasi Kunjungan Tamu	bula n	12	17.100. 000	3.000.000	3	574.20 0	3	0	3	657.800	3	0	12	1.232.000	100	41, 07		
2.14.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bula n	12	25.750. 000	30.000.000	3	2.316. 450	3	14.095. 275	3	11.970. 215	3	1.591.1 00	12	29.973.040	100	99, 91		
2.14.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				622.180 .000	622.680.00 0		120.55 1.975		140.298 .519		142.256 .644		148.587 .484		551.694.622		88, 60		
2.14.01. 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	bula n	12	15.000. 000	8.000.000	3	187.00 0	3	1.340.0 00	3	238.000	3	3.172.5 00	12	4.937.500	100	61, 72		
2.14.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bula n	12	31.100. 000	43.600.000	3	5.272. 151	3	5.219.4 83	3	6.308.6 08	3	6.253.1 43	12	23.053.385	100	52, 87		

2.14.01. 2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bula n	12	10.000. 000	5.000.000	3	0	3	0	3	995.000	3	3.525.0 00	12	4.520.000	100	90, 40		
2.14.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlayannya Jasa Pelayanan Umum Kantor	bula n	12	566.080 .000	566.080.00 0	3	115.09 2.824	3	133.739 .036	3	134.715 .036	3	135.636 .841	12	519.183.737	100	91, 72		
2.14.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				111.391 .000	80.900.000		3.471. 000		10.169. 500		9.526.5 00		36.815. 000		59.982.000		74, 14		
2.14.01. 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	bula n	12	16.900. 000	16.900.000	3	2.150. 000	3	3.175.0 00	3	2.975.0 00	3	5.190.0 00	12	13.490.000	100	79, 82		
2.14.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bula n	12	79.491. 000	53.000.000	3	1.321. 000	3	6.994.5 00	3	6.551.5 00	3	23.614. 000	12	38.481.000	100	72, 61		
2.14.01. 2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bula n	12	15.000. 000	11.000.000	3	0	3	0	3	0	3	8.011.0 00	12	8.011.000	100	72, 83		

															Rata-rata Capaian Kinerja (%)				
															Predikat		Sangat Tinggi		
2:14:02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				65.000.000	209.350.000		19.640.922		24.392.822		70.581.690		69.716.756		184.332.190	100	88,05	
		persentase penyediaan data mikro keluarga di desa/kelurahan	%	100			100		100		100		100			100			
		persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/unmet need	%	9,57			15,19		13,69		12,46		11,47			79,40			
		Persentase Pasangan Usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	%	2,05			1,01		1,02		1,02		2,45			80,60			
		Angka kelahiran Remaja Usia 15 - 19 tahun (ASFR 15-19 th)		26,5			10,07		10,07		10,07		6,67			100,00			
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Keluarga			65.000.000	209.350.000		19.640.922		24.392.822		70.581.690		69.716.756		184.332.190		88,05	
2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penelenggaraan Sistem Informasi Keluarga		12		60.000.000	3		3		3	29.581.500	3	22.566.460	12	52.147.960	100	86,91	

2.14.02.2.01.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	tersedianya Data dan Informasi Keluarga	bula n	12	65.000.000	29.550.000	3	0	3	0	3	7.480.250	3	21828750	12	29.309.000	100	99,18		
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	bula n	12	0	119.800.000	3	19.640.922	3	24.392.822	3	33.519.940	3	25321546	12	102.875.230	100	85,87		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	100			
Predikat																	sangat tinggi			
2:14:03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				2.077.743.700	6.224.537.000		119.297.031		1.144.548.617		1.314.910.693		2.089.418.469		4.668.174.810		75,00		
		Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern		75,87			72,20		73,87		76,87		76,58		76,58		100			
		Persentase kepesertaan KB aktif		75,87			72,20		73,87		76,87		76,58		76,58		100,00			

		Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		48,87			45,25		45,56		46,09		45,03		45,03		92,13			
		Persentase kampung KB yang memiliki Indeks Desa Membangun (IDM)		33,95			33,85		33,85		33,85		33,85		33,85		99,84			
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal				132.759.000	1.100.015.200		1.437.131		34.089.787		189.447.737		342.815.511		567.790.166		51,62		0
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK Kepada Stakeholders dan mitra kerja	Terlaksananya Advokasi Program KKBPK Kepada Stakeholders dan mitra kerja	kegiatan	1	132.759.000	4.374.800	0,1	440.000	18:00	3.025.000	0,15	714.750		0	1,00	4.179.750	100	95,54		
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai dengan kearifan budaya lokal	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai dengan kearifan budaya lokal	kegiatan	1		25.000.000	0:01	330.000		0	0,75	17.556.000	0,2	3.400.000	0,95	21.286.000	95,07	85,14		

2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE program KKBPK Melalui Media Masa Cetak dan Elektronik serta media Luar Ruang	TerlaksananyaP romosi dan KIE program KKBPK Melalui Media Masa Cetak dan Elektronik serta media Luar Ruang	kegiatan	1		70.640.000	0	0	0,1	6.805.000	0,50	34.368.400	0,2	12.090.000	0,80	53.263.400	80,00	75,40		
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme operasional program KKBPK melalui rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam),Rapat Koordinasi Desa (Rakordes),dan mini lokakarya (Minilok)	Terlaksananya Mekanisme operasional program KKBPK melalui rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam),Rapat Koordinasi Desa (Rakordes),dan mini lokakarya (Minilok)	bulan	12		312.000.000	3,00	0	3,00	8.944.500	3,00	43.248.000	3	54.086.750	12	106.279.250	100	34,06		
2140320107	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	tercukupinya Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	bulan	12		648.000.400	3,00	667.131	3,00	15.315.287	3,00	93.131.587	3	234.976.261	12	344.090.266	100	53,10		
2140320108	Pengendalian Program KKBPK	Terkendalinya program KKBPK	kegiatan	3		40.000.000	0,00	0	0,00	0	0,10	429.000	2,9	38.262.500	3,00	38.691.500	100	96,73		
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)					1.526.920.000		1.387.200.000	0	617.150.000		107.750.000		650.500.000		1.375.400.000		99,15		0

2,14,03, 2,02,04	Penggerakan kader Instansi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Terlaksananya Penggerakan kader Instansi Masyarakat Pedesaan (IMP)	bula n	12	1.526.9 20.000	1.387.200 .000,00	3,0 0	0	3,0 0	617.150 .000	3,00	107.750 .000	3	650.500 .000	12, 00	1.375.400.000	100	99, 15		
2.14.03. 2.03	Pengendalian dan Pendistribusia n Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Ko ta				71.894. 700	2.597.621. 800		114.71 9.350		475.085 .330		803.060 .356		675.522 .508		2.068.387.544		79, 63		
2.14.03. 2.03.01	Pengendalian Pendistribusia n Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarungnya	Terkendalinya Pendistribusia n Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarungnya	bula n	12	71.894. 700	13.950.000	3,0 0	0	3,0 0	2.815.5 00	3,00	3.801.0 00	3	4.442.5 00	12	11.059.000	100	79, 28		
2.14.03. 2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Tercapainya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	bula n	12	1.909.1 98.500	1.505.285. 800	3	114.71 9.350	3	468.408 .330	3,00	307.624 .500	3	263.010 .190	12	1.153.762.370	100	76, 65		

2,14,03, 2,03,06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tersedianya Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	kegiatan	3		1.065.786 .000,00	0	0		0	1,00	490.159 .856	2	405.794 .818	3	895.954.674	100	84, 07		
2,14,03, 2,03,08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	terlaksannnya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	bulan	12		12.600.00 0,00	3	0	3,0 0	3.861.5 00	3,00	1.475.0 00	3	2.275.0 00	12	7.611.500	100	60, 41		
214032 04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				346.170 .000	1.139.700. 000		3.140. 550		18.223. 500		214.652 .600		420.580 .450		656.597.100		57, 61		

214032 0403	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Terlaksananya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	bula n	12	346.170 .000	1.139.700. 000	3,0 0	3.140. 550	3,0 0	18.223. 500	3,00	214.652 .600	3	420.580 .450	12, 00	656.597.100	100	57, 61		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	97,92			
Predikat																	sangat tinggi			
2:14:04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				1.395.0 86.000	4.015.940. 000		928.40 0		0		476.581 .050		1.307.6 75.650		1.785.185.100		44, 45		
		Indeks pembangunan Keluarga		45			55, 97		55, 97		55,9 7		55, 97		55, 97		100			
2.14.04. 2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				1.395.0 86.000	4.015.940. 000		928.40 0		0		476.581 .050		1.307.6 75.650		1.785.185.100		44, 45		

2.14.04. 2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Tersedianya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	keg	5		482.900.000	0,01	928.400	0	0	4	411.481.050	0,99	11.587.650	5,00	423.997.100	100	87,80		
2.14.04. 2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Tersedianya Biaya Operasional bagi Kelompok kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	bula n	12	1.395.086.000	3.533.040.000	3	0	3	0	3	65.100.000	3	1.296.088.000	12,00	1.361.188.000	100	38,53		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	99,95			
Predikat																	Sangat Tinggi			
JUMLAH				558	8.153.630.866	15.144.306.470		945.277.840		2.293.788.774		3.070.683.660		4.540.322.129		10.850.072.403				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH																	85,41			
PREDIKAT																	Tinggi			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH																	96,93			
PREDIKAT																	Akan Tercapai			

Faktor pendorong keberhasilan kinerja
Faktor penghambat pencapaian kinerja
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPPAPPKB
s.d Triwulan I Tahun 2023

BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2023			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2023		CAPAIAN 2023		CAPAIAN s/d 2020 Rp	KET
						I		II		III		IV							
			K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		28
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				190.000.000	140.000.000		4.244.650								4.244.650		3,03		0
PROGRAM PENGARUSUTAMA AN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				60.000.000	60.000.000	1	2.657.500	0	0	0	0	0	0	1	2.657.500	20	9		
	Persentase keterwakilan perempuan di lembaga Pemerintah	%	2,3 4			2,46								2,46		100			

		%	45,70			100,00							100		100		
	Rasio perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan dokumen perencanaan																
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				30.000.000	30.000.000	1	2.657.500	0	0	0	0	0	1	2.657.500	20	8,86	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	keg	5	30.000.000	30.000.000	1,00	2.657.500						1,00	2.657.500	20,00	8,86	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			5	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlayannya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	keg	5	30.000.000	30.000.000		0						0,00	-	0,00	0,00	

				0	0										Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100,00			
															Predikat	Sangat tinggi			
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				0	0			0	0	0	0	0	0	0					
	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak Perempuan	%	0,0 1			0,00 2								0,00 2		100,00			
	Persentase Perempuan korban kekerasan	%	0,0 1			0,00 03								0,00 03		100,00			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100,00			
															Predikat	Rendah			
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				60.000.000	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
	Persentase desa sayang ibu dan bayi		62, 3			39,7 9								39,7 9		63,89			
	persentase rumah sakit sayang ibu dan bayi		100			100								100		100,00			
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terlaksannnya Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota			30.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			

Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksannnya Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		5	30.000.000	10.000.000	0	0						0	0	0,00			
Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten/Kota				30.000.000	30.000.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			0,00
Peningkatan Kapasitas sumber daya lembaga Penyedia Layanan Peningkatan kualitas Keluarga tingkat daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas sumber daya lembaga Penyedia Layanan Peningkatan kualitas Keluarga tingkat daerah Kabupaten/Kota	keg	5	30.000.000	30.000.000	0,00	0						0,00	0	0,00			0,00
														Rata-rata Capaian Kinerja (%)	81,95			
														Predikat	tinggi			
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				20.000.000	15.000.000	1	1.587.150	0	0	0	0	0	0	1	1.587.150	13	11	0
	persentase terbentuknya kota layak anak		60			80,00							80		100,00			

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				20.000.000	15.000.000	1	1.587.150	0	0	0	0	0	0	0	1	1.587.150		13	11		0	
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	keg	4	20.000.000	15.000.000	0,5	1.587.150								0,5	1.587.150		12,50		10,58		
																	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100,00				
																	Predikat	sangat tinggi				
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				50.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Persentase anak korban kekerasan		0,01			0,0009									0,0009			100				
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kabupaten/Kota	keg	6	50.000.000	25.000.000	0	0							0,0	0	0	0,00		0,00			

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tercukupinya Bahan Logistik Kantor	bulan	12	11.000.000	11.000.000	3	2.111.000								3	2.111.000	25	19,19		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Barang Cetak dan Penggandaan	bulan	12	9.820.000	9.820.000	3	982.000								3	982.000	25	10,00		
Fasilitas Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya Fasilitas Kunjungan Tamu	bulan	12	29.030.000	29.030.000	3	1.890.000								3	1.890.000	25	6,51		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bulan	12	25.750.000	25.750.000	3	7.157.050								3	7.157.050	25	27,79		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12	616.514.816	616.510.816	3	143.965.978	0	0	0	0	0	0	0	3	143.965.978	25	23,35		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	bulan	12	12.000.000	12.000.000	3	948.500								3	948.500	25	7,90		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	39.100.000	39.100.000	3	5.948.298								3	5.948.298	25	15,21		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	12	10.000.000	10.000.000	3	700.000								3	700.000	25	7,00		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlayannya Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	12	555.414.816	555.410.816	3	136.369.180								3	136.369.180	25	24,55		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12	125.000.000	85.000.000	9	4.020.000	0	0	0	0	0	0	0	9	4.020.000	75	14		0

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	bulan	12	15.000.000	15.000.000	3	2.030.000							3	2.030.000	25	13,53		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bulan	12	40.000.000	40.000.000		1.990.000								1.990.000				
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terpeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	bulan	12	65.000.000	25.000.000	3	0							3	0	25	0,00		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		12	5.000.000	5.000.000	3								3	0	25	0,00		
		bulan													Rata-rata Capaian Kinerja (%)	29			
															Predikat	Sangat Tinggi			
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				337.025.000	416.000.000		45.673.640	0	0	0					45.673.640		0,00		

	persentase penyediaan data mikro keluarga di desa/kelurahan	%	100			100								100			
	persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/unmet need	%	9,17			10,65								10,65			79,40
	Persentase Pasangan Usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	%	2,04			1,10								1,10			80,60
	Angka kelahiran Remaja Usia 15 - 19 tahun (ASFR 15-19 th)		26,3			6,67								6,67			100,00
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			12	95.225.000	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Tersusunnya dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota		5	95.225.000	50.000.000	0	0						0	0	0		0,00

Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Keluarga			241.800.000	366.000.000	9	45.673.640	0	0	0	0	0	0	9	45.673.640	75		
Pembinaan dan Pengawasan Penenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penenggaraan Sistem Informasi Keluarga		12	60.000.000	64.200.000	3	0							3	0	25	0,00	
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	tersedianya Data dan Informasi Keluarga	bulan	12	65.000.000	205.800.000	3	28.650.000							3	28.650.000	25	13,92	
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	bulan	12	116.800.000	96.000.000	3	17.023.640							3	17.023.640	25	17,73	
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)	75		
															Predikat	sangat tinggi		
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				6.303.537.000	6.601.917.000		187.906.660	0	0	0	0				187.906.660		2	

	Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern		76,2			77,59					77,59		100			
	Persentase kepesertaan KB aktif		76,2			77,59					77,59		100,00			
	Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		49,2			45,10					45,10		92,13			
	Persentase kampung KB yang memiliki Indeks Desa Membangun (IDM)		33,95			99,84					99,84		99,84			
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal				1.150.015.200	1.405.400.000	112.126.710	0	0	0		112.126.710					

Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				1.387.200.000	624.000.000		9.200.000	0	0	0		9.200.000			
Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB		12	0	46.000.000		9.200.000					9.200.000			
Penggerakan kader Instansi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Terlaksananya Penggerakan kader Instansi Masyarakat Pedesaan (IMP)	bulan	4	1.387.200.000	578.000.000,00		0								
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				2.626.621.800	3.556.017.000		48.675.150	0	0	0		48.675.150			
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terkendalinya Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	bulan	12	13.950.000	27.900.000		2.715.000					2.715.000			
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi	Tercapainya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi	bulan	12	1.540.285.800	1.994.982.000		41.582.650					41.582.650			

Jangka Panjang (MKJP)	Jangka Panjang (MKJP)																	
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tersedianya Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	kegiatan	3	1.059.786.000	1.516.035.000,00		0							0				
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	terlaksannnya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	bulan	12	12.600.000	17.100.000,00		4.377.500							4.377.500				25,60
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan				1.139.700.000	1.016.500.000		17.904.800	0	0	0				17.904.800				1,78

Kesertaan Ber-KB																		
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB		2		9.000.000		0								0			
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB	Terlaksananya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB	bulan	12	1.139.700.000	1.007.500.000		17.904.800								17.904.800			1,78
														Rata-rata Capaian Kinerja (%)	78,39			
														Predikat	UK			
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				4.113.040.000	4.315.900.000		52.230.000	0	0	0				52.230.000				
	Indeks pembangunan Keluarga		50,00			55,97								55,97				100
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				4.063.040.000	4.265.900.000		52.230.000	0	0	0				52.230.000				0

Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Tersedianya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	keg	5	480.000.000	360.000.000		0										
Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPK S, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Tersedianya Biaya Operasional bagi Kelompok kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	bulan	12	3.533.040.000	3.855.900.000	3,00	52.230.000						52.230.000				

Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	bulan	12	50.000.000	50.000.000	3,00	0											
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				50.000.000	50.000.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			50.000.000	50.000.000		0							0				
														Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100,00			
														Predikat	Sangat Tinggi			
JUMLAH				15.154.996.008	15.489.716.561		1.179.603.508	0	0	0				1.179.603.508				
														RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	84,91			
														PREDIKAT	akan ttercapai			
														RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH	95,05			
														PREDIKAT	Akan Tercapai			

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2022 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra DPPPAPPKB Tahun 2018-2023. Namun demikian juga masih ada yang kurang. dari yang diharapkan

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja DPPPAPPKB di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan DPPPAPPKB berupa:

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2022 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Perubahan renstra DPPPAPPKB Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja DPPPAPPKB di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan DPPPAPPKB berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat daerah
Capaian kinerja : 100 % dengan kategori, sangat tinggi
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat daerah
Capaian kinerja : 100 % dengan kategori, sangat tinggi
 - c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Capaian kinerja : 100 % , dengan kategori Sangat tinggi
 - d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Capaian kinerja : 100%, dengan kategori memuaskan
 - e. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Capaian kinerja : 100% , dengan kategori sangat tinggi
 - f. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
Capaian kinerja : 100% , dengan kategori memuaskan ,
 - g. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Capaian kinerja: 91,33% , dengan kategori sangat tinggi
2. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:

- a. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten/Kota
- b. Penyediaan Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten

Faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut, adalah:

- a. Adanya perubahan pemetaan dan nomenklatur dalam SIPD, sesuai kemendagri yang berakibat kegiatan baru bisa dimulai dilaksanakan pada akhir semester I
- b. Adanya berita acara hasil desk terkait DPA dari kementerian PPPA yang terbit pada bulan Mei 2022
- c. Penyerapan anggaran pelayanan kasus terhadap Perempuan dan anak dipengaruhi oleh kasus yang melaporkan dan yang ditangani
- d. Adanya perbedaan target nasional, perjanjian kinerja PKB dan target daerah bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dari beberapa permasalahan tersebut, berakibat beberapa target kinerja pelayanan DPPPAPKB tidak bisa mencapai yang direncanakan, yaitu:

- a. Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/unmetneed
- b. Persentase desa saying ibu dan bayi

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan DPPPAPKB. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) DPPPAPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2022, maka dapat dikatakan bahwa DPPPAPKB dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori

sangat memuaskan yaitu dengan nilai **96,89%**, Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak
Capaian Kinerja: 96,72% kategori Baik
2. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk
Capaian Kinerja: 100,00% kategori sangat memuaskan

Dari Tabel 2.1. dan Triwulan I tahun 2023 dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2022 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPPPAPPKB

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan DPPPAPPKB dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.3
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah DPPAPPKB Triwulan I Tahun 2023
Kabupaten Temanggung

No	INDIKATOR	Satuan	TARGET					REALISASI					Capaian s/d 2023 (%)	Status
	KINERJA		2019	2020	2021	2023	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	94,55	95,63	95,64	95,64	95,65	95,1	95,62	95,31	95,71	95,71	100	TT
2	Persentase perempuan dan Anak Korban Kekerasan	%	0,015	0,14	0,004	0,004	0,004	0,009	0,008	0,002	0,0043	0,0021	100	TT
3	presentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah	%	2,3	2,31	2,32	2,33	2,34	1,89	2,02	1,79	2,7	2,66	100	TT
4	Rasio Perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan renja PD	angka rasio	32,28	38,57	38,57	45,71	45,71	43,48	45,65	82,61	100	100	100	TT
5	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan	%	26	25,9	0,011	0,011	0,011	0,014	0,022	0,0021	0,003	0,005	100	TT
6	Prosentase perempuan korban kekerasan	%	0,015	0,014	0,013	0,012	0,011	0,0002	0,0002	0,0013	0,004	0,0017	100	TT
7	Persentase desa sayang ibu dan bayi	%			20,76	41,52	62,28	30,83	30,83	31,49	39,79	48,1	77,23	UK
8	Persentasre rumah sakit sayang ibu dan bayi	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	TT
9	Persentase terbentuknya kota layak anak	%	20	20	30	50	60	40	60	80	80	80	100	TT

No	INDIKATOR	Satuan	TARGET					REALISASI					Capaian s/d 2023 (%)	Status
	KINERJA		2019	2020	2021	2023	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
10	Persentase anak korban kekerasan	%			0,012	0,011	0,011	0,04	0,04	0,0026	0,0048	0,0032	100	TT
11	Laju pertumbuhan penduduk	%	0,84	0,83	0,82	0,81	0,8	0,88	0,98	0,98	0,54	0,54	100	AT
12	Persentase Penyediaan Data Mikro Keluarga di Desa/ Kel.	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	TT
13	Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/ unmetneed	%	6,9	6,83	9,83	9,51	9,17	11,44	13,76	12,99	11,47	10,65	83,81	UK
14	Presentase pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	%	2,08	2,07	2,06	2,05	2,04	1,52	2,16	1,02	2,45	1,1	100	TT
15	Angka kelahiran remaja usia 15-19 th (ASFR 15-19th)	%	27,2	27	26,8	26,5	26,3	29,43	21,32	9,8	6,67	6,67	100	TT
16	presentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern	%	85,1	86,28	75,57	75,87	76,21	83,03	82,61	75,29	76,58	77,59	100	TT
17	Persentase kepesertaan KB aktif	%	79,79	80,78	75,57	75,87	76,21	77,5	74,71	75,29	76,58	77,59	100	TT
18	Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang	%	49,45	49,65	48,54	48,87	49,19	48,02	45,38	45,21	45,03	45,1	91,69	UK
19	Persentase kampung KB yang memenuhi Indeks Desa Membangun (IDM)	%	48,33	48,33	33,9	33,9	33,9	29,82	33,85	33,85	33,85	51,16	100	TT
20	Indek Pembangunan Keluarga				40	45	50	0	0	55,97	55,97	55,97	100	TT

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 17 terdiri dari:
 - a. Indek Pembangunan Gender.**
 1. Faktor Pendorong : Tingginya angka harapan hidup perempuan sebagai salah satu indikator IPG.
 2. Faktor Penghambat :
 - Masih rendahnya penghasilan perempuan
 - Harapan lama sekolah bagi perempuan masih terjadi disparitas
 3. Rekomendasi Tindak Lanjut : Pemanfaatan aplikasi Sipesanperak
 - b. Persentase perempuan dan Anak Korban Kekerasan**
 1. Faktor pendorong : indikator tersebut Kerjasama berjejaring dalam pendampingan sehingga cakupan penanganan lebih luas, dan telah dicanangkan aplikasi SIPESANPERAK (Sistem Informasi pelaporan kekerasan Perempuan dan Anak), agar masyarakat dapat melaporkan kasus kekerasan dalam aplikasi tersebut, untuk mendapatkan pendampingan
 2. Faktor penghambat : indikator tersebut adalah Keterbatasan dan kemampuan pendamping dan petugas, Belum terbentuknya UPT PPPA, dan anggapan masyarakat kalau melaporkan kasus kekerasan kepada dinas terkait, dikarena melaporkan kasus adalah aib keluarga
 3. Rekomendasi tindak lanjut : indikator tersebut adalah pemanfaatan aplikasi SIPESANPERAK, dengan melaksanakan sosialisasi dan advokasi
 - c. Presentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah**
 1. Faktor Pendorong : Meningkatnya harapan lama sekolah perempuan mendorong meningkatnya keterwakilan perempuan dilembaga pemerintah
 2. Faktor Penghambat : Partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah dipengaruhi peluang seleksi

3. Rekomendasi Tindak Lanjut : perlu dilakukan review terhadap definisi operasional indikator progra

d. Rasio Perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responsif Gender dalam Penysusunan Renja PD

1. Faktor pendorong : adanya bintek yang mendorong OPD untuk menyusun ARG
2. Faktor Penghambat : masih kurangnya pemahaman petugas dalam penyusunan ARG
3. Rekomendasi tindak lanjut : Penguatan dan pendampingan dalam penyusunan ARG

e. Pravelensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan

1. Faktor Pendorong : Kerjasama berjejaring dalam pendampingan sehingga cakupan penanganan lebih luas
2. Faktor Penghambat : Keterbatasan dan kemampuan pendamping dan petugas
3. Rekomendasi tindak lanjut : Pelatihan dan peningkatan kapasitas petugas dan pendamping

f. Presentase perempuan korban kekerasan

1. Faktor Pendorong : Kerjasama berjejaring dalam pendampingan sehingga cakupan penanganan lebih luas Kerjasama berjejaring dalam pendampingan sehingga cakupan penanganan lebih luas
2. Faktor Penghambat : Keterbatasan dan kemampuan pendamping dan petugas
3. Rekomendasi tindak lanjut : indikator tersebut adalah Pelatihan dan peningkatan kapasitas petugas dan pendampingan.

g. Persentasre rumah sakit sayang ibu dan bayi

1. Faktor Pendorong : Peningkatan komitmen pemerintah da kesaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan kematian ibu dan bayi, dengan mensosialisasi 3 T dan 4 terlalu
2. Faktor Penghambat : masih adanya budaya masyarakat bahwa kehamilan, dan melahirkan menjadi urusan perempuan
3. Rekomendasi tindak lanjut : penguatan dan advokasi dan

sosialisitentang Kota Layak anak bersama mitra kerja

h. Persentase terbentuknya kota layak anak

1. Faktor Pendorong : Adanya Integrasi dengan program lain yang mendukung Kelana (Kecamatan layak anak)
2. Faktor Penghambat : Masih rendahnya pendampingan dalam pelaksanaan Kelana
3. Rekomendasi tindak lanjut : penguatan dan advokasi dan sosialisitentang GSI bersama mitra kerja

i. Persentase anak korban kekerasan

1. Faktor Pendorong : Kerjasama berjejaring dalam pendampingan sehingga cakupan penanganan lebih luas
2. Faktor Penghambat : Keterbatasan dan kemampuan pendamping dan petugas
3. Rekomendasi tindak lanjut : Pelatihan dan peningkatan kapasitas petugas dan pendamping

j. Laju pertumbuhan penduduk

1. Faktor Pendorong : Meningkatnya KIE kepada masyarakat tentang Pengendalian penduduk
2. Faktor Penghambat : Masih tingginya angka kelahiran (CBR)
3. Rekomendasi tindak lanjut : Peningkatan jejaring dalam pelaksanaan program KKBPK Baik pemerintah maupun swasta melakukan Advokasi dan bintek kepada kades dalam program KKBPK

k. Persentase Penyediaan Data Mikro Keluarga di Desa/ Kel.

1. Faktor Pendorong : Adanya kegiatan Pendataan dan Up dating data keluarga
2. Faktor Penghambat : Lemahnya sistem pelaporan (RR) dan administrasi di tingkat RT
3. Rekomendasi tindak lanjut : Melakukan pendataan mikro keluarga Adanya perda tentang pengendalian penduduk dan KB

1. Presentase pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 Tahun

1. Faktor Pendorong :

- Terintegrasinya kegiatan BKR(Bina keluarga Remaja) dan Pik(Pusat Informasi konseling) remaja
 - Peningkatan kursus calon pengantin oleh lintas sektoral
 - Pengembangan life skill bagi remaja dalam menyiapkan kehidupan berkeluarga
2. Faktor Penghambat : Masih kurangnya SDM pengelola program KKBPK dilapangan dalam memberikan advokasi dan KIE pada masyarakat dan remaja Masih aturan pemerintah yang berbeda antar OPD
 3. Rekomendasi tindak lanjut : Melakukakan promisi, KIE melalui media cetak, Elektronik

m. Angka kelahiran remaja usia 15-19 th (ASFR 15-19th)

1. Faktor Pendorong :
 - Pengembangan life skill bagi remaja
 - Tingkat pendidikan wajar 12 tahun
2. Faktor Penghambat : Belum tersedianya data ASFR setiap tahun .
3. Rekomendasi tindak lanjut : Updatting data sebagai perhitungan ASFR

n. Presentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi moderen

1. Faktor Pendorong adalah :
 - Tingginya kesadaran masyarakat (PUS) untuk berKB
 - Tingginya KIE, Advokasi kepada masyarakat dan steak holder
 - Mobiliias media sosial dalam penyampaian jenis alat kontrasepsi dan side efek
2. Faktor penghambat indikator tersebut :
 - Tidak semua masyarakat dengan keyakinan tertentu menerima jenis alat kontrasepsi moderen
 - PUS muda yang menikah diusia dini belum terbekali dengan pengetahuan jenis alokon Adanya kebijakan yang berbeda antar pemerintah pusat dan daerah dalam menentukan

sasaran program

3. Rekomendasi tindak lanjut : Indikator tersebut adanya inovasi berupa aplikasi SIMATAPKON KB [Sistem Informasi Manajemen Pencatatan dan Pelaporan Kontrasepsi Keluarga Berencana], Sehingga bisa mengetahui segmentasi sasaran dalam pelayanan KB

o. Persentase kepesertaan KB aktif.

1. Faktor pendorong : indikator tersebut adalah
 - Tingginya kesadaran masyarakat (PUS) untuk berKB
 - Tingginya KIE, Advokasi kepada masyarakat dan stakeholder
 - Mobilitas media sosial dalam penyampaian jenis alat kontrasepsi dan side effect
2. Faktor penghambat : indikator tersebut adalah
 - Tidak semua masyarakat dengan keyakinan tertentu menerima jenis alat kontrasepsi moderen
 - PUS muda yang menikah diusia dini belum terbekali dengan pengetahuan jenis alokon Adanya kebijakan yang berbeda antar pemerintah pusat dan daerah dalam menentukan sasaran program
3. Rekomendasi tindak lanjut : indikator tersebut adalah adanya inovasi berupa aplikasi SIMATAPKON KB [Sistem Informasi Manajemen Pencatatan dan Pelaporan Kontrasepsi Keluarga Berencana], Sehingga bisa mengetahui segmentasi sasaran dalam pelayanan KB

p. Persentase kampung KB yang memenuhi Indeks Desa Membangun (IDM)

1. Faktor Penghambat :
 - Belum adanya Perda dan Perbup tentang kampung KB
 - Kurangnya koordinasi dengan linsek
 - Sosialisasi tentang hakekat dan tujuan kampung KB masih kurang
 - Belum semua pokja kampung KB mendapatkan pelatihan

2. Faktor Pendorong :
 - Potensi kader dalam mendukung Program
 - Partisipasi masyarakat dalam mendukung kampung KB
3. Rekomendasi tindak lanjut Peningkatan advokasi dan KIE dengan melibatkan LSOM melakukan jejaring dalam pelaksanaan program kampung KB

q. Indeks Pembangunan Keluarga

1. Faktor pendorong : Indikator tersebut adalah Meningkatnya faktor Ekonomi, Sosial dan Pendidikan dalam keluarga
2. Faktor penghambat : Indikator tersebut adalah Masihnya lemahnya pemahaman keluarga tentang indikator peningkatan kesejahteraan keluarga
3. Rekomendasi tindak lanjut : Indikator tersebut adalah perlunya pemahaman tentang perhitungan IPK, karena perhitungan bukan wewenang PD

2. Capaian indikator dengan status Upaya Keras ada 3 terdiri dari:

a. Persentase desa sayang ibu dan bayi

1. Faktor Pendorong : Peningkatan komitmen pemerintah dan kesadaran Masyarakat terhadap pentingnya pencegahan kematian ibu dan bayi, dengan mensosialisasi 3T dan 4 Terlalu
2. Faktor Penghambat : Masih adanya budaya Masyarakat bahwa kehamilan, dan melahirkan menjadi urusan perempuan
3. Rencana tindak lanjut : Penguatan dan advokasi dan sosialisasi tentang GSI Bersama mitra kerja terhadap semua pemangku kepentingan untuk melakukan penggerakan Desa Sayang Ibu

b. Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/ unmetneed

1. Faktor Pendorong :
 - Meningkatnya kegiatan KIE kepada PUS untuk Ber-KB
 - Meningkatnya koordinasi kepada KKB dalam pelayanan KB

2. Faktor Penghambat :

- Kursngnya pengetahuan Masyarakat tentang pentingnya ikut KB
- Rendahnya pemahaman Batasan PUS bisa hamil (merasa tua dan tidak perlu KB)

3. Rencana tindak lanjut : Adanya inovasi berupa aplikasi SIMANTAP KON-KB (Sistem Informasi Managemen Pencatatan dan Pelaporan Kontrasepsi Keluarga Berencana)

c. Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang

1. Faktor pendorong indikator tersebut adalah

- Tingginya Animo Masyarakat dalam penggunaan alakon Implan
- Pemahaman masyarakat tentang alat kontrasepsi MKJP lebih efektif dan praktis

2. Faktor penghambat indikator tersebut adalah

- Tidak semua masyarakat dengan keyakinan tertentu menerima jenis alat kontrasepsi moderen
- PUS muda .yang menikah diusia dini belum terbekali dengan pengetahuan jenis alokon Adanya kebijakan yang berbeda antar pemerintah pusat dan daerah dalam menentukan sasaran program

3. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah adanya inovasi berupa aplikasi SIMATAPKON KB [Sistem Informasi Managemen Pencatatan dan Pelaporan Kontrasepsi Keluarga Berencana], Sehingga bisa mengetahui seegmentasi sasaran dalam pelayanan KB

2.2.2.Data Pokok

Data Pokok pada DPPAPPKB terdiri dari 2 jenis data pokok yaitu Data Pokok Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Data Pokok Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan rincian sebagai berikut:

A. Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak

1. **Indek Pembangunan Gender (IPG)**

Indek Pembangunan Gender (IPG) adalah *suatu indeks yang mengukur pencapaian pembangunan kapabilitas dasar manusia pada bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi di suatu wilayah dengan mempertimbangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan* (Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2013)

Apa itu IPG :

- Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui pembangunan manusia
- IPG mengukur tingkat pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM, yaitu harapan hidup, tingkat pendidikan, dan pendapatan namun dengan memperhitungkan ketimpangan gender
- IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila angka IPG sama dengan IPM
- Apabila angka IPG lebih rendah dari IPM maka terjadi kesenjangan gender. Kesenjangan gender dapat dilihat dari selisih antara IPM dan IPG. Semakin kecil selisih antara IPM dan IPG maka dapat diartikan bahwa kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan juga semakin kecil.

Untuk memperoleh angka Indek Pembangunan Gender dapat diperoleh dari perhitungan yang ada di BPS.

Ada beberapa indikator untuk mengukur IPG yang diantaranya meliputi:

- Angka Harapan Hidup
- Harapan lama Sekolah
- Rata-rata lama Sekolah
- Penghasilan perkapita

IPG Kabupaten Temanggung selama 6 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4.
Indek Pembangunan Gender
Kabupaten Temanggung, Tahun 2018 s.d 2023 Triwulan I

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Indek Pembangunan Gender (IPG)	94,65	95,10	95,31	95,31	95,71	95,71

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, 2022

Dari tabel 1 bahwa IPG Kabupaten Temanggung tahun 2018 diperoleh angka sebesar 94,65. Sedangkan pada tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022, angka semakin naik, sebesar 1,06 dari tahun 2018 sampai 2022. Untuk tahun 2023 TW II, angkanya masih menggunakan perhitungan pada tahun 2022, Namun pada angka tersebut pencapaian ini lebih tinggi dari IPG tingkat Propinsi Jawa Tengah sebesar 92,83 dan tingkat Nasional sebesar 91,63, tahun 2023 TW II, angkanya masih menggunakan pada tahun 2022, karena belum ada perhitungan, Indikator IPG, dipengaruhi oleh beberapa faktor, dimana di Kabupaten Temanggung capaian angka tersebut adalah :

Tabel 2.5
Indikator IPG
Kabupaten Temanggung Tahun 2022

NO	Uraian	Angka Harapan Hidup		Harapan Lama Sekolah		Rata Rata Lama Sekolah		Penghasilan Perkapita	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	Temanggung	73,81	77,57	12,12	12,28	7,54	7,02	10,70	8,635
2	Jawa Tengah	72,61	76,42	12,71	12,64	8,17	7,34	14,82	9,603

Sumber data BPS tahun 2022

Jika dilihat dari komposisi IPG yaitu Angka Harapan Hidup perempuan lebih tinggi yaitu 77,51 dibandingkan laki laki 73,81, sedangkan Angka Harapan lama sekolah perempuan juga lebih tinggi yaitu 12,59 dibandingkan Angka Harapan lama sekolah laki laki yaitu

12,12, akan tetapi angka rata-rata lama sekolah laki laki lebih tinggi yaitu 7,53 dibandingkan perempuan yaitu 7,02, sedangkan penghasilan perkapita laki laki lebih tinggi 10,70, dibandingkan dengan perempuan 8,635. Hal ini menunjukkan bahwa masih terjadi kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.

Untuk Pencapaian IPG tahun 2023 sampai pada Triwulan I, ini yang mendukung RPJMD Kabupaten Temanggung, tercapai 100% dari target 95,6.

Dari pencapaian IPG tersebut ada beberapa faktor yang mendukung indikator tersebut, diantaranya adalah :

1. Faktor Pendorongnya : Tingginya Angka harapan hidup perempuan di Kabupaten Temanggung dan Harapan lama sekolah
2. Faktor Penghambat : Masih rendahnya penghasilan Perempuan dan rata rata lama sekolah bagi perempuan masih disparitas (perbedaan)

2. Persentase Perempuan dan anak korban kekerasan

Perempuan dan anak korban kekerasan menurut Peraturan Menteri Negara PPPA No 23 tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga, bahwa yang dimaksud perempuan dan anak korban kekerasan adalah *setiap tindakan kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional ,atau pengabaian terhadap perempuan dan atau anak. berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran, termasuk ancaman tindakan tertentu pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang wenang, dan perlakuan buruk lainnya yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.* Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat terjadi dalam beberapa bentuk, dan penanganan pun menurut dari bentuk-bentuk kekerasan yang mereka alami.

Rumus persentase perempuan dan anak korban kekerasan adalah jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang melapor

dan ditangani dibandingkan jumlah Perempuan dan Anak.

Di Kabupaten Temanggung presentase perempuan dan anak korban kekerasan tahun 2018 s.d 2023 Triwulan I sebagaimana Tabel Berikut:

Tabel 2.6
Persentase Perempuan dan Anak korban kekerasan
Kabupaten Temanggung, Tahun 2018 s.d 2023 Triwulan I

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Perempuan dan Anak korban kekerasan	24	48	42	11	22	11
2	Jumlah perempuan dan Anak	500.690	551.996	509.853	506.308	516.213	514.398
3	Persentase	0,0047	0,0094	0,008	0,002	0,0043	0,0021

Sumber : DPPKBPPA dan capil tahun 2022

Dari tabel 2.6 presentase perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Temanggung pada tahun 2018 mencapai angka 0.0047, dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan yaitu 0,0094. Pada tahun 2022 cenderung turun lagi menjadi 0,0043. Pada tahun 2023 sampai triwulan II ada 11 kasus yang melapor atau 0,0021 dari jumlah perempuan dan anak sebanyak 514.398. capaian tersebut dibandingkan dengan target tahun 2023 tercapai 100 % dari target 0,004.

Adapun total jumlah kasus sampai dengan triwulan I ditahun 2023, di kabupaten Temanggung, sebanyak 11 kasus, yang meliputi beberapa kasus seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.7
Jumlah korban kekerasan Perempuan dan Anak
Kabupaten Temanggung, Tahun 2018 s.d 2023 Triwulan I

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023

1	KDRT	5	13	9	3	11	2
2	Kekerasan terhadap anak			2	5	0	
3.	Perkosaan			-	-	3	2
4.	Perbuatan tidak menyenangkan		1	7	-	0	3
5	Bullying/perundungan			2	-	0	
6.	Pembuangan anak			1	-	0	
7.	Penelantaran	3	6	1	-	1	1
8.	Perzinaan			-	-	0	
9.	Kekerasan terhadap TKW			-	-	0	
10.	Kekerasan dalam pacaran			1	-	0	
11.	Pencurian (ABH)		4	9	-	0	
12.	Sodomi		3	-	-	1	
13.	Kekerasan seksual anak			-		3	
14.	Kekerasan seksual (disabel)		1	-		0	
15.	Pelecehan seksual		4	2	1	0	2
16.	Kekerasan Fisik			-	-	0	1
17.	Persetubuhan Anak	7	10	4	2		
18.	Membawa lari anak			1	-	0	
19.	Pencabulan		4	1		0	
20.	TPPO		1	2	-	0	
21.	Bunuh diri anak		1	-	-	0	
22.	Penganiayaan			-		3	
23	Perampasan					0	
	JUMLAH	15	48	42	11	22	11

Sumber : Laporan tim P2TP2A (DPPKBPPPA, Dinas Sosial, PPA Polres, RSUD, WCC), tahun 2022

Jika dilihat berdasarkan jenis kekerasan sebagaimana tabel 4 terlihat beberapa kasus pada tahun 2023 Triwulan II ini ada laporan kasus KDRT sebanyak 2 kasus, perbuatan tidak menyenangkan ada 3 kasus, perkosaan ada 2, penelantaran ada 1 kasus, pelecehan seksual ada 2 kasus, dan kekerasan fisik ada 2 kasus.

Jumlah Kasus selalu fluktuatif karena sangat dipengaruhi oleh laporan dari korban atau pihak lain yang melaporkan kasus tersebut. Kasus kekerasan perempuan dan anak seperti fenomena gunung es, dimana yang melapor lebih sedikit dibandingkan yang tidak melapor. Hal ini karena banyak yang beranggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan aib jika dilaporkan, dan sebagian kasus pelaku kejahatan maupun kekerasan adalah dari keluarga terdekat atau juga dari lingkungannya, yang mana penyelesaiannya kasus cukup diselesaikan di tingkat Desa, dan tidak dilaporkan di tingkat Kabupaten.

Kasus-kasus yang disajikan seperti tersebut diatas telah mendapatkan layanan sesuai standar pelayanan, yang meliputi layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial. Layanan diberikan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan kebutuhan korban. Penanganan kasus tersebut baru dilakukan oleh lembaga dalam jejaring Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di Kecamatan. Dalam rangka menjangkau masyarakat agar kasus kekerasan dapat terpantau, Dinas PPPAPPKB, pada tanggal 29 juni bertepatan dengan peringatan Harganas tahun 2022, telah mencanangkan aplikasi SIPESANPERAK (Sistem Pelaporan Kekerasan Perempuan dan Anak) sebagai aplikasi yang bisa diakses oleh masyarakat dalam pelaporan kasus.

Dari analisa kasus diatas dapat dijadikan referensi bersama bahwa upaya pencegahan berupa sosialisasi, edukasi, penyuluhan dan peningkatan kapasitas lembaga penanganan untuk lebih ditingkatkan. Namun demikian hal ini juga ada beberapa faktor penghambat dalam penanganannya, diantaranya adalah, keterbatasannya dan kemampuan pendamping, dan belum terbentuknya UPT PPPA di kabupaten Temanggung.

3. Persentase keterwakilan perempuan di Lembaga Pemerintah

Salah satu ukuran kontribusi perempuan dalam peningkatan perekonomian dan kesejahteraan keluarga adalah partisipasi angkatan kerja perempuan. Partisipasi angkatan kerja perempuan dapat dilihat dari jumlah semua angkatan kerja perempuan baik disektor swasta maupun sektor pemerintah.

Sedangkan definisi dari keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah adalah *besarnya jumlah perempuan yang bekerja pada sektor pemerintah*

Rumus : jumlah keterwakilan perempuan dilembaga pemerintah dibanding jumlah perempuan pada angkatan kerja kali 100 %.

Partisipasi angkatan kerja perempuan di lembaga pemerintah pada tahun 2023 sampai Triwulan I sebanyak 2,46 %

Tabel 2.8

Persentase keterwakilan dilembaga pemerintah
Kabupaten Temanggung Tahun 2018 s.d 2023 Triwulan I

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah perempuan di lembaga pemerintah	4.508	3.711	3.536	3.349	3349	4.947
2	Jumlah angkatan kerja perempuan	182.753	196.675	174.643	187.543	185.816	185.816
	Persentase	2,46	1,88	2,02	1,80	1,80	2,66

Sumber : DPPKBPPA tahun 2023

Dari tabel diatas keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah di Kabupaten Temanggung turun dari tahun 2018 sampai 2022 dari angka 2,46 ke 1,80. dan pada tahun 2023 triwulan II naik menjadi 2,66, namun turun dari Triwulan I sebesar 0,01 dikarenakan ada yang purna

Tabel 2.9

Keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah
Kabupaten Temanggung tahun 2023 sampai Triwulan I

NO	NAMA OPD	LAKI -LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1	Sekretaris Daerah	77	42	119	35,29
2	Sekretaris DPRD	16	7	23	30,43
3	BAPPEDA	19	26	45	57,78
4	BKPSDM	19	14	33	42,42
5	DINPERMADES	10	14	24	58,33
6	Inspektorat	21	28	49	57,14
7	DPRKPLH	99	43	142	30,28
8	RSUD	139	332	471	70,49
9	DPPPAPPKB	14	16	30	53,33
10	Dinkominfo	23	11	34	32,35
11	BPBD	10	3	13	23,08
12	Dindukcapil	17	30	47	63,83
13	Dinkes	201	1006	1207	83,35
14	BPPKAD	35	32	67	47,76
15	Dindikpora	1.472	2.983	4455	66,96
16	Dishub	46	7	53	13,21

17	Disperindagkop UMKM	80	16	96	16,67
18	Dintan Pangan	114	121	235	51,49
19	Dinsos	18	23	41	56,10
20	Disnaker	25	16	41	39,02
21	DPU	92	25	117	21,37
23	Dinbudpar	20	11	31	35,48
24	Dinarpus	15	17	32	53,13
25	Kesbangpol	12	11	23	47,83
26	Satpol PP Damkar	43	7	50	14,00
28	DPMPTSP	9	10	19	52,63
29	Kec.Bansari	11	6	17	35,29
30	Kec.Bejen	9	5	14	35,71
31	Kec.Bulu	7	8	15	53,33
32	Kec.Candirototo	10	5	15	33,33
33	Kec.Gemawang	13	1	14	7,14
34	Kec.Jumo	11	5	16	31,25
35	Kec.Kaloran	8	6	14	42,86
36	Kec.Kandangan	9	5	14	35,71
37	Kec.Kedu	10	7	17	41,18
38	Kec.Kledung	12	4	16	25,00
39	Kec.Kranggan	16	7	23	30,43
40	Kec.Ngadirejo	21	4	25	16,00
41	Kec.Parakan	23	6	29	20,69
42	Kec.Pringsurat	10	8	18	44,44
43	Kec.Selopampang	12	4	16	25,00
44	Kec.Temanggung	77	39	116	33,62
45	Kec.Tembarak	7	6	13	46,15
46	Kec.Tlogomulyo	11	6	17	35,29
47	Kec.Tretep	12	1	13	7,69
48	Kec.Wonoboyo	10	5	15	33,33
	Jumlah	2.891	4.947	7.898	62,64

Dari tabel diatas, jumlah ASN perempuan dibandingkan laki laki di kabupaten Temanggung lebih besar perempuan, hal ini sudah menunjukkan peningkatan. Keterlibatan perempuan dalam lembaga pemerintah.

4. Rasio Perangkat Daerah yang menerapkan kebijakan responsive gender dalam penyusunan renja SKPD.

Perencanaan Responsif Gender menurut Permendagri nomor 67 tahun 2011 tentang pedoman umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah pasal 1, bahwa perencanaan Responsif Gender adalah *perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki laki.*

Salah satu ukuran kontribusi Perempuan dalam merencanakan proses pembangunan, yaitu Perencanaan Pembangunan dengan mempertimbangkan 4 aspek yaitu:

1. Akses
2. Partisipatif
3. Control ,dan
4. Manfaat yang setara bagi laki laki dan perempuan

Dengan mengintegrasikan Aspirasi Kebutuhan permasalahan laki laki dan perempuan ke dalam perencanaan PUG, didasarkan kepada hasil analisis gender yang menggunakan data terpilah/statistik gender. Untuk menyusun Anggaran Responsif Gender (ARG) digunakan Analisa Gender yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan pembangunan.

Rumus perhitungan Rasio PD yang menerapkan kebijakan Responsif Gender dalam penyusunan Renja SKPD adalah jumlah PD yang menerapkan ARG dibandingkan jumlah PD dikalikan 100%.

Tabel 2.10
Rasio PD yang menerapkan kebijakan Responsif Gender
dalam penyusunan Renja SKPD Kabupaten Temanggung
Tahun 2018 s.d 2023 Triwulan I

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah PD yang menerapkan ARG	23	23	20	21	38	46
2	Jumlah PD	46	46	48	48	46	46
	Persentase	N/A	N/A	50,00	41,67	82,61	100%

Sumber DPPKBPPA Tahun 2023

Perangkat Daerah yang menerapkan Anggaran responsif Gender

pada tahun 2018 sejumlah 23 PD, dan pada tahun 2019 yang melaporkan sejumlah 20 ada penurunan 3 PD. Pada tahun 2020 ada peningkatan menjadi 22 PD, hal ini juga adanya lintas sektoral antar PD sebagai hasil review Inspektorat dalam pembuatan RKA tahun 2021 yang dilaksanakan tahun 2020. Namun pada tahun 2021, yang melaporkan ada 38 PD, dari jumlah 46 PD yang dilatih pada tahun tersebut. Untuk tahun 2022 triwulan IV, dari hasil bimtek ARG ada 46 PD yang sudah melaporkan atau 100% dari jumlah PD sebanyak 46. Adapun daftar OPD yang menerapkan ARG sebagai mana dalam tabel berikut :

Tabel 2.11
PD yang menerapkan kebijakan Responsif Gender
dalam penyusunan Renja SKPD Kabupaten Temanggung
Tahun 2023 Triwulan II

NO	NAMA OPD	TAHUN 2022		
		PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
1	DINDIKPORA	PENGELOLA PENDIDIKAN	PENGELOLA PENDIDIKAN DASAR SOSIALISASI BOS	Rp 3.750.000
			PENGELOLA PENDIDIKAN DASAR BIMBINGAN TEKNIS PENGGUNAAN APLIKASI	Rp 7.500.000
			PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	Rp 25.000.000
2	DINAS SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	REHABILITAS SOSIAL PENYADANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI	Rp 6.499.800
		PROGRAM PENANGAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	PEMULANGAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DAN TITIK DEBARKASI DI DAERAH KAB/KOTA UNTUK DI PULANGKAN KE DESA/KELURAHAN ASAL	Rp 14.714.000
3	SATPOL PP	PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PENANGAN GANGGUAN KENTETRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM SATU DAERAH KAB/KOTA	Rp 92.000.000
4	INPEKTORAT	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Rp 20.000.000
		PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL	Rp 80.000.000
5	DINKOPDAK UMKM	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	PENDIDIKAN DAN LATIHAN UKM BAGI UKM DALAM DAERAH DI KAB/KOTA	Rp 50.000.000
			PENDATAAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO	Rp 36.094.500
			PENDATAAN POTENSI DAN PENHGBANGAN USAHA MIKRO	Rp 24.515.500

			PENDATAAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO	Rp 39.390.000
6	DINPERINNAKER	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKAL	PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI	Rp 350.590.000
7	KESBANGPOL	PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK	Rp 202.042.900
8	DISHUB	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN /ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KAB/KOTA	Rp 284.444.000
9	DINBUDPAR	PENINGKATAN DAYA TARIK WISATA	PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA	Rp 118.188.000
10	KOMINFO	PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA KOMUNIKASI PUBLIK	Rp 26.933.000
11	RSUD TEMANGGUNG	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAMN TINGKAT KAB/KOTA	Rp 215.439.957.130
12	BAPPEDA	PENELITIAN DAN PENGEMBANGNA DAERAH	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH PENGKAJIAN PERATURAN	Rp 100.986.000
			PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI	Rp 29.999.800
		PROGRAM PERENCANAAN , PENGENDALIAN DAN EVALUASI	KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB/KOTA	Rp 276.432.000
		PEMBANGUNAN DAERAH.		
		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPd)	Rp 125.716.000
13	DKK	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PENYEDIA LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KAB/KOTA	Rp 456.547.000
14	BKPSDM	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	SERTIFIKASI, KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PIMPINAN DAERAH, JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN FUNGSIONAL, KEPEMIMPINAN DAN PRAJABATAN	Rp 4.716.560.000
15	DPM	PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KAB/KOTA	Rp 389.629.400

16	DKPPP	PROGRAM PENINGKATAN DIVERDIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	PELAKSANAAN PENCAPAIAN TARGET KOMSUMSI PERKAPITA/TAHUN SESUAI DENGAN ANGKA KECEKUPAN GIZI	Rp 60.000.000
17	DPRKPLH	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KAB/KOTA	Rp 29.999.900
18	DPPPAPPKB	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PERBERDAYAAN PEREMPUAN	PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA LEMBAGA PEMERINTAH DAERAH KEWENANG KAB/KOTA	Rp 50.000.000
19	DPUPR	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KAB/KOTA	Rp 6.684.691.000
20	SETDA	PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Rp 125.000.000
21	BPBD	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	Rp 155.700.000
22	BPKPAD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNA LAINNYA	Rp 103.500.000
23	STKES TEMANGGUNG	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	SOSIALISASI PROGRAM PEMERINTAH DALAM MENEKAN PENYEBARAN COVID-19 KEPADA LANSIA DAN KADER KESEHATAN DI PARAKAN WETAN	Rp 3.000.000
			PEMBERIAN SEMBAKO KEPADA MASYARAKAT TIDAK MAMPU (DAMPAK DARI PANDEMI COVID-19) DI LINGKUNGAN SEKITARSEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN NGESTI WALOYO	Rp 5.818.000
24	DIDUKCAPIL	PENGELOLAAN INFORMASI ADMINDUK	PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI AMINDUK	Rp 612.358.775
25	DINPERMADES	ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA	FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA	Rp 50.000.000
26	PERPUS	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KAB/KOTA	Rp 100.608.000
27	KEC. KEDU	PENGELOLA AN KECAMATAN	KOORDINASI KEGIATAN PERBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	Rp 24.000.000
28	KEC. PARAKAN	PROGRAM PERBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KOORDINASI KEGIATAN PERBERDAYAAN DESA	Rp 5.000.000
29	KEC. KLEDUNG	PROGRAM PERBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KOORDINASI KEGIATAN PERBERDAYAAN DESA	Rp 10.000.000
30	KEC. BEJEN	PROGRAM PERBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KOORDINASI KEGIATAN PERBERDAYAAN DESA	Rp 7.625.000
31	KEC. KRANGGAN	PROGRAM PERBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KOORDINASI KEGIATAN PERBERDAYAAN DESA	Rp 11.567.000
32	KEC. BULU	PROGRAM PERBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KOORDINASI KEGIATAN PERBERDAYAAN DESA	Rp 22.000.000

33	KEC. WONOBOYO	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	Rp 1.720.000
34	KEC. TEMBARAK	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	Rp 10.085.000
35	KEC. JUMO	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	Rp 17.360.000
36	KEC. SELOPAMPANG	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	Rp 11.000.000
37	KEC. GEMAWANG	PENGELOLAAN KECAMATAN	KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	Rp 19.998.600
38	KEC. TLOGOMULYO	PENGELOLAAN KECAMATAN	KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	Rp 14.000.000
39	KEC. BANSARI	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	Rp 5.000.000
40	KEC. PRINGSURAT	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	Rp 20.000.000
41	KEC. KANDANGAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	Rp 8.460.000
42	KEC. KALORAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	Rp 14.055.000
43	KEC. TRETEP	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	Rp 5.000.000
44	KEC. CANDIROTO	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	Rp 6.280.000
45	KEC. TEMANGGUNG	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	Rp 35.000.000
46	KEC. NGADIREJO	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	Rp 1.394.000.000
JUMLAH				Rp 232.540.315.305

Sumber DPPAPPKB TAHUN 2022

Dari sumber yang dapat kami kumpulkan dapat kami sampaikan beberapa faktor yang mendorong dan yang menghambat proses

pelaksanaan kegiatan ini antara lain:

1. Faktor pendorongnya adalah adanya bintek yang mendorong OPD untuk menyusun ARG
2. Faktor penghambatnya adalah masih kurangnya pemahaman petugas dalam penyusunan ARG.

Untuk lebih detailnya PD yang telah menyusun dan menganggarkan untuk program ARG sebagaimana di tampilkan pada tabel 10.1 tersebut diatas.

5. Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan

Kasus kekerasan terhadap anak perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan anak perempuan secara seksual, psikologis, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, dan perlakuan buruk lainnya yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.

Rumus : kasus kekerasan terhadap anak perempuan yang diadukan dan ditangani dibandingkan dengan jumlah anak perempuan dikalikan 100%.

Tabel 2.12
Pervalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan
Kabupaten Temanggung, Tahun 2018 s.d 2023 Triwulan II

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kekerasan terhadap anak perempuan yang melapor dan ditangani	15	16	24	5	3	5
2	Jumlah anak perempuan	113.222	111.545	113.700	114.319	107.733	107.733
3	Persentase	0,013	0,014	0,021	0,0044	0,003	0,005

Sumber DPPKBPBA tahun 2023

Dari tabel 2.12 terlihat semua kasus yang melapor belum

tertangani sesuai dengan Standar Operasional Persedur. Jumlah seluruh kasus yang terjadi pada perempuan dan anak dari tahun 2018 sampai tahun 2020 semakin naik, namun mulai tahun 2021 sampai 2023 TW 1, ini semakin turun, hal ini karena telah dilakukan sosialisasi pencegahan kekerasan dan sosialisasi tentang UU tentang perlindungan Anak dan UU tentang kekerasan. Adapun kasus yang terjadi pada tahun 2023 TW II ini ada di beberapa kecamatan, seperti ada dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.13
Kasus Kekerasan terhadap anak dan Perempuan
Kabupaten Temanggung sampai tribulan II tahun 2023

No	Jenis Kasus	KECAMATAN																		2023		
		Temanggung	Tembarak	Selopampan	Pringsurat	Kranggan	Kaloran	Kandangan	Bulu	Kedu	Tlogomulyo	Parakan	Bansari	Kledung	Jumo	Gemawang	Ngadireio	Candirototo	Bejen		Wonobojo	Tretep
1	KDRT	1			1																	2
2	Kekerasan terhadap anak/Penganiayaan	1						1														2
3	Perkosaan										1											1
4	Perbuatan tidak menyenangkan/Trauma						1		1						1							3
5	Bulliyng/Perundungan																					
6	Pembuangan Anak																					
7	Penelantaran								1													1
8	Perzinaan																					
9	Kekerasan terhadap TKW																					
10	Kekerasan dalam Pacaran																					
11	(ABH)																					
12	Sodomi																					
13	Kekerasan seksual Anak	1			1																	2
14	Kekerasan Seksual (disabil)																					
15	PelecehanSeksual																					
16	Kekerasan fisik																					
17	Persetubuhan Anak																					
18	Membawa Lari anak																					
19	Pencabulan																					
20	TPPO/Trafficking																					
21	Bunuh diri Anak																					
22	Penganiayaan																					
23	Perampasan																					
	Jumlah	2			1		1	1	2						1							11

5. Persentase desa sayang ibu dan bayi

Salah satu upaya Pemerintah dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan adalah dengan Gerakan Sayang Ibu (GSI).

Gerakan Sayang Ibu (GSI) merupakan **gerakan** percepatan penurunan angka kematian **ibu** dan bayi yang dilaksanakan bersama-sama. Yakni, antara pemerintah dan masyarakat untuk lebih meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kepedulian terhadap kesehatan **ibu** dan bayi.

Adapun Rumus dari GSI Adalah jumlah desa yang telah memiliki satgas gerakan sayang ibu dan bayi dibandingkan jumlah desa yang ada dikalikan 100 %

Tabel 2.14
Persentase Desa sayang ibu dan bayi

Kabupaten Temanggung tahun 2018 sampai 2023 Triwulan I

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah desa sayang ibu dan bayi	62	82	82	91	115	139
2	Jumlah desa	289	289	289	289	289	289
Persentase		21,45	28,37	28,37	31,48	39,79	48,1

Sumber : dppappkb tahun 2022

Dari tabel diatas, jumlah desa yang sudah mempunyai satgas GSI, dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 triwulan I sejumlah 115 Desa/39,79% dari jumlah desa sebanyak 289. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menurunkan AKB dan AKI, diantaranya adalah dengan integrasi kegiatan yang ada ditingkat desa, yaitu desa Siaga dan memaksimalkan FKD/Forum Kesehatan Desa. Adapun desa yang sudah mempunyai satgas GSI, adalah seperti yang ada ditabel berikut ini :

Tabel 2.15
Daftar Desa yang mempunyai satgas GSI

Kabupaten Temanggung tahun 2016 sampai 2023 Triwulan I

NO	Desa	Kecamatan	Tahun dibentuk satgas						
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Mojosari	Bansari				v			
2	Candisari				v				
3	Bansari			v					
4	gintingsari								v
5	Campuranom								
6	Mranggen tengah								v
7	Tanurejo		v						

8	Prangkoan	Bejen							
9	Jlegong		v						
10	Selosabrang			v					
11	Lowungu				v				
12	Larangan luwok					v			
13	Bulu	Bulu		v					
14	Mondoretno		v						
15	Pakurejo					v			
16	pengilon								v
17	tegalrejo								v
17	Krawitan	Candirotto							
18	Ngabean		v						
19	Kentengsari			v					
20	Muntung				v				
21	Plosogaden					v			
22	ngabean								v
23	sidoharjo								
24	Ngadisepi	Gemawang	v						
25	Banaran			v					
26	Kemiriombo				v				
27	Jambon					v			
28	karangseneng								v
29	Gedongsari	jumo		v					
30	Jombor				v				
31	Gedongsari					v			
32	Barang								v
33	gununggempol								v
34	jumo								v
35	Desa Kertosari						v		
36	Ketitang							v	
37	morobongo								v
38	Kemiri	Kaloran		v					
39	Kwarakan				v				
40	Getas						v		
41	Tempuran								v
42	Kedungngumpul	Kandangan	v						
43	Kandangan			v					
45	Gesing				v				
46	Ngemplak					v			
47	Tlogopucang						v		
48	Gondangwayang	Kedu							
49	Karangtejo		v						
50	Kundisari			v					
51	Salamsar				v				
52	Tegalsari					v			
53	Candimulya						v		
54	Jeketro	Kledung	v						
55	Kalirejo								
56	Kledung			v					
57	Kwadungan Jurang					v			
58	Tlahap						v		
59	Nguwet	Kranggan		v					
60	Pare		v						

61	Purwosari					v			
62	Klepu						v		
63	ngropoh								v
64	Campursari	Ngadirejo	v						
65	Gondang wetan					v			
66	Gondangwinangun								
67	Pringapus						v		
68	Caturanom	Parakan		v					
69	Depokharjo					v			
70	Mandisari						v		
71	Parakan wetan		v						
72	Traji				v				
73	Gowak	Pringsurat							
74	Klepu					v			
75	Kupen				v				
76	Rejosari			v					
77	pagergunung								
78	Bulan	Selopampang	v			v			
79	Gambasan				v				
80	Selopampang			v					
81	bagusan								v
82	Bumiayu								v
83	Jetis								v
84	Kecepit								v
85	ngaditirto								v
86	Kowangan	Temanggung	v						
87	Mudal				v				
88	Gilingsari						v		
89	Guntur			v					
90	Lungge					v			
91	Drono	Tembarak				v			
93	Kemloko		v						
94	Menggoro						v		
95	Purwadadi				v				
96	Tawang Sari			v					
97	Candissari	Tlogomulyo					v		
99	Langgeng			v					
100	Pagersari					v			
101	Bendungan	Tretep				v			
102	Bojong			v					
103	Donorejo				v				
104	Sigedong		v						
105	Simpar								
107	Tlogomulyo						v		
108	Nglarangan								v
109	tempelsari								v
110	Kebonsari	Wonobojo	v						
111	Semen					v			
112	Wates			v					
113	Wonobojo		v						
114	Pateken								
115	rejosari								

Sumber DPPPAPKB Tahun 2023

Dari tabel diatas dari jumlah 289 Desa, yang sudah dievaluasi dan telah mempunyai SK Satgas GSI sebanyak 139 Desa sejak tahun 2016 sampai tahun 2023 Tribulan II. Dalam mencapai target RPJMD, Dinas PPPAPPKB Kabupaten Temanggung, akan berusaha dengan meningkatkan advokasi kepada pemangku kegiatan untuk dapat menggerakkan masyarakat dalam gerakan sayang ibu dan bayi, dalam rangka menurunkan angka kematian Ibu/AKI dan angka kematian bayi/AKB.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi capaian indikator ini adalah :

1. Faktor pendorong : Peningkatan komitmen pemerintah dan keserasan masyarakat terhadap pentingnya pencegahan kematian ibu dan bayi, dengan mensosialisasi 3T dan 4 terlalu
2. Faktor Penghambat : masih adanya budaya masyarakat bahwa kehamilan, dan melahirkan menjadi urusan perempuan

6. Persentase Rumah sakit sayang ibu dan bayi.

Salah satu upaya Pemerintah dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan adalah dengan Gerakan Sayang Ibu (GSI). Dalam rangka mendukung suksesnya gerakan tersebut, selain Rumus persentase Rumah sakit sayang ibu dan bayi:

- Jumlah Rumah sakit sayang ibu dan bayi dibagi jumlah rumah sakit yang ada dikalikan 100 %.

Adapun presentase rumah sakit sayang ibu dan bayi di kabupaten Temanggung pada tahun 2023 adalah :

Tabel 2.16
Persentase Rumah sakit sayang ibu dan bayi
Kabupaten Temanggung tahun 2018 sampai 2023 Triwulan II

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah rumah sakit sayang ibu dan bayi	0	0	0	0	4	4
2	Jumlah rumah sakit	0	0	0	0	4	4
3	Persentase	0	0	0	0	100	100

Sumber : dppappkb tahun 2023

Dari tabel diatas, rumah sakit sebagai pelayanan kesehatan yang mendukung gerakan sayang ibu dan anak di Kabupaten Temanggung

pencapaiannya 100%, karena dari semua Rumah sakit yang ada di Kabupaten Temanggung, semua melayani dan peduli akan kesehatan ibu dan bayi dalam rangka menurunkan AKB dan AKI.

7. Persentase terbentuknya kecamatan layak anak

Kecamatan layak anak menurut Permen PPPA Nomor 11 tahun 2011 adalah *sistem pembangunan di tingkat kecamatan yang berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah kecamatan, masyarakat dan dunia usaha yang berada di kecamatan dalam rangka menghormati, menjamin dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan yang telah terbentuk gugus tugas dan melakukan pengarusutamaan hak anak.*

Indikator-indikator Kecamatan Layak Anak minimal memuat 5 cluster hak anak yaitu :

1. Hak sipil dan kebebasan lingkungan keluarga.
2. Pengasuhan alternatif.
3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan.
4. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya.
5. Perlindungan khusus.

Rumus Presentase Kecamatan layak anak adalah jumlah kecamatan layak anak dibandingkan dengan jumlah kecamatan yang ada dalam satu kabupaten X 100%.

Jumlah kecamatan layak anak di Kabupaten Temanggung Tahun 2018 s.d 2023 Triwulan II sebagaimana tersebut pada

Tabel 2.17

Kecamatan Layak Anak Kabupaten Temanggung Tahun 2018 s.d 2023 Triwulan II

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kecamatan layak Anak	4	8	12	16	16	16
2	Jumlah Kecamatan	20	20	20	20	20	20
3	Persentase	20 %	40%	60%	80%	80%	80%

Hingga saat ini sudah ada 16 kecamatan dan 12 desa/kelurahan rintisan layak anak yang terbentuk, yaitu kecamatan Kranggan, Temanggung, Kedu, Ngadirejo, Gemawang, Selopampang, Parakan, Kaloran, Tembarak, Jumo, Pringsurat, Bulu (Yang belum Tretep, Wonobojo, Kledung, Bejen) dan 8 Kelurahan yaitu Temanggung I, Temanggung II, Butuh, Banyuurip, Kowangan, Jampirejo, Jampireso dan Kertosari. Pada tahun 2020 kegiatan Kecamatan dan Kelurahan/Desa layak Anak sifatnya adalah pembinaan dan pengembangan dalam kegiatan kecamatan, desa/kelurahan layak anak, bersama lintas sektoral. Pembentukan rintisan kelurahan layak anak tersebut didasarkan pada pemilikan sarana prasarana baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan indikator Desa/Kelurahan layak anak. Sedangkan 12 Kecamatan sebagai rintisan pun didasarkan dengan adanya beberapa indikator kecamatan layak anak, dengan adanya indikator tersebut akan kita temukan beberapa hambatan dan masalah yang pada dasarnya adalah merupakan temuan yang harus di selesaikan. Adapapun faktor pendorong dan penghambatnya adalah sebagai berikut :

1. Adanya Integrasi dengan program lain yang mendukung Kelana (Kecamatan layak anak).
2. Faktor Penghambatnya adalah Masih rendahnya pendampingan dalam pelaksanaan Kelana (Kecamatan Layak Anak).
3. Belum semua ditingkat Kecamatan terbentuk Forum Anak.

8. Persentase anak korban kekerasan

Kekerasan terhadap anak menurut WHO mencakup semua bentuk perlakuan yang salah baik secara fisik dan/atau emosional, seksual, penelantaran, dan eksploitasi yang berdampak atau berpotensi membahayakan kesehatan anak, perkembangan anak, atau harga diri anak dalam konteks hubungan tanggung jawab.

Rumus Persentase anak korban kekerasan adalah jumlah kekerasan terhadap anak (usia dibawah 18)dibagi dengan jumlah seluruh anak dikalikan 100 %).

Jumlah anak korban kekerasan di kabupaten Temanggung dari tahun 2018 sampai pada tahun 2023 tribulan I adalah sebagai berikut :

Tabel 2.18
 Persentase anak korban kekerasan kabupaten Temanggung
 Tahun 2019 s/d tahun 2023 tribulan II

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Anak korban kekerasan	28	33	6	11	7
2	Jumlah anak	75.587	75.587	232.967	231.111	221.236
3	Persentase	0,04	0,04	0,0026	0,0048	0,0032

Sumber DPPKBPPPA

Dari tabel 2.1 presentase anak korban kekerasan di Kabupaten Temanggung pada tahun 2019 mencapai angka 0.0047, dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan yaitu 0,0094. Pada tahun 2022 cenderung turun lagi menjadi 0,0043.

Pada tahun 2023 sampai triwulan I ada 4 kasus yang melapor atau 0,0004 dari jumlah perempuan dan anak sebanyak 513,245

9. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Salah satu ukuran kontribusi perempuan dalam perekonomian adalah partisipasi angkatan kerja perempuan. Partisipasi angkatan kerja perempuan adalah besarnya jumlah perempuan yang bekerja pada angkatan kerja.

Rumus jumlah perempuan yang bekerja pada angkatan kerja dibanding jumlah perempuan usia angkatan kerja kali 100 %.

Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Temanggung tahun 2016 s.d 2022 triwulan IV disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.19
 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
 Kabupaten Temanggung 2018 s.d 2023 Triwulan II

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah angkatan kerja perempuan	182.753	196.675	174.643	174.643	190121	202.533
2	Jumlah perempuan dalam usia kerja	292.608	296.141	307.055	307.055	304.068	253.372
Persentase		62,45	66,41	56,87	56,87	62,52	79,93

Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Temanggung terlihat fluktuatif, dengan melihat persentase tersebut ada peningkatan jumlah angkatan perempuan dibanding jumlah perempuan dalam usia kerja, terdapat fluktuasi pada tahun 2018 yaitu 62,45 %. Di tahun 2019 naik, yakni menjadi 66,41 sedangkan tahun 2020 turun lagi menjadi

56,87%. Namun pada tahun 2021 sampai tahun 2023 triwulan I angka semakin naik ini menunjukkan hal positif bagi perempuan.

Dengan adanya dampak covid 19, yang salah satu permasalahan banyaknya yang kepala Keluarga yang di PHK.

10. Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Peraturan Menteri Negara PPPA No 23 tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga. Yang diantaranya relevansinya dengan tugas dan fungsi PPPA adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Rumus Rasio KDRT adalah jumlah kasus KDRT dibagi jumlah rumah tangga dikali 1.000.

Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Temanggung tahun 2017 s.d 2023 Triwulan I disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.20
Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga Kabupaten Temanggung, Tahun 2018 s.d 2022 Triwulan I

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah KDRT	6	13	9	3	11	2
2	Jumlah Rumah Tangga	251.334	257.391	212.205	212.205	196.536	196.536
3	Rasio KDRT	0,02	0,05	0,004	0,014	0,055	0,01

Meskipun rasio kekerasan dalam rumah tangga 6 tahun terakhir 1:4000 penduduk, namun hal ini cukup memprihatinkan mengingat sudah banyak upaya untuk membangun kepedulian terhadap KDRT, baik melalui *Women Crisis Center (WCC)*, Unit Palayanan Terpadu (PTT) di setiap kecamatan, PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) di Polres, pendampingan dari Dinas Sosial, koordinasi lintas sektoral melalui P2TP2A (Pos Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) dan optimalisasi peran masyarakat dalam pencatatan dan pelaporan kasus KDRT. Selain itu sudah dilakukan upaya-upaya preventif berupa sosialisasi kepada anak sekolah dan organisasi kemasyarakatan.

Adapun tabel perkasus yang masuk kategori dalam KDRT,

perkecamatan pada tahun 2022, adalah tabel berikut ini :

Tabel 2.21
KDRT PER KECAMATAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 TRIWULAN I

No	Jenis Kasus	KECAMATAN																		jumlah		
		Temanggung	Tembarak	Selopampang	Pringsurat	Kranggan	Kaloran	Kandangan	Bulu	Kedu	Tlogomulyo	Parakan	Bansari	Kledung	Jumo	Gemawang	Ngadirejo	Candiroto	Bejen		Wonoboyo	Tretep
1	Penganiayaan	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
2	Phisik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pembunuhan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	penelantaran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

B. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk menurut UU No 52 tahun 2009 adalah *perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya. Kegunaannya adalah memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang.*

Rumus untuk memperoleh hasil laju pertumbuhan adalah Jumlah Penduduk tahun tertentu dibagi jumlah penduduk tahun dasar dikalikan selisih jumlah penduduk tahun P_t dengan P_o

$$r = \frac{(P_t/P_o) \times (1/t) - 1}{x 100}$$

Keterangan:

P_t = Jumlah penduduk pada tahun t

P_o = Jumlah penduduk pada tahun dasar

t = selisih tahun P_t dengan P_o

r = laju pertumbuhan penduduk

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung pada tahun 2022, sebesar 0,54 %,

Tabel 2.22
Pertumbuhan Penduduk kabupaten Temanggung
Tahun 2018 s.d 2023 Triwulan II

Uraian	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah penduduk	765.659	791.264	791.264	791.264	799.764	799.764
Laju pertumbuhan penduduk (%)	0,88	0,98	0,98	0,98	0,54	0,54

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2020

Berdasarkan Tabel 14 selama periode 5 tahun yaitu dari tahun 2018 s.d 2021, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung mengalami kenaikan. Sedangkan Pada tahun 2022 perhitungan dilaksanaka pada tahun 2021 dan dipublikasikan pada tahun 2022 sebesar 0,54% yang perhitungannya oleh BPS.

2. Persentase Penyediaan Data Mikro Keluarga di Desa/ Kelurahan

Data mikro keluarga merupakan data hasil pengumpulan, pengolahan, berdasarkan pendataan keluarga atau mutasi data keluarga tentang ciri-ciri keluarga meliputi KB (Keluarga Berencana) dan KS(Keluarga Sejahtera) di suatu wilayah sesuai dengan kondisi lapangan dilakukan setiap tahun sekali.

Rumus perhitungan persentase penyediaan data mikro keluarga di Desa/Kelurahan adalah jumlah Dokumen data mikro keluarga yang ada dan yang disajikan dibagi dengan jumlah desa yang ada x 100%.

Tabel 2.23
Persentase Penyediaan Data Mikro Keluarga di Desa/ Kelurahan
Kabupaten Temanggung tahun 2018 s.d 2023 Triwulan II

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah dokumen Keluarga yang yang disajikan	289	289	289	289	289	289
2	Jumlah KK	289	289	289	289	289	289
Persentase		100%	100%	100%	100%	100%	100%

Data mikro keluarga merupakan data berkembang yang dilaporkan setiap tahun oleh masing masing kecamatan yang diolah untuk mengetahui perkembangan KK, KB dan KS di Kabupaten Temanggung. Dari hasil laporan kecamatan pada periode tahun 2018s.d 2023 Triwulan I, jumlah desa tidak mengalami tambahan. Adapun data yang kita gunakan sekarang masih menggunakan data yang masih berjalan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

3. Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/ unmetneed

Unmetneed merupakan jumlah Pasangan usia subur yang tidak menggunakan alat kontrasepsi (tidak KB) yang terdiri dari pasangan usia

subur Ingin Anak Tunda (IAT) dan Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL).

Rumus prosentase Unmetneed : Jumlah pasangan usia subur (PUS) dikurangi jumlah peserta KB aktif dikurangi PUS hamil dan Ingin Anak Segera (IAS)dibagi pasangan usia subur x100 %.

Tabel 2.24
 Persentase Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed)
 Kabupaten Temanggung tahun 2018 s.d 2023 Triwulan I

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah PUS Unmetneed	9.825	15.309	17.948	17.012	15084	13.528
2	Jumlah PUS	144.426	133.827	130.415	130.996	131.516	130.041
	Persentase	6,8	11,43	13,76	12,99	11,47	10,4

Semakin kecil jumlah persentase unmetneed maka nilainya semakin baik. Selama periode tahun 2017–2020, unmetneed tertinggi di tahun 2020 sebesar 13,76 dari PUS 130.415, dan terendah di tahun 2018 yaitu 6,80 dari PUS 144.426. harapan dari Unmetneed dari tahun ke tahun adalah menurun, namun pada tahun 2020 angkanya naik terus dikarena ada pemutahiran data yang dilaksanakan di lini lapangan, untuk pencapaian pada tahun 2021 angka unmetneed sudah mulai turun menjadi 12,99.

Dari tahun 2021 sampai tahun 2023 triwulan I Angkanya sudah menunjukkan peningkatan atau turun menjadi 10,65. Adapun hasil update data melalui SIMANTAP KON KB sampai bulan februari 2023 mencapai 13.922 atau 10,65 dari jumlah PUS 131.663. Namun demikian dengan angka tersebut masih perlu upaya keras untuk mencapai target kinerja di tahun 2023 sebesar 9,17. Adapun rencana kegiatan dalam rangka upaya penurunan unmet need adalah dengan segmentasi sasaran untuk sasaran pelayanan Kbdalam moment moment strategis.

Tabel 2.25
PUS yang ingin ber-KB tapi tidak terlayani (unmetneed)
Kabupaten Temanggung, tahun 2018 s.d 2023 Triwulan II

No	Kecamatan	Tahun												
		2018		2019		2020		2021		2022		2023		
		Jml		Jml		Jml		Jml		Jml		Jml		
		PUS	Unmet need	PUS	Unmet need	PUS	Unmet need							
1	Temanggung	14.499	13.521	14.141	965	14.499	11.237	11.237	1.960	11441	1.442	11.256	1.178	
2	Tlogomulyo	4.788	4.541	4.698	255	4.788	4.138	4.138	380	4.039	376	4.099	333	
3	Kranggan	8.628	8.387	8.542	478	8.628	8.200	8.200	862	8.245	1030	8.286	799	
4	Tembarak	5.431	5.387	5.423	316	5.431	5.084	5.084	771	5.081	605	5.006	536	
5	Selopampang	3.759	3.535	3.660	202	3.759	3.319	3.319	411	3161	228	3.292	277	
6	Pringsurat	9.263	9.718	9.702	470	9.263	8.914	8.914	873	9177	999	8.992	937	
7	Kaloran	7.760	8.576	7.790	446	7.760	7.607	7.607	958	1219	753	7.574	765	
8	Parakan	9.133	9.165	9.603	1.037	9.133	7.849	7.849	1.677	7749	1.287	7.613	1.139	
9	Bansari	4.700	4.812	4.693	343	4.700	4.193	4.193	372	4.194	323	4.135	462	
10	Kledung	5.196	5.190	5.212	315	5.196	5.095	5.095	458	4949	454	4.987	438	
11	K e d u	10.733	10.781	10.699	940	10.733	9.415	9.415	1.185	9772	1.285	9.717	1.160	
12	B u l u	8.409	8.804	8.784	584	8.409	8.418	8.418	765	8378	807	8.236	764	
13	Kandangan	9.237	9.398	9.188	796	9.237	8.792	8.792	1.098	9726	1.036	8.770	859	
14	Candiroto	5.692	5.665	5.731	412	5.692	5.295	5.295	724	5.520	712	5.488	585	
15	B e j e n	4.124	4.083	4.112	328	4.124	3.700	3.700	519	3.604	390	3.567	384	
16	J u m o	5.683	5.567	5.594	417	5.683	4.973	4.973	617	4.963	401	4.908	330	
17	Gemawang	6.955	6.829	6.870	635	6.955	6.074	6.074	605	6.138	528	6.163	515	
18	Tretep	5.326	5.125	5.125	394	5.326	4.688	4.688	805	4175	543	4.177	354	
19	Wonoboyo	4.781	5.049	4.756	329	4.781	4.777	4.777	428	4.593	504	4.501	397	
20	Ngadirejo	10.329	10.508	10.078	634	10.329	9.228	9.228	1.544	9.338	1381	9.274	1.349	
J u m l a h			10.300		144.641		965		10.300	130.996		131.516	130.041	13.528
% dari PUS yang ada			7,13		7,12				7,13			11,47		10,4

4. Persentase Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah 20 th

PUS (Pasangan Usai Subur) adalah pasangan antara laki laki dan perempuan yang didasarkan pada perkawinan yang sah. PUS dibawah 20 th adalah pasangan usia subur yang menikah dengan sah dengan istri berumur kurang dari 20 tahun (UU no 52 tahun 2009 pasal 1 ayat 8) Rumus dari PUS Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah 20 th adalah Jumlah Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah 20 th < dibagi jumlah PUS secara keseluruhan dikalikan 100%.

Tabel 2.26
PUS < 20 TH
Kabupaten Temanggung, tahun 2018 s.d 2023 Triwulan II

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah PUS < 20 TH	2.995	2.038	2.823	1332	1.332	1.432
2	Jumlah PUS	143.830	133.827	130.145	130.966	130.068	130,663
3	Prosentase	2.08	1,52	2,16	1,02	1,01	1,1

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA Kabupaten Temanggung /hasil PK 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa PUS dibawah 20 tahun pada 2018 sampai th 2019 mengalami penurunan, dan naik lagi pada tahun 2020 menjadi 2,16. Mulai tahun 2021 sampai pada tahun 2022 ada penurunan menjadi 1,01, hal ini sudah menunjukkan beberapa upaya yang telah dilakukan oleh DPPPAPPKB, dengan kegiatan sosialisasi jow kawin bocah di Beberapa desa dan sekolah, peningkatan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat tentang kesehatan reproduksi sehat (KRR) bagi remaja dalam kegiatan PIK Remaja dari jalur organisasi remaja dan jalur sekolah dengan kegiatan SSK (Sekolah Siaga Kependudukan). Pencapaian untuk tahun 2023 Triwulan I angka nya masih menggunakan capaian tahun 2022 Triwulan IV, karena update data di Lini lapangan belum selesai. adapun tabel PUS dibawah 20 tahun, pada tahun 2023 adalah seberikut :

Tabel 2.27
PUS DIBAWAH 20 TAHUN
Kabupaten Temanggung tahun 2023

NO	KECAMATAN	JUMLAH PUS	JUMLAH PUS UMUR 15 - 19 TH	%	Ket
1	2		4	5	
1	Temanggung	11.441	1244	0,01	

2	Tlogomulyo	4.093	730	0,05	
3	Kranggan	8.245	728	0,04	
4	Tembarak	5.081	811	0,08	
5	Selopampang	3.161	1741	0,15	
6	Pringsurat	9177	801	0,07	
7	Kaloran	7.219	83	0,09	
8	Parakan	7.749	48	0,1	
9	Bansari	4.194	94	0,21	
10	Kledung	4949	59	0,2	
11	Kedu	9.772	125	0,12	
12	Bulu	8.378	82	0,14	
13	Kandangan	9726	42	0,15	
14	Candiroto	5.520	74	0,26	
15	Bejen	3.604	33	0,41	
16	Jumo	4.963	39	0,32	
17	Gemawang	6138	58	0,28	
18	Tretep	4.175	27	0,38	
19	Wonobojo	4.593	80	0,4	
20	Ngadirejo	9.338	89	0,22	
	TOTAL	131516	3219	2,45	

5. Angka Kelahiran Remaja Usia 15 -19 Tahun (ASFR 15 – 19 Th)

ASFR (Age Specifik Fertility Rates) adalah banyaknya kelahiran selama setahun pada kelompok umur tertentu.

Sedangkan ASFR 15 – 19 Tahun. adalah banyaknya kelahiran selama setahun pada kelompok umur 15 – 19 tahun. Angka ini dapat digunakan untuk membedakan fertilitas dari wanita usia subur menurut kelompok umurnya,

Rumus dari pada ASFR 15- 19 th adalah :

$$\text{ASFR 15-19th} = (B \ 15 - 19 \ TH) / (Pf \ 15 - 19 \ th) \times 1000$$

B 15 – 19 TH : Jumlah kelahiran didalam kelompok umur 15 – 19 tahun
Selama 1 tahun

Pf 15 – 19 th : Jumlah perempuan kelompok umur 15- 19 tahun pada
Pertengahan tahun yang sama

Untuk perhitungan ASFR ini di kabupaten Temanggung, yang bersumber di dinas PPKBPPPA dihitung berdasar hasil Pendataan yang dilakukan 5 tahun sekali dan dari perkembangan laporan selama 1 tahun dari lini lapangan.

Tabel 2.28
Angka kelahiran remaja usia 15-19 th (ASFR 15-19th)
tahun 2018 s.d 2023 Triwulan II

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kelahiran	n.a	n.a	616	276	177	177
2	Jumlah wanita usia 15-19 th	n.a	n.a	28.899	28.166	26.553	26553
3	Persentase			21,32	9,8	6,67	6,67

Sumber data : DPPPAPPKB TAHUN 2021 / PK 2022

Dari tabel diatas dapat dianalisa bahwa ASFR 15-19 TH di kabupaten Temanggung perlu juga penanganan lebih lanjut. Hal ini bisa dilihat dari prosentase pernikahan dini yang masih tinggi. Dan DPPPAPPKB selalu berupaya menurunkannya dengan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) melalui jalur sekolah (SSK/sekolah siaga kependudukan dan KIE kepada remaja melalui kegiatan di kelompok pusat informasi konseling remaja (PIK-Remaja), Sosialisasi jo kawin bocah. Namun kalau dilihat dari pencapaian variabel PUS dibawah usia 20 th angka nya semakin menurun, hal ini menunjukkan hasil dari peningkatan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja.

Adapun, tabel kelahiran oleh wanita usia subur antara 15 – 19 tahun adalah :

Tabel 2.29
ASFR 15 – 19 TH
Kabupaten Temanggung tahun 2022
DATA KELAHIRAN OLEH WANITA USIA 15 – 19 TH
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2023

NO	KECAMATAN	JUMLAH WUS USIA 15-19 TAHUN	JUMLAH WUS USIA 15 – 19 TAHUN YANG MELAHIRKAN	%	Ket
1	2	3	4	5	
1	Temanggung	1244	0	0	
2	Tlogomulyo	730	3	4,11	
3	Kranggan	728	4	5,49	
4	Tembarak	811	12	14,8	
5	Selopampang	1741	15	8,62	
6	Pringsurat	1801	9	5	
7	Kaloran	1310	3	2,29	
8	Parakan	765	2	2,61	
9	Bansari	1094	5	4,57	

10	Kledung	581	13	22,38	
11	Kedu	1009	1	0,99	
12	Bulu	716	4	5,59	
13	Kandangan	750	0	0	
14	Candiroto	967	0	0	
15	Bejen	906	15	16,56	
16	Jumo	685	0	0	
17	Gemawang	1739	16	9,2	
18	Tretep	1964	16	8,15	
19	Wonobojo	1226	2	1,63	
20	Ngadirejo	756	17	22,49	
	TOTAL	960	1	1,04	

6. Presentase PUS yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis kontrasepsi modern.

PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis kontrasepsi moderen adalah PUS yang tahu tentang semua alat kontrasepsi dari proses pemasangan, jangka waktu penggunaan, efektifitas penggunaan dan efek samping dari alat kontrasepsi tersebut. Rumus persentase adalah : jumlah seluruh PUS yang tahu dan paham tentang alat kontrasepsi moderen dibandingkan seluruh jumlah PUS dikalikan 100 %.

Tabel 2.30
PUS Yang mengetahui dan memahami tentang alat kontrasepsi modern Kabupaten Temanggung, tahun 2018 s.d 2023 Triwulan II

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah PUS yang tahu dan memahami alokon modern	119.774	111.117	107.739	98.622	100.714	101.374
2	Jumlah PUS	143.830	133.827	130.415	130.966	131516	130.041
3	Persentase	83,27	83,03	82,61	75,29	76,58	77,96

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pengetahuan PUS tentang alokon modern cenderung menurun dari tahun 2018 s.d 2021, dan naik lagi mulai tahun 2022 sampai tahun 2023 triwulan I SEBESAR 77,58. setiap PUS mau menggunakan alat kontrasepsi karena tahu tentang jenis, jangka waktu dan efek samping alokon yang akan digunakan, adapun pencapaian perkecamatan adalah :

Tabel 2.31
PUS Yang mengetahui dan memahami tentang alat kontrasepsi modern
Kabupaten Temanggung, tahun 2018 s.d 2023 Triwulan I

NO	KECAMATAN	PUS	JUMLAH PA	PUS YANG MEMAHAMI KONTRASEPSI MODEREN
1	Temanggung	11256	8530	75,78
2	Tlogomulyo	4099	3316	80,9
3	Kranggan	8286	6445	77,78
4	Tembarak	5006	3912	78,15
5	Selopampang	3292	2592	78,74
6	Pringsurat	8992	6809	75,72
7	Kaloran	7574	6008	79,32
8	Parakan	7613	5484	72,03
9	Bansari	4135	3371	81,52
10	Kledung	4987	3879	77,78
11	K e d u	9717	7436	76,53
12	B u l u	8236	6511	79,06
13	Kandangan	8770	6902	78,7
14	Candiroto	5488	4285	78,08
15	B e j e n	3567	2839	79,59
16	J u m o	4908	4093	83,39
16	Gemawang	6163	5043	81,83
18	Tretep	4177	3483	83,39
19	Wonobojo	4501	3616	80,34
20	Ngadirejo	9274	6820	73,54
	JUMLAH	130.041	101.374	77,96

7. Perkawinan Usia Anak, (Jumlah pemuda perempuan berumur 20-24 tahun yang saat perkawinan pertamanya berumur di bawah 18 tahun

Yang dimaksud perkawinana usia anak menurut UU no 1 tahun 1974, adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang yang belum dewasa atau dibawah usia 18 tahun.

Untuk mendapatkan angka persentase perkawinan usia anak adalah jumlah perkawinan dari pihak perempuan (Usia Perkawinan Pertama/UKP) yang berumur dibawah 18 tahun dibagi jumlah pemuda perempuan usia 20 – 24 tahun dikalikan 100 %.

Adapun persentase perkawinan usia Anak ini di Kabupaten Temanggung berdasarkan data dari hasil pendataan tahun 2017 adalah :

Tabel 2.32
Perkawinan Usia Anak (Jumlah dan lokasi pemuda perempuan
berumur 20-24 tahun yang saat perkawinan pertamanya
berumur di bawah 18 th)
Kabupaten Temanggung, tahun 2018 s.d 2023 Triwulan I

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pemuda perempuan dengan usia perkawinan pertama /UKP dibawah 18 tahun	n.a	n.a	n.a	296	296	15.601
2	Jumlah pemuda perempuan usia 20 – 24 tahun	n.a	n.a	n.a	28.241	28.241	21.914
3	Persentase	n.a	n.a	n.a	1,05	1,05	71,19

Sumber DPPAPPKB/ PK21 dan apdating dayta tah 2023

Untuk data perkawinan usia anak yang usia kawin pertama dibawah 18 tahun dari DPPAPPKB untuk tahun 2022, menggunakan data PK21, dan perkembangan up dating PK tahun 2022 yang keluar diawal tahun 2023.

Adapun data perkecamatan adalah :

Tabel 2.33
Perkawinan Usia anak (Jumlah dan lokasi pemuda perempuan berumur
20 – 24 th yang pada saat usia perkawinan pertama dibawah 18

NO	KECAMATAN	JENIS DATA		KETERANGAN
		PEMUDA PEREMPUAN USIA 20 - 24	UKP DIBAWAH 18 TAHUN	
1	Temanggung	2359	2021	
2	Tlogomulyo	651	443	
3	Kranggan	1356	1007	
4	Tembarak	853	606	
5	Selopampang	583	413	
6	Pringsurat	1439	1003	
7	Kaloran	1248	879	
8	Parakan	1488	1191	
9	Bansari	641	427	
10	Kledung	665	400	

11	Kedu	1601	1150	
12	Bulu	1295	880	
13	Kandangan	1467	1016	
14	Candiroto	904	632	
15	Bejen	643	428	
16	Jumo	845	593	
17	Gemawang	916	597	
18	Tretep	647	358	
19	Wonobojo	748	473	
20	Ngadirejo	1565	1084	
	JUMLAH	21914	15601	71,19

8. Remaja Perempuan yang hamil, (jumlah dan lokasi penduduk kelompok perempuan pernah kawin umur 15-18 tahun)

Yang dimaksud remaja perempuan hamil adalah kehamilan yang terjadi pada perempuan dibawah usia 20 tahun. Sedangkan persentase remaja perempuan hamil adalah jumlah kehamilan perempuan dibawah usia 20 tahun dibandingkan jumlah kelompok perempuan pernah kawin umur 15 sampai 18 tahun dikalikan 100%.

Untuk data ini belum bisa kami sajikan dikarena dalam indikator pendataan belum ada. tentunya hal ini perlu penanganan lebih lanjut dengan melibatkab dinas lintas sektoral, Dinas Kesehatan, Kemenang/KUA dan Dppkbpppa serta Dindukcapil.

9. Persentase kepesertaan KB aktif/Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun.

Peserta KB Aktif adalah Pasangan Usia Subur yang secara berkelanjutan menggunakan alat kontrasepsi baik Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) atau Non MKJP.

Rumus Jumlah peserta KB Aktif dibagi jumlah PUS di kali 100

Tabel 2.34
Jumlah Peserta KB Aktif Kabupaten Temanggung
Tahun 2018 s.d 2023 Triwulan I

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Peserta KB Aktif	119.774	111.117	107.739	98.622	100.714	101.374
2	Jumlah PUS	143.830	133.827	130.415	130.966	131516	130.041
3	Persentase	83.27	83.03	82,61	75,29	76,58	77,96

Sumber: DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kecenderungan

kepesertaan KB aktif meurun selama tahun 2018 – 2021, terendah ditahun 2020 dengan kepesertaan KB 74,70 % dari PUS 130.415 dan tertinggi ditahun 2018 dengan total 83,23 % dari PUS 119774, angka ini merupakan capaian diatas target nasional yaitu sebesar 75%, sampai Triwulan IV tahun 2022, sebesar 79,15 %.

Berdasarkan hasil pemutakhiran data yang dilaksanakan pada awal tahun 2019 (April 2019) diperoleh data peserta KB aktif Kabupaten Temanggung 78.75 %. untuk tahun 2020, menurun dikarenakan data peserta KB aktif diperoleh dari perkembangan pelayanan KB. Di tahun 2021 berdasarkan update PK21 sampai bulan desember naik menjadi 75,29%. Selanjutnya pada tahun 2022, setelah dicangkannya aplikasi SIMANTAP KON KB yang pelaksanaan input data berdasarkan kondisi di lapangan oleh kader IMP, sampai bulan Desember mencapai 100.714 atau 76,58% dari PUS 131.516, naik dari capaian tahun 2021.

Dari hasil laporan Simantap kon KB sampai kondisi bulan Desember 2022 peserta KB di kabupaten Temanggung sejumlah 100.714 atau 76,58% dari jumlah PUS 131.516 .hal ini disebabkan beberapa faktor :

1. Adanya dampak dari pandemi covid 19 yang berakibat banyak peserta KB yang DO (tidak terdaftar sebagai peserta KB aktif) karena tidak terlayannya sebagai peserta KB terutama KB MKJP(MO, IUD, Implan).
2. Meningkatnya jumlah yang DO PUS (karena umur 49 ketas. sudah tidak masuk kategori PUS). Yang berakibat juga menurunnya jumlah peserta KB.

Tabel 2.35
 Persentase kepesertaan KB aktif / .Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun
 Kabupaten Temanggung Tahun 2018 s.d 2023 Triwulan II

No	Kecamatan	Tahun																	
		2018			2019			2020			2021			2022			2023		
		Jumlah			Jumlah			Jumlah			jumlah			Jumlah			Jumlah		
	PUS	PA	MKJP	PUS	PA	MKJP	PUS	PA	MKJP	PUS	PA	MKJP	PUS	PA	MKJP	PUS	PA	MKJP	
1	Temanggung	14.499	12.018	5.634	11.116	7.545	3.250	10.971	6.819	11.237	11.237	7.569	3.262	11.441	8049	11256	8438	8530	3894
2	Tlogomulyo	4.788	4.100	1.780	4.725	3.719	1.740	4.200	3.401	4.138	4.138	3.293	1.256	4.093	3446	4099	3274	3316	1341
3	Kranggan	8.628	7.169	4.516	8.072	6.468	4.102	8.089	6.273	8.200	8.200	6.301	3.771	8.245	6650	8286	6460	6445	3995
4	Tembarak	5.431	4.680	2.147	5.279	4.205	1.739	5.082	3.583	5.084	5.084	3.700	1.260	5.081	3.882	5006	3939	3912	1391
5	Selopampang	3.759	3.176	1.869	3.394	2.737	1.428	3.266	2.441	3.319	3.319	2.522	1.352	3.161	2.687	3292	2631	2592	1356
6	Pringsurat	9.263	7.754	3.632	9.122	7.193	3.362	8.773	6.811	8.914	8.914	6.867	3.254	9177	7262	8992	7068	6809	3356
7	Kaloran	7.760	6.528	3.774	7.720	6.173	3.645	7.597	5.693	7.607	7.607	5.699	3.185	7.219	5.988	7574	5817	6008	3299
8	Parakan	9.133	7.613	3.571	7.714	5.674	2.664	7.855	5.284	7.849	7.849	5.382	2.741	7.749	5.721	7613	5504	5484	2602
9	Bansari	4.700	3.937	1.736	4.511	3.589	1.632	4.402	3.504	4.193	4.193	3.350	1.368	4.194	3.498	4135	3322	3371	1381
10	Kledung	5.196	4.346	1.918	5.139	4.069	1.819	5.058	3.965	5.095	5.095	3.991	1.586	4949	4197	4987	3746	3879	1445
11	K e d u	10.733	8.953	3.941	8.903	6.543	2.985	9.353	7.294	9.415	9.415	7.095	3.032	9.772	7.498	9717	7465	7436	3137
12	B u l u	8.409	6.997	3.171	8.349	6.752	3.139	8.228	6.521	8.418	8.418	6.725	2.772	8.378	7048	8236	6590	6511	2762
13	Kandangan	9.237	7.821	4.361	9.011	7.108	3.847	8.828	6.640	8.792	8.792	6.591	3.632	9726	7036	8770	7751	6902	3596
14	Candiroto	5.692	4.831	2.088	5.408	4.319	1.855	5.230	3.942	5.295	5.295	3.999	1.676	5.520	4258	5488	4126	4285	1837
15	B e j e n	4.124	3.459	1.810	3.703	2.949	1.591	3.687	2.850	3.700	3.700	2.848	1.301	3.604	3024	3567	2856	2839	1320
16	J u m o	5.683	4.719	3.132	4.822	3.808	2.287	5012	3.809	4.973	4.973	3.847	1.966	4.963	4033	4908	4152	4093	2038
17	Gemawang	6.955	5.653	3.476	7.030	5.616	3.327	6.074	4.837	6.074	6.074	4.849	2.473	6.138	5067	6163	5131	5043	2492
18	Tretep	5.326	4.348	1.471	5.326	4.282	1.366	4.693	3.658	4.688	4.688	3.481	881	4175	3.652	4177	3081	3483	786
19	Wonoboyo	4.781	4.001	1.223	4.789	3.750	1.172	4.789	3.884	4.777	4.777	3.926	1.227	4.593	4110	4501	3534	3616	1133
20	Ngadirejo	10.329	8.563	3.445	9.821	7.785	3.118	9.228	6.218	9.228	9.228	6.587	2.594	9.338	7002	9274	6688	6820	2594
	J u m l a h	55.459	144.401	119.432	56.553	144.426	120.666	58.695	133.827	103.717	49.809	130.415	97.427	130.996	98.622	44.589	130041	101374	45755
	% dari PUS yang ada	46,35		82,71	47,35		83,55	48,64	133.827	77,5	48,02	130.415	74,71	11.237	11.237	45,21		77,59	45,13

10. Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang.

PUS dengan MKJP adalah jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi jangka panjang (Implant, IUD, MOP dan MOW).

Rumus Jumlah peserta KB Metode kontrasepsi jangka panjang dibagi jumlah PUS yang menggunakan alat kontrasepsi.

Keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang, kabupaten Temanggung tahun 2015 s.d 2022 Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.36
Jumlah PUS MKJP Kabupaten Temanggung
Tahun 2018-2023 Triwulan II

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Peserta KB MKJP	58.695	49.809	44.212	44.589	45.347	45.755
2	Jumlah (PUS) yang ber-KB	120.666	103.717	97.427	98.622	100.714	101.374
	Persentase	46,35	47,35	48,02	45,21	45,03	45,13

Sumber: DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah peserta KB MKJP meningkat dari tahun 2018–2020, semakin naik, namun di tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 45,21 %, disebabkan karena turunnya PUS yang menggunakan alat kontrasepsi, hal ini terjadi seiring dengan hasil kegiatan Pendataan tahun 2021/PK21 berikut perkembangannya sampai bulan Desember 2021, jumlah peserta kb MKJP Kabupaten Temanggung 44.589 /45.21% dari jumlah PESERTA kb AKTIF 98.622. Pencapaian peserta KB Kabupaten Temanggung masih lebih tinggi dibandingkan pencapaian tingkat propinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2022 sampai TW IV, capaian peserta KB berdasar hasil laporan SIMANTAP KON KB sampai tahun 2023 Triwulan I, tercapai 45.729 atau 45,10% Dari peserta KB sebanyak 101.386, hal ini mengalami penurunan dibandingkan akhir tahun 2021. Adapun Permasalahan turunnya MKJP adalah :

1. Masih tingginya Rumor kegagalan IUD di masyarakat.
2. Dukungan anggaran pencabutan Implan rendah berakibat peserta KB yang seharusnya dicabut dan ingin berKB lagi, menjadi PUS DO.
3. Masih rendahnya animo masyarakat dalam pelayanan KB MOW dan MOP.

4. Peserta KB mkjp MOW dan MOP sudah banyak yang DO.

5. Meningkatnya kemandirian menggunakan alat kontrasepsi Suntik

Pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang, kabupaten Temanggung per kecamatan tahun 2017 s.d 2023 Triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.37
Jumlah Pus yang menggunakan alokon MKJP

No	Kecamatan	Tahun																	
		2018			2019			2020			2021			2022			2023		
		Jumlah			Jumlah			Jumlah			jumlah			Jumlah			Jumlah		
		PUS	PA	MKJP	PUS	PA	MKJP	PUS	PA	MKJP	PUS	PA	MKJP	PUS	PA	MKJP	PUS	PA	MKJP
1	Temanggung	14.499	12.018	5.634	11.116	7.545	3.250	10.971	6.819	11.237	11.237	7.569	3.262	11.441	8049	3.697	8438	8530	3894
2	Tlogomulyo	4.788	4.100	1.780	4.725	3.719	1.740	4.200	3.401	4.138	4.138	3.293	1.256	4.093	3446	1344	3274	3316	1341
3	Kranggan	8.628	7.169	4.516	8.072	6.468	4.102	8.089	6.273	8.200	8.200	6.301	3.771	8.245	6650	3799	6460	6445	3995
4	Tembarak	5.431	4.680	2.147	5.279	4.205	1.739	5.082	3.583	5.084	5.084	3.700	1.260	5.081	3.882	1377	3939	3912	1391
5	Selopampang	3.759	3.176	1.869	3.394	2.737	1.428	3.266	2.441	3.319	3.319	2.522	1.352	3.161	2.687	1343	2631	2592	1356
6	Pringsurat	9.263	7.754	3.632	9.122	7.193	3.362	8.773	6.811	8.914	8.914	6.867	3.254	9177	7262	3370	7068	6809	3356
7	Kaloran	7.760	6.528	3.774	7.720	6.173	3.645	7.597	5.693	7.607	7.607	5.699	3.185	7.219	5.988	3044	5817	6008	3299
8	Parakan	9.133	7.613	3.571	7.714	5.674	2.664	7.855	5.284	7.849	7.849	5.382	2.741	7.749	5.721	2605	5504	5484	2602
9	Bansari	4.700	3.937	1.736	4.511	3.589	1.632	4.402	3.504	4.193	4.193	3.350	1.368	4.194	3.498	1380	3322	3371	1381
10	Kledung	5.196	4.346	1.918	5.139	4.069	1.819	5.058	3.965	5.095	5.095	3.991	1.586	4949	4197	1440	3746	3879	1445
11	K e d u	10.733	8.953	3.941	8.903	6.543	2.985	9.353	7.294	9.415	9.415	7.095	3.032	9.772	7.498	3148	7465	7436	3137
12	B u l u	8.409	6.997	3.171	8.349	6.752	3.139	8.228	6.521	8.418	8.418	6.725	2.772	8.378	7048	2080	6590	6511	2762
13	Kandangan	9.237	7.821	4.361	9.011	7.108	3.847	8.828	6.640	8.792	8.792	6.591	3.632	9726	7036	4013	7751	6902	3596
14	Candiroto	5.692	4.831	2.088	5.408	4.319	1.855	5.230	3.942	5.295	5.295	3.999	1.676	5.520	4258	1768	4126	4285	1837
15	B e j e n	4.124	3.459	1.810	3.703	2.949	1.591	3.687	2.850	3.700	3.700	2.848	1.301	3.604	3024	1304	2856	2839	1320
16	J u m o	5.683	4.719	3.132	4.822	3.808	2.287	5012	3.809	4.973	4.973	3.847	1.966	4.963	4033	2049	4152	4093	2038
17	Gemawang	6.955	5.653	3.476	7.030	5.616	3.327	6.074	4.837	6.074	6.074	4.849	2.473	6.138	5067	2459	5131	5043	2492
18	Tretep	5.326	4.348	1.471	5.326	4.282	1.366	4.693	3.658	4.688	4.688	3.481	881	4175	3.652	723	3081	3483	786
19	Wonoboyo	4.781	4.001	1.223	4.789	3.750	1.172	4.789	3.884	4.777	4.777	3.926	1.227	4.593	4110	1070	3534	3616	1133
20	Ngadirejo	10.329	8.563	3.445	9.821	7.785	3.118	9.228	6.218	9.228	9.228	6.587	2.594	9.338	7002	2606	6688	6820	2594
	J u m l a h	55.459	144.401	119.432	56.553	144.426	120.666	58.695	133.827	103.717	49.809	130.415	97.427	130.996	98.622	44.589	130,663	130.041	101.374
	% dari PUS yang ada	46,35		82,71	47,35		83,55	48,64	133.827	77,5	48,02	130.415	74,71	11.237	11.237	45,21			77,59

11. **Persentase kampung KB yang memenuhi Indeks Desa Membangun (IDM)**

Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW atau Dusun yang memiliki kriteria tertentu, dimana terdapat keterpaduan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan atau Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis.

Rumus persentase kampung KB yang memenuhi Indeks Desa Membangun (IDM) adalah jumlah seluruh kampung KB dibagi jumlah desa dengan kriteria IDM desa berkembang dikalikan 100%.

Indek Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indek Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ekologi (IKL) suatu Desa, IDM ini disusun untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan desa tertinggal dan peningkatan desa mandiri.

Tujuan penyusunan IDM adalah :

- a. Menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa; dan
- b. Menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan desa

Indek Desa Membangun adalah indeks komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan ekonomi, indeks ketahanan desa dan indeks ekologis, yang terjabar dalam demensi sosial, demensi ekonomi dan demensi ekologi, yang mana dari demensi – demensi tersebut terdiri dari beberapa undikator, sebagai acuan menentukan kriteria suatu desa, yang berhitungannya dari rata-rata dari IKS,IKE dan IKL).

Kriteria desa berdasarkan IKS, IKE dan IKL, terdiri dari :

- A. Desa Mandiri atau yang disebut Desa Sembada adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Desa Mandiri atau desa madya adalah desa yang memiliki indek desa membangun lebih besar ($>$) dari 0,8155.

- B. Desa Maju atau yang disebut desa prasembada adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolannya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Desa maju atau desa pramadya adalah desa yang memiliki indek desa membangun kurang dan sama ($<$ dan $=$) 0,8155 dan lebih besar ($>$) dari 0,7072.
- C. Desa berkembang atau yang disebut desa madya adalah desa potensial menjadi desa maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mampu mengelolannya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Desa berkembang atau desa Madya adalah desa yang memiliki indek desa membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,7072 dan lebih besar ($>$) dari 0,5989.
- D. Desa tertinggal atau desa pra madya adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Desa tertinggal atau desa pra madya adalah desa yang memiliki indek desa membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,59889, dan lebih besar ($>$) dari 0,4907.
- E. Desa sangat tertinggal atau yang disebut desa pratama adalah desa yang mengalami kerentangan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Desa sangat tertinggal atau desa pratama adalah desa yang memiliki indek desa membangun kurang dan lebih kecil (\leq) dari 0,4907.

Dilihat dari kriteria desa diatas, dikabupaten Temanggung tersebar di 266 desa. Indek desa membangun di kabupaten Temanggung berdasarkan kriteria IDM, berdasarkan data dari

Dipermades tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Kategori desa Mandiri di kabupaten Temanggung ada 10 desa, menjadi 26 desa
2. Kategori desa berkembang dikabupaten Temanggung dari 195 menjadi 129
3. Kategori desa Maju dikabupaten Temanggung ada 61, menjadi 111
4. Kategori desa tertinggal di kabupaten Temanggung tidak ada, dan
5. Kategori desa sangat tertinggal sudah tidak ada

Yang terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.38
REKAPITULASI INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) TAHUN 2022

KODE PROV	NAMA PROVINSI	KODE KAB	NAMA KABUPATEN	KODE KEC	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2022	IKE 2022	IKL 2022	NILAI IDM 2022	STATUS IDM 2022
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012001	BULU	0,92	0,833	0,867	0,8733	MANDIRI
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012002	TEGALURUNG	0,886	0,7	0,867	0,8175	MANDIRI
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012003	CAMPURSARI	0,954	0,767	0,867	0,8625	MANDIRI
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012004	GANDUREJO	0,789	0,65	0,6	0,6795	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012005	TEGALREJO	0,851	0,617	0,8	0,756	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012006	GONDOSULI	0,869	0,7	0,867	0,8117	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012007	NGIMBRANG	0,869	0,833	0,667	0,7895	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012008	PUTAT	0,766	0,617	0,8	0,7275	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012009	DANUPAYAN	0,897	0,733	0,6	0,7435	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012010	MONDORETNO	0,891	0,683	0,667	0,7471	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012011	PANDEMULYO	0,931	0,683	0,667	0,7605	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012012	PASURUAN	0,806	0,6	0,6	0,6686	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012013	PAKUREJO	0,834	0,7	0,6	0,7114	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012014	MALANGSARI	0,817	0,75	0,667	0,7446	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012015	PAGERGUNUNG	0,766	0,7	0,733	0,733	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012016	WONOSARI	0,726	0,517	0,933	0,7252	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012017	BANSARI	0,806	0,617	0,6	0,6741	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012018	WONOTIRTO	0,76	0,55	0,733	0,6811	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012019	PENGILON	0,823	0,8	0,733	0,7854	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332302	TEMBARAK	3323022001	TEMBARAK	0,76	0,6	0,667	0,6756	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332302	TEMBARAK	3323022002	MENGGORO	0,834	0,833	1	0,8892	MANDIRI
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332302	TEMBARAK	3323022003	PURWODADI	0,771	0,567	0,6	0,646	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332302	TEMBARAK	3323022004	WONOKERSO	0,823	0,6	0,867	0,7632	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332302	TEMBARAK	3323022005	KEMLOKO	0,8	0,65	0,533	0,6611	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332302	TEMBARAK	3323022006	GANDU	0,76	0,517	0,667	0,6478	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332302	TEMBARAK	3323022007	BOTOPUTIH	0,794	0,65	0,6	0,6814	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332302	TEMBARAK	3323022008	TAWANGSARI	0,806	0,65	0,667	0,7075	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332302	TEMBARAK	3323022009	GREGES	0,846	0,467	0,733	0,6819	BERKEMBANG

33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332302	TEMBARAK	3323022010	KRAJAN	0,771	0,517	0,8	0,696	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332302	TEMBARAK	3323022011	JRAGAN	0,731	0,567	0,8	0,6994	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332302	TEMBARAK	3323022012	DRONO	0,68	0,55	1	0,7433	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332302	TEMBARAK	3323022013	BANARAN	0,806	0,583	0,6	0,663	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332303	TEMANGGUNG	3323032011	JOHO	0,789	0,567	0,867	0,7406	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332303	TEMANGGUNG	3323032017	GUNTUR	0,8	0,583	0,933	0,7722	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332303	TEMANGGUNG	3323032019	LUNGGE	0,829	0,533	0,667	0,6762	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332303	TEMANGGUNG	3323032020	MUDAL	0,84	0,8	0,667	0,7689	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332303	TEMANGGUNG	3323032021	GILINGSARI	0,789	0,517	0,867	0,724	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332303	TEMANGGUNG	3323032024	NAMPIREJO	0,783	0,533	0,933	0,7498	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332304	PRINGSURAT	3323042001	PRINGSURAT	0,771	0,6	0,867	0,746	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332304	PRINGSURAT	3323042002	KEBUMEN	0,851	0,9	0,8	0,8505	MANDIRI
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332304	PRINGSURAT	3323042003	SOROPADAN	0,766	0,617	0,733	0,7052	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332304	PRINGSURAT	3323042004	KUPEN	0,737	0,667	0,6	0,6679	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332304	PRINGSURAT	3323042005	KARANGWUNI	0,76	0,617	0,733	0,7033	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332304	PRINGSURAT	3323042006	GOWAK	0,823	0,567	0,8	0,7298	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332304	PRINGSURAT	3323042007	REJOSARI	0,84	0,65	1	0,83	MANDIRI
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332304	PRINGSURAT	3323042008	NGIPIK	0,823	0,617	0,667	0,7021	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332304	PRINGSURAT	3323042009	PINGIT	0,869	0,883	0,8	0,8506	MANDIRI
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332304	PRINGSURAT	3323042010	KLEPU	0,674	0,567	0,933	0,7248	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332304	PRINGSURAT	3323042011	SOBOREJO	0,783	0,533	0,867	0,7276	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332304	PRINGSURAT	3323042012	NGLOROG	0,794	0,583	0,8	0,7259	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332304	PRINGSURAT	3323042013	PAGERGUNUNG	0,783	0,633	0,6	0,6721	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332304	PRINGSURAT	3323042014	WONOKERSO	0,783	0,583	0,667	0,6776	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332305	KALORAN	3323052001	KALORAN	0,789	0,967	0,733	0,8295	MANDIRI
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332305	KALORAN	3323052002	TLOGOWUNGU	0,846	0,733	0,8	0,793	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332305	KALORAN	3323052003	GANDON	0,783	0,683	0,667	0,711	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332305	KALORAN	3323052004	TLETER	0,749	0,6	0,867	0,7384	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332305	KALORAN	3323052005	GETAS	0,754	0,617	0,867	0,7459	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332305	KALORAN	3323052006	KALIMANGGIS	0,72	0,617	0,8	0,7122	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332305	KALORAN	3323052007	TEMPURAN	0,84	0,567	0,6	0,6689	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332305	KALORAN	3323052008	KEMIRI	0,817	0,617	0,667	0,7002	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332305	KALORAN	3323052009	GEBLOG	0,817	0,65	0,667	0,7113	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332305	KALORAN	3323052010	TEGOWANUH	0,726	0,8	0,667	0,7308	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332305	KALORAN	3323052011	KEBLUKAN	0,68	0,683	0,667	0,6767	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332305	KALORAN	3323052012	TEPUSEN	0,714	0,667	0,667	0,6825	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332305	KALORAN	3323052013	GANDULAN	0,737	0,617	0,867	0,7402	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332305	KALORAN	3323052014	KWARAKAN	0,771	0,6	0,6	0,6571	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332306	KANDANGAN	3323062001	KANDANGAN	0,794	0,917	0,867	0,8592	MANDIRI
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332306	KANDANGAN	3323062002	BALEDU	0,817	0,533	0,8	0,7168	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332306	KANDANGAN	3323062003	CARUBAN	0,731	0,517	0,667	0,6383	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332306	KANDANGAN	3323062004	WADAS	0,703	0,533	0,667	0,6343	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332306	KANDANGAN	3323062005	SAMIRANAN	0,811	0,6	0,8	0,7371	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332306	KANDANGAN	3323062006	NGEMPLAK	0,851	0,75	0,8	0,8005	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332306	KANDANGAN	3323062007	KEMBANGSARI	0,823	0,567	0,6	0,6632	BERKEMBANG

33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332306	KANDANGAN	3323062008	GESING	0,783	0,6	0,6	0,661	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332306	KANDANGAN	3323062009	MARGOLELO	0,663	0,567	0,933	0,721	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332306	KANDANGAN	3323062010	BLIMBING	0,686	0,65	0,6	0,6452	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332306	KANDANGAN	3323062011	KEDUNGUMPUL	0,874	0,75	0,933	0,8525	MANDIRI
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332306	KANDANGAN	3323062012	ROWO	0,703	0,683	0,867	0,751	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332306	KANDANGAN	3323062013	MALEBO	0,731	0,717	0,6	0,6827	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332306	KANDANGAN	3323062014	TLOGOPUCANG	0,789	0,583	0,933	0,7684	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332306	KANDANGAN	3323062015	KEDAWUNG	0,726	0,583	0,8	0,703	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332306	KANDANGAN	3323062016	BANJARSARI	0,737	0,567	1	0,7679	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332307	KEDU	3323072001	KEDU	0,874	0,917	0,6	0,797	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332307	KEDU	3323072002	CANDIMULYO	0,829	0,7	0,733	0,754	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332307	KEDU	3323072003	SALAMSARI	0,743	0,517	0,667	0,6421	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332307	KEDU	3323072004	DANUREJO	0,863	0,617	0,667	0,7154	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332307	KEDU	3323072005	MOJOTENGAH	0,88	0,75	0,6	0,7433	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332307	KEDU	3323072006	KARANGTEJO	0,777	0,567	0,667	0,6702	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332307	KEDU	3323072007	MERGOWATI	0,714	0,633	0,733	0,6937	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332307	KEDU	3323072008	KUTOANYAR	0,783	0,717	0,6	0,6998	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332307	KEDU	3323072009	KUNDISARI	0,731	0,667	0,8	0,7327	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332307	KEDU	3323072010	NGADIMULYO	0,829	0,583	0,6	0,6706	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332307	KEDU	3323072011	GONDANG WAYANG	0,789	0,55	0,667	0,6684	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332307	KEDU	3323072012	BOJONEGORO	0,766	0,65	0,667	0,6941	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332307	KEDU	3323072013	BANDUNGGEDE	0,817	0,583	0,6	0,6668	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332307	KEDU	3323072014	TEGALSARI	0,76	0,583	0,6	0,6478	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332308	PARAKAN	3323082002	CAMPURSALAM	0,8	0,583	0,667	0,6833	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332308	PARAKAN	3323082003	WANUTENGAH	0,857	0,867	0,667	0,7968	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332308	PARAKAN	3323082004	NGLONDONG	0,731	0,7	0,667	0,6994	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332308	PARAKAN	3323082005	BAGUSAN	0,731	0,45	0,933	0,7049	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332308	PARAKAN	3323082007	DANGKEL	0,857	0,667	0,6	0,7079	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332308	PARAKAN	3323082008	MANDISARI	0,903	0,65	0,6	0,7176	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332308	PARAKAN	3323082009	TEGALROSO	0,891	0,7	0,933	0,8416	MANDIRI
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332308	PARAKAN	3323082010	TRAJI	0,846	0,717	1	0,8541	MANDIRI
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332308	PARAKAN	3323082011	WATUKUMPUL	0,726	0,617	0,667	0,6697	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332308	PARAKAN	3323082012	RINGINANOM	0,783	0,55	0,733	0,6887	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332308	PARAKAN	3323082013	DEPOKHARJO	0,806	0,7	0,867	0,7908	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332308	PARAKAN	3323082014	CATURANOM	0,743	0,733	0,6	0,6921	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332308	PARAKAN	3323082015	GLAPANSARI	0,766	0,6	0,6	0,6552	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332308	PARAKAN	3323082016	SUNGGINGSARI	0,72	0,6	0,8	0,7067	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332309	NGADIREJO	3323092001	NGADIREJO	0,897	0,917	0,667	0,8268	MANDIRI
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332309	NGADIREJO	3323092002	GONDANG WINANGUN	0,823	0,817	0,667	0,7687	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332309	NGADIREJO	3323092003	GANDU WETAN	0,823	0,65	0,733	0,7354	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332309	NGADIREJO	3323092004	NGAREN	0,771	0,867	0,533	0,7238	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332309	NGADIREJO	3323092005	MANGUNSARI	0,88	0,633	0,6	0,7044	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332309	NGADIREJO	3323092006	DLIMOYO	0,817	0,667	0,6	0,6946	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332309	NGADIREJO	3323092007	PURBOSARI	0,897	0,733	0,867	0,8324	MANDIRI
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332309	NGADIREJO	3323092008	CAMPURSARI	0,731	0,517	0,667	0,6383	BERKEMBANG

33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332309	NGADIREJO	3323092009	TEGALREJO	0,771	0,7	0,6	0,6905	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332309	NGADIREJO	3323092010	GIRIPURNO	0,806	0,65	0,733	0,7297	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332309	NGADIREJO	3323092011	KATEKAN	0,777	0,6	0,8	0,7257	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332309	NGADIREJO	3323092012	BANJARSARI	0,817	0,617	0,867	0,7668	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332309	NGADIREJO	3323092013	MEDARI	0,731	0,567	0,667	0,6549	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332309	NGADIREJO	3323092014	KARANGGEDONG	0,823	0,75	0,733	0,7687	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332309	NGADIREJO	3323092015	MUNGGANGSARI	0,806	0,517	0,867	0,7297	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332309	NGADIREJO	3323092016	KATAAN	0,72	0,633	0,867	0,74	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332309	NGADIREJO	3323092017	PETIREJO	0,72	0,733	0,667	0,7067	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332309	NGADIREJO	3323092018	PRINGAPUS	0,8	0,45	0,733	0,6611	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332309	NGADIREJO	3323092020	GEJAGAN	0,806	0,533	0,933	0,7575	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332310	JUMO	3323102001	JUMO	0,823	0,817	0,933	0,8576	MANDIRI
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332310	JUMO	3323102002	JAMUSAN	0,806	0,65	0,6	0,6852	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332310	JUMO	3323102003	KERTOSARI	0,834	0,583	0,867	0,7614	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332310	JUMO	3323102004	GIYONO	0,851	0,7	0,667	0,7394	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332310	JUMO	3323102005	GUNUNGEMPOL	0,823	0,667	0,667	0,7187	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332310	JUMO	3323102006	PADURESO	0,72	0,667	0,667	0,6844	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332310	JUMO	3323102007	BARANG	0,806	0,633	0,867	0,7686	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332310	JUMO	3323102008	JOMBOR	0,766	0,533	0,6	0,633	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332310	JUMO	3323102009	KETITANG	0,76	0,6	0,867	0,7422	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332310	JUMO	3323102010	MOROBONGO	0,8	0,533	0,667	0,6667	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332310	JUMO	3323102011	KARANGTEJO	0,829	0,467	0,667	0,654	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332310	JUMO	3323102012	SUKOMARTO	0,777	0,483	0,667	0,6424	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332310	JUMO	3323102013	GEDONGSARI	0,743	0,65	0,667	0,6865	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332311	TRETEP	3323112001	TRETEP	0,777	0,633	0,933	0,7813	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332311	TRETEP	3323112002	DONOROJO	0,72	0,533	0,867	0,7067	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332311	TRETEP	3323112003	NGLARANGAN	0,754	0,517	0,6	0,6237	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332311	TRETEP	3323112004	SIGEDONG	0,606	0,483	0,933	0,6741	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332311	TRETEP	3323112005	BONJOR	0,754	0,467	0,867	0,6959	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332311	TRETEP	3323112006	TEMPELSARI	0,583	0,517	0,933	0,6776	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332311	TRETEP	3323112007	CAMPUREJO	0,726	0,517	0,867	0,703	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332311	TRETEP	3323112008	BOJONG	0,674	0,55	0,6	0,6081	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332311	TRETEP	3323112009	BENDUNGAN	0,754	0,517	0,6	0,6237	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332311	TRETEP	3323112010	SIMPAR	0,714	0,45	0,933	0,6992	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332311	TRETEP	3323112011	TLOGO	0,777	0,483	0,667	0,6424	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332312	CANDIROTO	3323122001	CANDIROTO	0,937	1	0,6	0,8457	MANDIRI
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332312	CANDIROTO	3323122002	LEMPUYANG	0,863	0,75	0,867	0,8265	MANDIRI
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332312	CANDIROTO	3323122003	CANGGAL	0,703	0,7	0,6	0,6676	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332312	CANDIROTO	3323122004	KENTENGSAARI	0,771	0,517	0,933	0,7405	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332312	CANDIROTO	3323122005	NGABEYAN	0,829	0,733	0,867	0,8095	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332312	CANDIROTO	3323122006	BANTIR	0,789	0,783	0,867	0,8129	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332312	CANDIROTO	3323122007	KRAWITAN	0,823	0,683	0,8	0,7687	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332312	CANDIROTO	3323122008	MUNTUNG	0,863	0,683	0,867	0,8043	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332312	CANDIROTO	3323122009	BATURSARI	0,834	0,667	0,867	0,7892	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332312	CANDIROTO	3323122010	MENTO	0,783	0,6	0,933	0,7721	MAJU

33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332312	CANDIROTO	3323122011	MUNENG	0,823	0,517	0,933	0,7576	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332312	CANDIROTO	3323122012	PLOSOGADEN	0,846	0,667	0,733	0,7486	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332312	CANDIROTO	3323122013	SIDOHARJO	0,817	0,55	0,667	0,6779	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332312	CANDIROTO	3323122014	GUNUNGPAYUNG	0,749	0,567	0,867	0,7273	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332313	KRANGGAN	3323132002	BADRAN	0,68	0,867	0,6	0,7156	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332313	KRANGGAN	3323132003	BENGKAL	0,851	0,733	0,667	0,7505	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332313	KRANGGAN	3323132004	PARE	0,777	0,7	0,933	0,8035	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332313	KRANGGAN	3323132005	NGUWET	0,84	0,683	0,6	0,7078	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332313	KRANGGAN	3323132006	NGROPOH	0,794	0,533	0,933	0,7537	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332313	KRANGGAN	3323132007	PENDOWO	0,777	0,483	0,733	0,6646	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332313	KRANGGAN	3323132008	SANGGRAHAN	0,789	0,667	0,667	0,7073	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332313	KRANGGAN	3323132009	KLEPU	0,851	0,65	0,533	0,6783	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332313	KRANGGAN	3323132010	KEMLOKO	0,869	0,667	0,533	0,6895	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332313	KRANGGAN	3323132011	GENTAN	0,829	0,683	0,467	0,6595	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332313	KRANGGAN	3323132012	KRAMAT	0,806	0,55	0,533	0,6297	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332313	KRANGGAN	3323132013	PURWOSARI	0,84	0,667	0,6	0,7022	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332314	TLOGOMULYO	3323142001	TLOGOMULYO	0,874	0,733	0,6	0,7359	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332314	TLOGOMULYO	3323142002	CANDISARI	0,743	0,5	0,667	0,6365	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332314	TLOGOMULYO	3323142003	SRIWUNGU	0,737	0,567	0,667	0,6568	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332314	TLOGOMULYO	3323142004	LANGGENG	0,697	0,45	0,667	0,6046	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332314	TLOGOMULYO	3323142005	TANJUNGSARI	0,76	0,717	0,667	0,7144	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332314	TLOGOMULYO	3323142006	LOSARI	0,731	0,517	0,8	0,6827	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332314	TLOGOMULYO	3323142007	BALEREJO	0,703	0,633	0,667	0,6676	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332314	TLOGOMULYO	3323142008	KEROKAN	0,731	0,65	0,667	0,6827	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332314	TLOGOMULYO	3323142009	LEGOKSARI	0,691	0,6	0,867	0,7194	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332314	TLOGOMULYO	3323142010	TLILIR	0,783	0,633	0,6	0,6721	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332314	TLOGOMULYO	3323142011	GEDEGAN	0,68	0,583	0,8	0,6878	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332314	TLOGOMULYO	3323142012	PAGERSARI	0,731	0,6	0,6	0,6438	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332315	SELOPAMPANG	3323152001	SELOPAMPANG	0,851	0,883	0,867	0,8671	MANDIRI
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332315	SELOPAMPANG	3323152002	TANGGULANOM	0,754	0,567	0,8	0,707	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332315	SELOPAMPANG	3323152003	JETIS	0,76	0,45	0,933	0,7144	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332315	SELOPAMPANG	3323152004	SALAMREJO	0,811	0,517	0,867	0,7316	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332315	SELOPAMPANG	3323152005	NGADITIRTO	0,806	0,617	0,667	0,6963	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332315	SELOPAMPANG	3323152006	BULAN	0,8	0,667	0,8	0,7556	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332315	SELOPAMPANG	3323152007	KACEPIT	0,811	0,667	0,667	0,7149	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332315	SELOPAMPANG	3323152008	GAMBASAN	0,794	0,667	0,667	0,7092	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332315	SELOPAMPANG	3323152009	BUMIAYU	0,811	0,617	0,667	0,6983	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332315	SELOPAMPANG	3323152010	KEBONAGUNG	0,731	0,65	0,667	0,6827	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332315	SELOPAMPANG	3323152011	BAGUSAN	0,794	0,567	0,667	0,6759	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332315	SELOPAMPANG	3323152012	PLUMBON	0,823	0,6	0,933	0,7854	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332316	BANSARI	3323162001	BANSARI	0,874	0,733	0,867	0,8248	MANDIRI
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332316	BANSARI	3323162002	MOJOSARI	0,84	0,95	0,8	0,8633	MANDIRI
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332316	BANSARI	3323162003	REJOSARI	0,8	0,817	0,933	0,85	MANDIRI
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332316	BANSARI	3323162004	GUNUNGSARI	0,874	0,617	1	0,8303	MANDIRI
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332316	BANSARI	3323162005	BALESARI	0,794	0,583	0,933	0,7703	MAJU

33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332316	BANSARI	3323162006	PURBOREJO	0,76	0,617	0,8	0,7256	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332316	BANSARI	3323162007	TLOGOWERO	0,789	0,533	1	0,774	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332316	BANSARI	3323162008	MRANGGEN KIDUL	0,72	0,633	1	0,7844	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332316	BANSARI	3323162009	MRANGGEN TENGAH	0,731	0,6	0,867	0,7327	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332316	BANSARI	3323162010	CANDISARI	0,874	0,617	0,933	0,8081	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332316	BANSARI	3323162011	CAMPURANOM	0,817	0,75	0,8	0,789	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332316	BANSARI	3323162012	GENTINGSARI	0,886	0,833	0,867	0,8619	MANDIRI
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332316	BANSARI	3323162013	TANUREJO	0,817	0,7	0,933	0,8168	MANDIRI
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332317	KLEDUNG	3323172001	KLEDUNG	0,714	0,75	0,933	0,7992	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332317	KLEDUNG	3323172002	KALIREJO	0,76	0,717	0,6	0,6922	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332317	KLEDUNG	3323172003	PAPONAN	0,771	0,8	0,533	0,7016	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332317	KLEDUNG	3323172004	JEKETRO	0,697	0,6	0,667	0,6546	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332317	KLEDUNG	3323172005	KWADUNGAN GUNUNG	0,783	0,683	0,667	0,711	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332317	KLEDUNG	3323172006	KWADUNGAN JURANG	0,777	0,733	0,6	0,7035	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332317	KLEDUNG	3323172007	TLAHAB	0,817	0,517	0,8	0,7113	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332317	KLEDUNG	3323172008	PETARANGAN	0,743	0,633	0,867	0,7476	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332317	KLEDUNG	3323172009	CANGGAL	0,771	0,717	1	0,8294	MANDIRI
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332317	KLEDUNG	3323172010	JAMBU	0,714	0,633	0,933	0,7603	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332317	KLEDUNG	3323172011	KRUWISAN	0,754	0,583	0,667	0,6681	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332317	KLEDUNG	3323172012	BATURSARI	0,771	0,467	0,933	0,7238	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332317	KLEDUNG	3323172013	TUKSARI	0,726	0,7	0,667	0,6975	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332318	BEJEN	3323182001	BEJEN	0,874	0,817	0,867	0,8525	MANDIRI
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332318	BEJEN	3323182002	BANJARSARI	0,771	0,55	0,667	0,6627	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332318	BEJEN	3323182003	JLEGONG	0,874	0,617	0,933	0,8081	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332318	BEJEN	3323182004	PRANGKOKAN	0,68	0,733	0,667	0,6933	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332318	BEJEN	3323182005	LOWUNGU	0,794	0,483	0,6	0,6259	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332318	BEJEN	3323182006	LARANGAN LUWOK	0,76	0,633	0,667	0,6867	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332318	BEJEN	3323182007	CONGKRANG	0,851	0,733	0,533	0,706	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332318	BEJEN	3323182008	KEBONDALEM	0,771	0,55	1	0,7738	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332318	BEJEN	3323182009	KEMUNING	0,8	0,6	0,667	0,6889	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332318	BEJEN	3323182010	SELOSABRANG	0,823	0,717	0,867	0,8021	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332318	BEJEN	3323182011	TANJUNGSARI	0,731	0,617	0,667	0,6716	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332318	BEJEN	3323182012	PETUNG	0,749	0,65	0,8	0,7329	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332318	BEJEN	3323182013	DUREN	0,789	0,65	0,667	0,7017	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332318	BEJEN	3323182014	NGALIYAN	0,749	0,75	0,4	0,6329	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332319	WONOBOYO	3323192001	WONOBOYO	0,789	0,633	0,667	0,6962	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332319	WONOBOYO	3323192002	PATEKEN	0,697	0,517	0,667	0,6268	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332319	WONOBOYO	3323192003	PITROSARI	0,76	0,567	0,6	0,6422	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332319	WONOBOYO	3323192004	PURWOSARI	0,726	0,533	0,667	0,6419	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332319	WONOBOYO	3323192005	KEBONSARI	0,817	0,767	0,667	0,7502	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332319	WONOBOYO	3323192006	SEMEN	0,823	0,583	0,667	0,691	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332319	WONOBOYO	3323192007	TENING	0,806	0,633	0,6	0,6797	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332319	WONOBOYO	3323192008	WONOCOYO	0,829	0,583	0,667	0,6929	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332319	WONOBOYO	3323192009	PESANTREN	0,714	0,583	0,667	0,6548	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332319	WONOBOYO	3323192010	REJOSARI	0,72	0,55	0,667	0,6456	BERKEMBANG

33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332319	WONOBOYO	3323192011	TAWANGSARI	0,737	0,667	0,667	0,6902	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332319	WONOBOYO	3323192012	CEMORO	0,823	0,667	0,6	0,6965	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332319	WONOBOYO	3323192013	WATES	0,789	0,55	0,8	0,7129	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332320	GEMAWANG	3323202001	GEMAWANG	0,794	0,667	0,667	0,7092	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332320	GEMAWANG	3323202002	MUNCAR	0,789	0,6	0,533	0,6406	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332320	GEMAWANG	3323202003	KEMIRIOMBO	0,651	0,483	0,667	0,6005	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332320	GEMAWANG	3323202004	NGADISEPI	0,691	0,567	0,8	0,686	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332320	GEMAWANG	3323202005	KREMPONG	0,663	0,517	0,8	0,6598	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332320	GEMAWANG	3323202006	SUCEN	0,869	0,467	0,867	0,734	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332320	GEMAWANG	3323202007	KARANGSENG	0,691	0,45	0,667	0,6027	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332320	GEMAWANG	3323202008	BANARAN	0,777	0,5	0,8	0,6924	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332320	GEMAWANG	3323202009	KALIBANGER	0,8	0,567	0,667	0,6778	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332320	GEMAWANG	3323202010	JAMBON	0,743	0,733	0,6	0,6921	BERKEMBANG

Jumlah kampung KB yang telah dicanangkan sejak tahun 2016 sampai tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.39
Data kampung KB
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	LOKASI			PENCANANGAN	STATUS IDM
	KECAMATAN	DUSUN	RW- DESA/KEL	TANGGAL	
1	2	3	4	5	5
1	Bansari	Dusun Mranggen RW 01	Desa Mranggen Kidul	21/03/2016	Maju
2	Bansari	Dusun Tegalrukem	Desa Campuranom	31/07/2017	Maju
3	Bansari	Dusun Sempon	Desa Rejosari	15/11/2018	Mandiri
4	Bejen	Dusun Kemuning	Desa Kemuning	17/02/2016	Berkembang
5	Bejen	Dusun Selosabrang	Desa Selosabrang	25/07/2017	Maju
6	Bejen	Dusun Kecer	Desa Lowungu	26/09/2018	Berkembang
7	Bejen	Dusun Krajan,	Desa Ngaliyan	02/10/2019	Berkembang
8	Bulu	Dusun Wonotirto	Desa Wonotirto	23/02/2016	Berkembang
9	Bulu	Dusun Dukuh	Desa Wonosari	27/04/2017	Maju
10	Bulu	Dusun Krasak	Desa Tegalrejo	29/08/2018	Maju
11	Candiroto	Dusun Ngabeyan	Desa Ngabeyan	29/03/2016	Maju
12	Candiroto	Dusun Muntung	Desa Muntung	03/05/2017	Maju
13	Candiroto	Dusun Sritanjung	Desa Sidoharjo	08/05/2018	Berkembang
14	Candiroto	Dusun Krecek	Desa Batur Sari Kec. Candiroto	22/08/2019	Maju
15	Gemawang	Dusun Dermonganti	Desa Gemawang	11/01/2016	Maju
16	Gemawang	Dusun Kemiriombo	Desa Kemiriombo	15/05/2017	Berkembang
17	Gemawang	Dusun Kalibanger	Desa Kalibanger	11/08/2018	Berkembang
18	Jumo	Dusun Kali Salam	Desa Ketitang	27/02/2016	Maju
19	Jumo	Dusun Lempong	Desa Karangtejo	09/08/2017	Berkembang
20	Jumo	Dusun Sukosarono	Desa Jombor	20/08/2018	Berkembang
21	Kaloran	Dusun Mlondang RW 06	Desa Gandon	24/02/2016	Maju
22	Kaloran	Dusun Jangkungan	Desa Kemiri	27/04/2017	Berkembang
23	Kaloran	Dusun Jetis	Desa Geblog	13/09/2018	Maju
24	Kandangan	Dusun Sodong RW 08	Desa Gesing	01/03/2016	Berkembang
25	Kandangan	Dusun Baledu	Desa Baledu	01/08/2017	Maju
26	Kandangan	Dusun Gedongan	Desa Ngemplak	30/10/2018	Maju
27	Kedu	Dusun Wolodono	Desa Karangtejo	29/02/2016	Berkembang
28	Kedu	Dusun kundisari RW 2	Desa Kundisari	03/08/2017	Maju
29	Kedu	Dusun Bringin	Desa Tegalsari Kec. Kedu	19/11/2018	Berkembang
30	Kedu	Dusun Bandunggede	Desa Bandunggede	08/04/2019	Berkembang
31	Kledung	Dusun Mayongan	Desa Jeketro	30/03/2016	Berkembang
32	Kledung	Dusun sanggrahan	Desa Kalirejo	30/08/2017	Berkembang
33	Kledung	Rw. 1	Desa Kruwisan	16/11/2018	Berkembang
34	Kranggan	Dusun Ngabean Paingan	Desa Kemloko	23/01/2016	Berkembang
35	Kranggan	Dusun Kramat	Desa Kramat	10/05/2017	Berkembang
36	Kranggan	Dusun Getasan (dana mandiri)	Desa Ngropoh	14/11/2018	Maju
37	Kranggan	Dusun Klepu	Desa Klepu	21/11/2018	Berkembang

38	Kranggan	Dusun Purwosari II	Desa Purwosari	04/04/2019	Berkembang
39	Ngadirejo	Dusun Karangrejo	Desa Gondang Winangun	28/01/2016	Maju
40	Ngadirejo	Dusun Butuh	Desa Banjarsari	26/05/2017	Maju
41	Ngadirejo	Desa Mungangsari	Desa Mungangsari	09/11/2018	Berkembang
42	Parakan	Dusun Gamblok	Desa Traji	27/02/2016	Mandiri
43	Parakan	Dusun Gamblok	Desa Glapansari	13/07/2017	Berkembang
44	Parakan	Dusun Pringlimit	Desa Bagusari	31/07/2018	Berkembang
45	Pringsurat	Dusun Pondoh	Desa Rejosari	24/02/2016	Mandiri
46	Pringsurat	Dusun Krajan	Desa Soborejo	26/04/2017	Maju
47	Pringsurat	Dusun Krajan	Desa Pagergunung	10/10/2018	Berkembang
48	Selopampang	Dusun Ganjuran RW 03	Desa Bulan	17/02/2016	Maju
49	Selopampang	Dusun Jetis 2	Desa Jetis	21/08/2017	Maju
50	Selopampang	Dusun Salam Wetan	Desa Salam Rejo	28/11/2018	Maju
51	Temanggung	Lingk Jampiroso	Kelurahan Jampiroso	23/05/2017	-
52	Temanggung	Dusun Gender RW 02	Kelurahan Walitelon Utara	28/01/2016	-
53	Tembarak	Dusun Genayan RW 01	Desa Tawang Sari	23/01/2016	Maju
54	Tembarak	Dusun Menggoro	Desa Menggoro	04/05/2017	Mandiri
55	Tembarak	Dusun Kuwaton	Desa Purwodadi	04/10/2018	Berkembang
56	Tlogomulyo	Dusun Kwadakan	Desa Kerokan	23/10/2017	Berkembang
57	Tlogomulyo	Dusun Talun	Desa Pagersari	10/07/2018	Berkembang
58	Tlogomulyo	Dusun Balong	Desa Langgeng	14/01/2016	Berkembang
59	Tretep	Dusun Sigedong	Desa Sigedong	13/01/2016	Berkembang
60	Tretep	Dusun Sekidang	Desa Tempelsari	27/04/2017	Berkembang
61	Tretep	Dusun Bojong	Desa Bojong	29/10/2018	Berkembang
62	Wonobojo	Dsn Kleseman	Desa Wonobojo	26/01/2016	Berkembang
63	Wonobojo	Dusun Wanasari 2	Desa Tening	18/05/2017	Berkembang
64	Wonobojo	Dusun krajan	Desa Pitrosari	18/09/2018	Berkembang
65	Bulu	Dusun Reban	Desa Malangsari	26/8/2019	Maju
66	Gemawang	Dusun jambon	jambon	2020	Berkembang
67	Bansari	Tlagawero	Tlagawera	2023	maju

Dari jumlah 64 desa dan 2 Kelurahan yang telah dicanangkan kampung KB, sesuai kategori Indek Desa Membangun, terdiri dari Desa Mandiri sebanyak 4 desa

- Desa Maju sebanyak 23 desa
- Desa Berkembang sebanyak 37 dan
- Kelurahan sebanyak 2 kelurahan

Tabel 2.40
Presentase kampung KB yang memenuhi IDM
Kabupaten Temanggung
Tahun 2018 s.d 2023 Triwulan I

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kampung KB	40	65	66	66	66	66
2	Jumlah Desa dengan kriteria desa berkembang dan tertinggal	219	218	195	195	195	129
3	Persentase	18,26	29,82	33,85	33,85	33,85	51,16

Sumber: DPPKBPPPA dan Dispermades Kabupaten Temanggung

Indek Desa Membangun di kabupaten Temanggung yang terdiri dari 3 kriteria IDM meliputi :

1. kriteria IDM desa tertinggal tidak ada
2. desa berkembang ada 195
3. desa maju ada 61, dan
4. desa mandiri ada 10 desa.

Dari seluruh jumlah desa di kabupaten Temanggung yang sudah ada kampung KB nya sebanyak 66 Desa, dari 66 desa kampung KB sebagian besauk kriteria desa berkembang sebanyak 54 desa, desa tertinggal sudah tidak ada, Desa maju sebanyak 8 Desa, Desa mandiri 2 Desa dan kampung KB yang ada di Kelurahan ada 2 Kelurahan. Persentase jumlah kampung KB di desa IDM terdiri dari 3.03% di Desa mandiri, 81,82% di Desa Berkembang dan 12,12% di desa maju.

Sesuai acuan dan tujuan dari pembentukan kampung KB, diprioritaskan di desa yang sangat tertinggal dan baru berkembang, agar menjadi desa yang maju dan mandiri. Maka dari tabel diatas persentase desa kampung KB adalah dari jumlah kampung KB yang terbentuk dibandingkan desa IDM dengan kriteria tertinggal dan berkembang yaitu sebesar 33,35%. Jumlah tersebut merupakan total pengembangan keseluruhan kampung KB yang ada di Temanggung sejak tahun 2016 hingga 2019. Dan untuk selanjutnya kegiatan kampung KB ini untuk kegiatan pengembangan dan pemantapan kampung KB yang sudah dicanangkan, untuk pencaanangan kampung KB

selanjutnya diarahkan dengan menggunakan dana desa yang ada dan bersifat mandiri

Faktor Penghambat Kampung KB

1. Belum adanya Perbup kampung KB
2. Kurangnya Sosialisasi pengembangan kampung KB pada lintas sektor, OPD
3. Tidak adanya dana APBN untuk pembentukan kampung KB
4. Kurangnya koordinasi di lini lapangan, dari PKB, Desa, pokja kampung KB, linsek kec dan masyarakat
5. Belum semua pokja kampung KB mendapatkan pelatihan kampung KB
6. Belum semua desa kampung KB mau mengembangkan Kampung KB dari setara dusun menjadi setara desa
7. Kurangnya sosialisasi pada masyarakat tentang pengembangan kampung KB

Faktor Pendorong dalam Kampung KB

1. Adanya potensi kader di kampung Kb yg bisa di berdayakan
2. Adanya dana desa yg bisa di anggarkan untuk pengembangan kampung KB
3. Adanya dukungan dari masyarakat
4. Adanya dukungan dari stakeholder, toma, toga
5. Adanya Tim Pengembangan kampung KB kabupaten

Rencana Tindak Lanjut Kampung KB

1. Meningkatkan frekuensi advokasi dan KIE bagi lintas sektor atau OPD
2. Mengadakan Sosialisasi tentang Pengembangan kampung KB pada pokja kampung kb, linsek, masyarakat.
3. Mengadakan pelatihan bagi pokja kampung KB
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pembinaan di kampung KB
5. Mengadakan Monev kampung

12. Indek Pembagunan Keluarga

Pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih

baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Diperlukan adanya sebuah ukuran untuk mengukur keberhasilan dalam upaya pembangunan kualitas keluarga tersebut, yaitu dengan Indeks Pembangunan Keluarga atau I Bangga.

Adapun Indeks Pembangunan Keluarga adalah: pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga, salah satu yang dihasilkan oleh IBangga adalah terpotretnya gambaran akan peran dan fungsi keluarga.

Rumus Indeks Pembangunan Keluarga menggunakan pendekatan dimensi yang dibentuk dari 17 VarLabel, 3 dimensi yang ditentukan mencakup :

1. Dimensi Ketentraman
2. Dimensi Kemandirian
3. Dimensi Kebahagiaan

Setelah semua nilai-nilainya distandarisasi dengan menggunakan persamaan diatas, selanjutnya menghitung nilai komposifmading masing dimensi dengan menggunakan persamaan berikut :

$$D_i = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x_j$$

Rata rata aritmatika

Langkah terakhir adalah mengitung nilai indeks Pembangunan Keluarga dengan menggunakan rata-rata :

$$IBangga = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 D_i$$

Indek Pembangunan Keluarga/I Bangga Kabupaten Temanggung pada tahun 2021, sebesar 55,97, perhitungan ini dilakukan oleh BKKBN, dengan menggunakan dasar PK21 atau pendataan tahun 2021, angka tersebut sudah menunjukkan angka yang baik dibandingkan beberapa kota di Jawa Tengah, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.41
Indek Pembangunan Keluarga/i Bangga

PROVINSI/ KOTA		Indeks Ketentraman	Indeks Kemandirian	Indeks Kebahagiaan	Ibangga
JAWA TENGAH	BANYUMAS	58,55	54,68	55,40	56,21
	PURBALINGGA	57,47	54,38	54,71	55,52
	CILACAP	58,41	54,65	55,26	56,11
	BANJARNEGARA	57,69	54,54	54,95	55,73
	MAGELANG	58,84	54,68	55,29	56,27
	TEMANGGUNG	58,04	54,60	55,28	55,28
	WONOSOBO	57,98	54,57	55,15	55,90
	PURWOREJO	60,00	55,00	56,08	57,03
	KEBUMEN	58,51	54,65	55,11	56,09
	PEKALONGAN	57,66	54,34	54,52	55,51
	PEMALANG	57,38	54,28	54,45	55,37
	TEGAL	56,78	54,01	53,93	54,91
	BREBES	56,24	54,02	53,70	54,65
	SEMARANG	58,58	54,64	55,40	56,21
	KENDAL	58,78	54,67	55,36	56,27
	DEMAK	58,03	54,38	54,77	55,73
	GROBOGAN	58,87	54,79	55,86	56,51
	PATI	59,66	54,85	55,99	56,83
	JEPARA	58,13	54,25	54,98	55,79
	REMBANG	57,98	54,55	55,06	55,86
	BLORA	59,03	54,87	55,98	56,63
	KUDUS	58,70	54,46	55,00	56,05
	KLATEN	60,06	54,95	56,05	57,02
	BOYOLALI	58,57	54,72	55,43	56,24
	SRAGEN	59,49	54,89	55,98	56,79
	SUKOHARJO	58,69	54,68	55,19	56,19
	KARANGANYAR	58,42	54,69	55,28	56,13
	WONOGIRI	59,26	55,20	56,34	56,93
	BATANG	57,74	54,48	54,91	55,71
	KOTA SEMARANG	58,86	54,61	55,04	56,17
	KOTA SURAKARTA	61,41	55,08	56,42	57,63
	KOTA PEKALONGAN	59,15	54,47	55,18	56,27
	KOTA MAGELANG	61,22	55,07	56,20	57,50
	KOTA TEGAL	59,48	54,56	55,61	56,55
KOTA SALATIGA	59,69	54,76	55,65	56,70	

Perhitungan IPK, dihitung oleh BKKBN, berdasarkan hasil PK 2021, sedangkan untuk tahun 2022 dan 2023 belum ada perhitungannya

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPPAPPKB

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan DPPPAPPKB dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPPAPPKB sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja DPPPAPPKB dari 20 indikator terdapat 3 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:

1. Indikator persentase desa sayang ibu dan bayi

Hal ini disebabkan masih adanya budaya bahwa kehamilan dan melahirkan adalah urusan perempuan, dan mkarena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Temanggung sehingga tidak dapat mengalokasikan

2. Indikator persentase kegiatan SKPD di Luar Rancangan Awal RKPD TAHUN 2020

Hal ini disebabkan karena adanya program dan kegiatan yang tidak ada dalam Renstra SKPD

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPPAPPKB, antara lain :

1. Masih kurangnya pengetahuan petugas dalam penyusunan perencanaan anggaran yang responsif Gender

2. Ketimpangan perempuan dalam proses penentuan perencanaan kegiatan dan kebijakan di lini lapangan

3. Masih rendahnya laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, karena masih ada anggapan melaporkan adalah aib keluarga

4. Masih kurang nya pengetahuan petugas dalam penanganan kasus, karena belum terbentuk UPT PPPA

5. Masih tingginya perkawinan usia anak.

6. Masih tinggi Pus Unmet Need

7. Masih rendahnya angka kesertaan KB pasca Persalinan

Berdasarkan permasalahan tersebut isu stretegis yang dihadapi oleh DPPPAPPKB adalah:

1. Masih tingginya angka perkawinan usia anak

2. Masih lemahnya keterlibatan lintas sektoral dalam mendukung program KKBPK dan Pemberdayaan dan perlindungan anak

3. Masih rendahnya penghasilan perempuan sebagai salah satu indikator IPG (indeks pembangunan gender)

4. Kemampuan dan keterbasan petugas dalam pendampingan Kasus KDRT
5. Masih tingginya PUS dibawah umur 20 Tahun
6. Masih tinggi PUS yang ingin berKB tidak terpenuhi (Unmet need)
7. Masih tingginya angka dari keluarga beresiko stunting
8. Rendahnya keluarga mengikuti kelompok kegiatan (BKB, BKR, PIK-R, BKL, UPPKA)
9. Rendahnya capaian KB Paska Persalinan
10. Rasio jumlah PKB dilapangan dibandingkan dengan jumlah desa yang ada belum memenuhi standar yang diharapkan , karena saat ini jumlah PKB dengan jumlah desa yang ada 1 PKB membina 7 sampai 10 desa, harapannya adalah 1 PKB 2 sampai 3 desa

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu upaya pemecahannya meliputi :

1. Penguatan Pendampingan dalam Penyusunan ARG
2. Mengoptimalkan peran serta dan peningkatan kapasitas jejaring dalam penanganan kasus
3. Peningkatan sosialisasi , KIE kepada masyarakat
4. Penguatan dalam melakukan pendampingan Kecamatan dan Desa Layak Anak
5. Peningkatan kerjasama jejaring dalam penadampingan dan penanganan kasus terhadap anak
6. Tersedianya data mikro keluarga tiap desa {mengoptimalkan data simantap kon KB
7. Meningkatnya peserta KB aktif

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.42 berikut:

Tabel 2.42
Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2024

RANCANGAN AWAL RKPD 2024						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1	URUSAN PENUNJANG PERANGKAT DAERAH					
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan PelPenyediaan Gaji dan Tunjangan ASNaporan SKPD	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASNu	14	bulan	3.215.218.573
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	12	bulan	2.000.000
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5	keg	0
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12	Laporan	11.000.000
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Tersedianya Barang Cetak an dan Penggandaan	12	Laporan	6.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ketera ngan
1	2	3	4	5	6	7	
1	URUSAN PENUNJANG PERANGKAT DAERAH						
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan PelPenyediaan Gaji dan Tunjangan ASNaporan SKPD	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASNu	14	bulan	3.219.538.561	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	12	bulan	3.000.000	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Tersedianya Peralatan dan Perlengkap an Kantor	5	keg	40.000.000	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12	Laporan	11.000.000	
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12	Laporan	7.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	laporan	15.000.000
6	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	"Terlaksananya Penyelenggaraa n Rapat	12	Laporan	30.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	8.000.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	laporan	39.600.000
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	"Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan	12	laporan	5.000.000
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	laporan	557.080.012
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ketera ngan
1	2	3	4	5	6	7	
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Terlaksanan ya Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	laporan	13.000.000	
6	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	"Terlaksanan ya Penyelenggar aan Rapat	12	Laporan	50.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Terlaksanan ya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	8.000.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	laporan	35.000.000	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	"Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkap an	12	laporan	7.000.000	
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	laporan	793.368.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							

RANCANGAN AWAL RKPD 2024						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	laporan	15.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	laporan	40.900.000
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	"Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya	12	laporan	20.000.000
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	"Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya	12	laporan	5.000.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ketera ngan
1	2	3	4	5	6	7	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Tersedianya Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	laporan	15.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Tersedianya Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	laporan	40.900.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	"Tersedianya Jasa Pemeliharaa n, Biaya	12	laporan	25.000.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	"Tersedianya Jasa Pemeliharaa n, Biaya	12	laporan	10.000.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota						
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	4	Kegiatan	30.000.000	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota						
1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	5	keg	30.000.000	
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						
1	Koordinasi dan Sinkronisasi	Semua Kab/Kota,	Terlaksananya Koordinasi dan	5	keg	30.000.000	

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7		
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan							
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	4	Kegiatan	30.000.000		
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota							
1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	5	keg	5.000.000		
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							
	Koordinasi dan Sinkronisasi	Semua Kab/Kota,	Terlaksananya	5	keg	30.000.000		

RANCANGAN AWAL RKPD 2024						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota					
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	"Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi	1	Paket kegiatan UPT	50.000.000
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					
	"Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota"					
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan	4	Kegiatan	0

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
	Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota						
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	"Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi	1	Paket kegiatan UPT	30.000.000	
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan	4	Kegiatan	20.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (GOW)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Kegiatan	25.000.000
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						
"Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota"						
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4	Kegiatan	25.000.000
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
	Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota				
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota							
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (GOW)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	1	Kegiatan	5.000.000	
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)							
Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota"							
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	4	Kegiatan	25.000.000	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK							
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							

RANCANGAN AWAL RKPD 2024						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4	Kegiatan	25.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	KAB. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	12	Laporan	0
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	"Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang	5	Kegiatan	35.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4	Kegiatan	25.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	KAB. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	12	Laporan	400.000.000	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	"Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga	5	Kegiatan	35.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Kabupaten/Kota		Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK						
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk						
	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12	laporan	50.000.000
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	DPPPAPKB kab Temanggung	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	12	Laporan	64.200.000
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan,	Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	12	laporan	205.800.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
	Kabupaten/Kota		Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK							
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk							
	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12	laporan	40.000.000	
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	DPPPAPKB kab Temanggung	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	12	Laporan	64.200.000	
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan,	Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	12	laporan	205.800.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
		Semua Kelurahan				
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12	laporan	96.000.000
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal					
	"Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja"	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4	Kegiatan	165.000.000
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	"Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan,	4	Kegiatan	0

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
		Semua Kelurahan					
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12	laporan	96.000.000	
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)						
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal						
	"Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja"	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4	Kegiatan	155.000.000	
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	"Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana	4	Kegiatan	10.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
			dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya			
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Lokal"	Terlaksannnya Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	5	Kegiatan	150.000.000
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	12	laporan	260.000.000
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai	Luar Ruang"	Terlaksannnya Pengelolaan Operasional dan Sarana di	12	Laporan	770.400.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ketera ngan
1	2	3	4	5	6	7	
			(Pembangun an Keluarga, Kependuduk an, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya				
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Lokal"	Terlaksannn ya Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	5	Kegiatan	150.000.000	
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	12	laporan	260.000.000	
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai	Luar Ruang"	Terlaksannn ya Pengelolaan Operasional	12	Laporan	770.400.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Penyuluhan KKBPK		Balai Penyuluhan KKBPK			
	Pengendalian Program KKBPK	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	4	Kegiatan	80.000.000
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)						
	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	semua kecamatan di kabupaten Temanggung	Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	12	Laporan	46.000.000
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	"Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi	10	Laporan	578.000.000
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota						
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi	Faskes di kabupaten Temanggung	Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat	12	Laporan	27.900.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ketera ngan
1	2	3	4	5	6	7	
	Penyuluhan KKBPK		dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK				
	Pengendalian Program KKBPK	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksanny a Pengendalian Program KKBPK	4	Kegiatan	80.000.000	
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)							
	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	semua kecamatan di kabupaten Temanggung	Terlaksanan ya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangun an Keluarga, Kependuduk an, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	12	Laporan	46.000.000	
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	"Terlaksanan ya Penggerakan Kader Institusi	10	Laporan	578.000.000	
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota							
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi	Faskes di kabupaten Temanggung	Terlaksanan ya Pengendalian Pendistribusi	12	Laporan	27.900.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	"Terwujudnya Peningkatan Kesertaan	12	Laporan	1.994.982.000
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	12	Laporan	1.516.035.000
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Faskes di kabupaten Temanggung	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12	Laporan	17.100.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
	dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		an Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	"Terwujudnya Peningkatan Kesertaan	12	Laporan	1.994.982.000	
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	12	Laporan	1.516.035.000	
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Faskes di kabupaten Temanggung	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12	Laporan	17.100.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB					
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	dpppppkb kab temanggung	Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	2	Kegiatan	9.000.000
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	12	Laporan	1.007.500.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	lokus stunting kabupaten Temanggung	"Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	1	Kegiatan	360.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB						
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	dpppppkb kab temanggung	Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	2	Kegiatan	9.000.000	
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	12	Laporan	1.007.500.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)						
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	lokus stunting kabupaten Temanggung	"Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	1	Kegiatan	360.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Keluarga/UPPK S)					
	"Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	"Tersedianya Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	12	Laporan	3.855.900.000
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPK S)	Kecamatan Kranggan , desa Gentan	"Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	2	Kegiatan	15.000.000
	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	"Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga	5	Kegiatan	0

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keteran ngan
1	2	3	4	5	6	7	
	Keluarga/UPPK S)		PPPKS, PIK-R dan				
	"Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	"Tersedianya Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	12	Laporan	3.855.900.000	
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPK S)	Kecamatan Kranggan , desa Gentan	"Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	2	Kegiatan	15.000.000	
	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	"Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan	5	Kegiatan	50.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	"Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ "Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga"Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga"					
	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	12	Laporan	50.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
			Menuju Keluarga				
	"Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ "Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga"Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga"						
	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	12	Laporan	40.000.000	

Sumber : DPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat dalam mendukung program dan kegiatan DPPPAPPKB lewat kegiatan Musrenbang adalah dalam rangka mendukung penurunan stunting yaitu di desa Pegentan kecamatan Kranggan .

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.43

Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Desa Gentan Kecamatan Kranggan	Terlaksannnya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	15.000.000	Sosialisasi dan pelatihan dalam rangka mendukung penurunan Angka Stunting

2.6. Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di DPPPAPPKB ada 3 Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.44

Daftar Inovasi Perangkat Daerah
2020-2022

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
1	SIMANTA P KON KB	PKB , Kader IMP		Pencataan dan pelaporan penyuluhan dan pelayanan KB	Pencataan dan pelaporan	Masyarakat dan PUS	DPPPAPP KB TAHUN 2021
2	SIPESAN PERAK	DPPPAPPKB , masyarakat	APBD	Sisten Pelaporan kasus oleh masyarakat	DPPPAPPK B , Masyarakat	Terlapornya kasus kekerasan terhadap masyarakat dan anak	DPPPAPP KB TAHUN 2022
3	AKSI PENTING	PKB dan satgas Stunting		Pemantauan intervnsi penurunan Stunting	DPPPAPPK B , Satgas dan Masyarakat	Terpantauannya , pelaporan pemberian PMT dan TTD selama 90 HARI BERTURUT	DPPPAPP KB TAHUN 2022

2.7. Penghargaan Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui DPPAPPKB ada 2 Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.45
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2022

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Pemnghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	Penghargaan Anugrah Parahita Eka Praya Tingkat Madya Tahun 2018	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI	Nasional	DPPKBPPA
2	Kota Layak Anak Kategori Madya	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI	Nasional	DPPKBPPA

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun SDG's. Kebijakan nasional yang diampu oleh DPPPAPPKB lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui Program dan kegiatan yang mendukung percepatan penghapusan kemiskinan di kabupaten Temanggung

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DPPPAPPKB

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2024, maka tujuan dari penyusunan Renja DPPPAPPKB ;

1. Masih kurangnya pengetahuan petugas dalam penyusunan perencanaan anggaran yang responsif Gender
2. Ketimpangan perempuan dalam proses penentuan perencanaan kegiatan dan kebijakan di lini lapangan
3. Masih rendahnya laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, karena masih ada anggapan melaporkan adalah aib keluarga
4. Masih kurangnya pengetahuan petugas dalam penanganan kasus , karena belum terbentuk UPT PPPA
5. Masih tingginya perkawinan usia anak .
6. Masih tinggi Pus Unmet Need
7. Masih rendahnya angka kesertaan KB pasca Persalinan.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka isu strategis DPPPAPPKB tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Masih tingginya angka perkawinan usia anak
2. Masih lemahnya keterlibatan lintas sektoral dalam mendukung program KKBPK dan Pemberdayaan dan perlindungan anak
3. Masih rendahnya penghasilan perempuan sebagai salah satu indikator IPG (indeks pembangunan gender)
4. Kemampuan dan keterbasan petugas dalam pendampingan Kasus KDRT
5. Masih tingginya PUS dibawah umur 20 Tahun
6. Masih tinggi PUS yang ingin berKB tidak terpenuhi (Unmet need)
7. Masih tingginya angka dari keluarga beresiko stunting
8. Rendahnya keluarga mengikuti kelompok kegiatan (BKB, BKR, PIK-

R, BKL, UPPKA)

9. Rendahnya capaian KB Paska Persalinan
10. Rasio jumlah PKB dilapangan dibandingkan dengan jumlah desa yang ada belum memenuhi standar yang diharapkan, karena saat ini jumlah PKB dengan jumlah desa yang ada 1 PKB membina 7 sampai 10 desa, harapannya adalah 1 PKB 2 sampai 3 desa

Adapun sasaran dari penyusunan Renja DPPPAPPKB Tahun 2023 ini adalah dalam rangka :

- Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2023 secara tertib waktu dan tepat mutu

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target DPPPAPPKB Kab. Temanggung pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
 DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2024

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2024	TARGET KONDISI AKHIR 2024
Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatkan keadilan dan kesejahteraan Gender	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah	%	2,34	2,36
			Rasio Perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan renja PD	%	100	100
		Program Perlindungan Perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap anak perempuan	%	0,006	0,004
			Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan	%	0,004	0,002
		Program peningkatan kualitas keluarga	Persentase desa sayang ibu dan bayi	%	62,28	62,98
			Persentase pelayanan ramah anak di rumah sakit dan puskesmas	%	100	100

		Program Pemenuhan Hak Anak /PHA)	Kabupaten Layak Anak	kategori	Nindya	Nindya
		Program perlindungan khusus anak	Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak	%	0,011	0,011
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Program pengendalian penduduk dan informasi keluarga	Persentase Desa /kelurahan yang memiliki Data Mikro Keluarga	%	100	100
			Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi {unmetneed)	%	10,5	10
			Persentase pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	%	2	1,75
			Angka kelahiran remaja usia 15-19 th (ASFR 15-19th)	%	12,6	12,4
		Program Pembinaan Keluarga Berencana /KB	Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern	%	88,50	88,70
			Persentase kepesertaan KB aktif	%	75,75	75,85
			Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang	%	46,10	46,20

			Persentase kampung KB Berkembang dan mandiri	%	37,88	53,03
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Indek Pembangunan Keluarga	%	55,98	56

Sumber : Renstra DPPPAPPKB Kab. Temanggung Tahun 2024-2026.

Kebijakan dan strategi DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung di Tahun 2024 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra DPPPAPPKB Tahun 2024-2026. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Tujuan dan sasaran DPPPAPPKB Tahun 2024-2026.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung di Tahun 2024 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Program dan kegiatan DPPPAPPKB Tahun 2024 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2024 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2024.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja DPPPAPPKB Tahun 2024 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
DPPPAPPKB Kab. Temanggung Tahun 2024

RANCANGAN RENJA DPPPAPPKB TAHUN 2024			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
	URUSAN PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	4.273.486.573		URUSAN PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	4.273.486.573	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.273.486.573		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.273.486.573	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.215.218.573		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.215.218.573	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan PelPenyediaan Gaji dan Tunjangan ASNaporan SKPD	3.215.218.573		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan PelPenyediaan Gaji dan Tunjangan ASNaporan SKPD	3.215.218.573	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	124.000.000		Administrasi Umum Perangkat Daerah	124.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.000.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.000.000	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	13.000.000		Fasilitas Kunjungan Tamu	13.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	843.368.000		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	843.368.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.000.000	

	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.000.000			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.000.000		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	793.368.000			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	793.368.000		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.900.000			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.900.000		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.000.000			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.000.000		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.900.000			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.900.000		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	35.000.000			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	35.000.000		
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan	30.000.000			Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan	30.000.000		
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	30.000.000			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	30.000.000		
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	5.000.000			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	5.000.000		
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	5.000.000			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	5.000.000		
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	60.000.000			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	60.000.000		

	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000			Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000		
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000		
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	25.000.000			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	25.000.000		
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000			Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000		
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000			Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000		
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000		
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota(GOW)	5.000.000			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota(GOW)	5.000.000		
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	25.000.000			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	60.000.000		
	"Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota"	25.000.000			"Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota"	25.000.000		
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	25.000.000		

				Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	35.000.000		35.000.000
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	35.000.000		+35.000.000
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	425.000.000		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	425.000.000		
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	25.000.000		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	25.000.000		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	400.000.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	400.000.000		
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0		-35.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	35.000.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	0		-35.000.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	406.000.000		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	406.000.000		
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	40.000.000		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	40.000.000		

	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	40.000.000			Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	40.000.000		
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	366.000.000			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	366.000.000		
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	64.200.000			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	64.200.000		
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	205.800.000			Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	205.800.000		
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	96.000.000			Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	96.000.000		
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	6.621.917.000			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	6.621.917.000		
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1425.400.000			Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.425.400.000		
	"Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan mitra kerja	155.000.000			""Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan mitra kerja	155.000.000		
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	10.000.000			Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	0		
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	150.000.000			Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	160.000.000		
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	260.000.000			Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	260.000.000		
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	770.400.000			Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	770.400.000		
	Pengendalian Program KKBPK	80.000.000			Pengendalian Program KKBPK	80.000.000		
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	624.000.000			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	624.000.000		
	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	46.000.000			Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	46.000.000		

	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	578.000.000			Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	578.000.000		
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	3.556.017.000			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	3.556.017.000		
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	27.900.000			Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	27.900.000		
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.994.982.000			Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.994.982.000		
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.516.035.000			Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.516.035.000		
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	17.100.000			Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	17.100.000		
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1.016.500.000			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1.016.500.000		
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	9.000.000			Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	9.000.000		
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	1.007.500.000			Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	1.007.500.000		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	4.280.900.000			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	360.000.000			Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			
	"Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan	3.855.900.000			"Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan			

	Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan				Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan			
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	15.000.000			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			
	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	50.000.000			Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
	"Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ "Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga"Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan danKesejahteraan Keluarga"	40.000.000			"Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ "Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga"Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan danKesejahteraan Keluarga"	140.000.000		
	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	40.000.000			Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	140.000.000		+ 100.000.000
		16.227.303.573				16.327.303.573		

Sumber : SIPD RI RKPD Kab. Temanggung Tahun 2024

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan pagu indikatif Tahun 2024 sebesar Rp100.000.000 Jika dilihat lebih jauh untuk kenaikan Belanja Operasional dikarenakan Kebutuhan dalam rangka peningkatan kegiatan Genetasi Berencana dalam rangka menurunkan angka perkawinan usia anak untuk pencegahan stunting dan penurunan stunting di kabupaten Temanggung

Tabel 4.2
Rencana Program dan Kegiatan DPPPAPPKB Kab. Temanggung
Tahun 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana 2025				
						Lokasi Output Kegiatan	target capaian kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan penting	target kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
							program	keluaran sub kegiatan	hasil kegiatan	DAU	DAK			tolak ukur	target	
					URUSAN PENUNJANG PERANGKAT DAERAH											
X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
X	XX	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
X	XX	1	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPPPAPPK B Kabupaten Temanggung	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	gaji asn DPPPAPPKB sebanyak 30 orang , untuk 14 bulan	3.215.218.573	-	DAU	ada yang pensiun 2 orang	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	3.392.279.192
X	XX	0 1	20 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah											
X	XX	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan	tercukupi kebutuhan penerangan bangunan kantor	3.000.000	-	DAU		tercukupi kebutuhan penerangan bangunan kantor	12 bulan	3.000.000
X	XX	1	2.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPPPAPPK B Kabupaten Temanggung	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya 3 Unit laptop dan 3 Unit Printer	40.000.000	-	DAU	belum tercukupi peralatan perlengkap an kantor , karena sudah lama tidak ada pengadaan , dan sudah banyak yang kondisi rusak	Tersedianya 3 Unit laptop dan 3 Unit Printer	100% dari usulan	50.000.000

X	XX	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPPPAPPK B Kabupaten Temanggung	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	tersedianya ATK ,pendukung perkantoran	11.000.000		DAU	tersedianya ATK ,pendukung perkantoran	12 bulan	20.000.000
X	XX	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPPPAPPK B Kabupaten Temanggung	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	tersedianya barang cetakan dan p3nggadaan ,pendukung perkantoran	7.000.000		DAU	tersedianya barang cetakan dan p3nggadaan ,pendukung perkantoran	12 bulan	12.000.000
X	XX	1	2.0 6	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	DPPPAPPK B Kabupaten Temanggung	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	terpenuhi kebutuhan minum pegawai sebanyak 37 orang , fasilitas tamu	13.000.000		DAU	terpenuhi kebutuhan minum pegawai sebanyak 37 orang , fasilitas tamu	12 bulan	30.000.000
X	XX	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPPPAPPK B Kabupaten Temanggung	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terpenuhi kegiatan perjalanan dinas luar daerah	50.000.000		DAU	terpenuhi kegiatan perjalanan dinas luar daerah	12 bulan	30.000.000
X	XX	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					843.368.000	-				824.100.000
X	XX	1	2.0 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPPPAPPK B Kabupaten Temanggung	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bln	8.000.000		DAU			15.000.000
X	XX	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPPPAPPK B Kabupaten Temanggung	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	bln	35.000.000		DAU			39.100.000

X	XX	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPPPAPPK B Kabupaten Temanggung	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tercukupinya service alat perlengkapan kantor	7.000.000		DAU	anggaran tidak mencukupi perlengkapan kantor yang membutuhkan service	Tercukupinya service alat perlengkapan kantor	laptop, PC, dan printer	10.000.000
X	XX	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPPPAPPK B Kabupaten Temanggung	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	tercukupi gaji SS, Penjaga malam balai ,satpam , tersedianya kebutuhan kebersihan kantor dan tercukupinya lembur ASN	793.368.000		DAU	Belum memenuhi standar UMR SS 12X6X2000 000	Terpenuhinya honorarium bagi SS (rincian), Satpam, Penjaga 12 Bulan	12 bulan	760.000.000
2	14	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					90.900.000	-					145.000.000
X	XX	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPPPAPPK B Kabupaten Temanggung	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	tercukupi, service, BBM dan pajak kendaran dinas jabatan sebanyak 2 unit	15.000.000		DAU		tercukupi, service, BBM dan pajak kendaran dinas jabatan sebanyak 2 unit	12 bulan	15.000.000
X	XX	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPPPAPPK B Kabupaten Temanggung	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	tercukupi, pajak kendaran dinas jabatan sebanyak 75 unit., dan service mobil operasional	40.900.000				tercukupi, pajak kendaran dinas jabatan sebanyak 75 unit., dan service mobil operasional	12 bulan	40.000.000

X	XX	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPPPAPPK B Kabupaten Temanggung	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	tercukupi pemeliharaan 2 unit gedung perkantoran	25.000.000				tercukupi pemeliharaan 2 unit gedung perkantoran	12 bulan	70.000.000
X	XX	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPPPAPPK B Kabupaten Temanggung	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	tercukupi pemeliharaan 2 unit gedung perkantoran	10.000.000				tercukupi pemeliharaan 2 unit gedung perkantoran	12 bulan	20.000.000
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					205.000.000	400.000.000					
2	08	2	201		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					35.000.000	-					
2	08	2	201	03	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota					30.000.000	-					
2	8	2	2.01	3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1.)Pertemuan Teknis Penyusunan ARG , 2) advokasi APE 3) Pertemuan Pokja PUG 4) Monev APE	30.000.000		DAU	anggaran di tahun 2023 , dilaksanakan untuk mendukung kegiatan lain dan tidak mendukung Target indikator PD	1.)Pertemuan Teknis Penyusunan ARG , 2) advokasi APE 3) Pertemuan Pokja PUG 4) Monev APE	4 kegiatan	30.150.000
2	8	2	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					5.000.000	-					30.150.000

2	8	2	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (DW)	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Operasional . Kegiatan DW Selama 1 tahun	5.000.000		DAU	anggaran di tahun 2023 , dilaksanakan untuk mendukung kegiatan lain dan tidak mendukung pencapaian Target indikator PD	Operasional . Kegiatan DW Selama 1 tahun		30.150.000	
2	8	3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					60.000.000							60.300.000
2	8	3	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					30.000.000							30.150.000
2	8	3	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Paket Kegiatan UPTD PPPA	30.000.000		DAU	Pelayanan , Pengaduan ,penjankauan korban dan penyediaan tempat penampungan sementara	1 Paket Kegiatan UPTD PPPA	12 bulan		30.150.000
2	8	3	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota					30.000.000	-						30.150.000

2	8	3	2.0 2	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Paket Kegiatan UPTD PPPA	30.000.000	DAU	untuk pelayanan dan mediasi	1 Paket Kegiatan UPTD PPPA	12 bulan	30.150.000
2	8	4			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					25.000.000					55.250.000
2	0 8	0 4	20 1		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					20.000.000					25.000.000
2	0 8	0 4	20 1	0 2	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1) advokasi 2) Sosialisasi, 3) Pembentukan Kecamatan dan Desa GSIB dan Monev GSI	20.000.000	DAU	kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian indikator Upaya keras	1) advokasi 2) Sosialisasi, 3) Pembentukan Kecamatan dan Desa GSIB	4 kegiatan	25.000.000
2	0 8	0 4	20 2		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota					5.000.000	-				30.250.000

2	8	4	2.0 2	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota(GOW)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Operasional . Kegiatan GOW Selama 1 tahun	5.000.000		DAU	anggaran di tahun 2023 , dilaksanakan untuk mendukung kegiatan lain dan tidak mendukung pencapaian Target indikator PD	Operasional . Kegiatan GOW Selama 1 tahun		30.250.000
2	8	6			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					25.000.000	-					25.125.000
2	0 8	0 6	20 2		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					25.000.000	-					25.125.000
2	0 8	0 6	20 2	0 1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Paket Kegiatan FAKTA	25.000.000		DAU		1 Paket Kegiatan FAKTA	4 kegiatan	25.125.000
2	8	7			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					60.000.000	400.000.000					90.000.000
2	8	7	2.0 1		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					25.000.000	400.000.000					50.000.000

2	8	7	2.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	advokasi, sosialisasi sipesan perak dan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak	25.000.000	dau	tahun 2023, tidak ada anggarannya, di tahun 2022 ada anggaran dari DAK	advokasi, sosialisasi sipesan perak dan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak	4 kegiatan	50.000.000
2	8	7	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	keg op UPT PPPA	400.000.000			keg op UPT PPPA	100%	400.000.000
2	08	07	2023		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					35.000.000	-				40.000.000

2	08	07	203	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	!) Pertemuan Gugus Tugas Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan 2) Kegiatan Advokasi 3) Pertemuan Teknis KLA	35.000.000			!) Pertemuan Gugus Tugas Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan 2) Kegiatan Advokasi 3) Pertemuan Teknis KLA	5 kegiatan	40.000.000	
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					190.000.000	11.158.817.000					
2	14	2			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					40.000.000	366.000.000				216.350.000	
2	14	2	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk					40.000.000	-					
2	14	2	2.01	15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1) Pertemuan Renvat Bangga Kencana, 2) Monev	40.000.000		DAU	sebagai evaluasi capaian indikator program KKBPK ,tingkat kabupaten ,kecamatan dan desa , sekaligus untuk konsultasi ditingkat propinsi	1) Pertemuan Renvat Bangga Kencana, 2) Monev	12 bulan	100.000.000
2	14	2	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					-	366.000.000				216.350.000	

2	14	02	202	9	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	DPPPAPKB kab Temanggung	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Paket Operasional Manajemen BOKB		64.200.000	DAK non Fisik		1 Paket Operasional Manajemen BOKB	12 bulan	70.000.000
2	14	02	202	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedia	Honor PPKBD dan Faskes (Pencatatan Pelaporan)		205.800.000	DAK non Fisik		Honor PPKBD dan Faskes (Pencatatan Pelaporan)	12 bulan	29.550.000
2	14	2	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Belanja Penyediaan Jasa Internet untuk Balai KB		96.000.000	DAK non Fisik		Belanja Penyediaan Jasa Internet untuk Balai KB	12 bulan	116.800.000
2	14	3			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)						45.000.000	6.576.917.000				6.523.554.510
2	14	3	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal						45.000.000	1.380.400.000				1.175.640.400

2	1	0	20	0	Advokasi Program KKBPK kepada <i>Stakeholders</i> dan Mitra Kerja	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada <i>Stakeholders</i> dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada <i>Stakeholders</i> dan Mitra Kerja	1) Rapat Koordinasi TPPS Kabupaten dan Kecamatan 2) Mini Loka Karya Stunting 3) Rembug Stunting 4) Penunjang Pelayanan KB	35.000.000	120.000.000	DAK non Fisik dan dau			80.000.000	
2	1	0	20	0	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Layanan KIE Keliling	10.000.000		DAU	sejak tahun 2020, kegiatan ini tidak ada anggaran, harapannya untuk peningkatan kie kepada masyarakat sesuai kearifan lokal masyarakat, dengan memanfaatkan mobil penerangan	Layanan KIE Keliling	4 kegiatan	25.000.000

2	1	0	20	0	Promosi dan KIE Program KKBPk Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Penyediaan Bahan KIE (Leaflet, Poster, Banner, Baliho, Spanduk, Media Elektronik, Sticker, Media Promosi)		150.000.000	DAK non Fisik		Penyediaan Bahan KIE (Leaflet, Poster, Banner, Baliho, Spanduk, Media Elektronik, Sticker, Media Promosi)	5 kegiatan	70.640.000
---	---	---	----	---	---	--	---	--	---	--	-------------	---------------	--	---	------------	------------

2	14	3	201	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	rapat koordinasi program bangga kebcana dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa	260.000.000	Dak non fisik	rapat koordinasi program bangga kebcana dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa	12 bulan	312.000.000
2	14	3	201	7	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Operasional Balai KB di 20 Kecamatan	770.400.000		Operasional Balai KB di 20 Kecamatan	12 bulan	648.000.400

2	14	3	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1) Audit Stunting		80.000.000			1) Audit Stunting	4 kegiatan	40.000.000
2	14	3	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)						624.000.000					1.399.037.250
2	14	3	2.02	1	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	20 kec	Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Honor Tenaga Penggerak Desa		46.000.000	DAK non Fisik		Honor Tenaga Penggerak Desa	12 bulan	46.000.000
2	14	3	2.02	4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Honor Sub PPKBD sebanyak 1700 orang		578.000.000	dak non Fisik		Honor Sub PPKBD sebanyak 1700 orang	10 bulan	1.387.200.000
2	14	3	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota						3.556.017.000					2.789.176.860

2	14	3	2.0 3	1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Faskes di kabupaten Temanggung	Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pendistribusian Alokon di Faskes		27.900.000	DAK non Fisik		Pendistribusian Alokon di Faskes	12 bulan	13.950.000
2	14	3	2.0 3	3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Pelayanan KB MKJP dalam moment strategis dan pelayanan rutin di faskes		1.994.982.000	DAK non Fisik		Pelayanan KB MKJP dalam moment strategis dan pelayanan rutin di faskes	12 bulan	1.580.285.800
2	14	3	2.0 3	6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	pengadaan 10 motor Op . Lini lapangan , 8 rehab dan kelengkapan balai , dan sarana pelayanan KB di 30 faskes		1.516.035.000	DAK Fisik		pengadaan 10 motor Op . Lini lapangan , 8 rehab dan kelengkapan balai , dan sarana pelayanan KB di 30 faskes	100%	1.182.341.060

2	14	3	203	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Faskes di kabupaten Temanggung	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pertemuan Koordinasi Pelayanan KB di Faskes Jaringan dan Jejaringnya		17.100.000			Pertemuan Koordinasi Pelayanan KB di Faskes Jaringan dan Jejaringnya	12 bulan	12.600.000
2	14	3	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB						1.016.500.000			bulan	1.159.700.000	
2	14	3	2.04	2	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	dppppkb kab temanggung	Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Pertemuan Penguatan Kampung KB		9.000.000			Pertemuan Penguatan Kampung KB	12 bulan	20.000.000
2	14	3	2.04	3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Pertemuan Pokja Kampung KB dan Pembinaan Ketahanan Keluarga		1.007.500.000			Pertemuan Pokja Kampung KB dan Pembinaan Ketahanan Keluarga	12 bulan	1.139.700.000
2	14	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					105.000.000	4.215.900.000					4.103.040.000

2	14	4	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					65.000.000	4.215.900.000					3.953.040.000
2	14	4	2.01	2	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	lokus stunting kabupaten Temanggung	Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pengadaan BKB KIT untuk 20 locus stunting		360.000.000			Pengadaan BKB KIT untuk 20 locus stunting	100%	360.000.000
2	14	04	201	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Operasional Tim Pendamping Keluarga		3.855.900.000			Operasional Tim Pendamping Keluarga	12 bulan	3.533.040.000

2	14	4	2.01	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kecamatan Kranggan, desa Gentan	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	sosialisasi pencegahan Stunting	15.000.000			hasil Musrenbang Kecamatan	sosialisasi pencegahan Stunting	2 kegiatan	30.000.000
2	14	4	2.01	14	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Operasional Pemilihan Duta Genre dan Pembinaan Forgen	50.000.000				Operasional Pemilihan Duta Genre dan Pembinaan Forgen	3 kegiatan	60.000.000

2	14	4	2.0 2		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					40.000.000	-					150.000.000
2	14	4	2.0 2	2	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pembinaan PKBR di PIK Remaja dan BKR	140.000.000		DAU		Pembinaan PKBR di PIK Remaja dan BKR	12 bulan	150.000.000
TOTAL										4.768.486.573	11.558.817.000					
										16.327.303.573						

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2024 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi DPPPAPPKB untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja DPPPAPPKB Tahun 2024 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di DPPPAPPKB itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan DPPPAPPKB dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja DPPPAPPKB Tahun 2024 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2022. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja DPPPAPPKB Tahun 2024 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2024 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 terdiri dari Belanja Operasional sebesar 9.990.546.729 {70,78.%}, realisasi Belanja Modal sebesar 859.525.674{83,55%}, belanja Daerah Sebesar 10.850.072.403 {71,67}, sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 sampai dengan semester I terdiri dari Belanja Operasional sebesar 4.574.060.776 {32,62%, realisasi Belanja Modal sebesar 704.640.000 {48,03%}, belanja Daerah Sebesar 5.278.700.776 {34,08}

Dalam Renja Tahun Anggaran 2024 DPPPAPPKB mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 16.327.303.573,- yang terdiri dari 9 program antara lain program :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ;
- b. Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- c. Program Perlindungan Perempuan

- d. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- e. Program Pemenuhan Hak Anak /PHA
- f. Program Perlindungan Khusus Anak
- g. Program Pengendalian Penduduk
- h. Program Pembinaan Keluarga Berencana
- i. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja DPPPAPPKB Tahun 2024 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan sasaran DPPPAPPKB dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 3 Juli 2023

KEPALA DPPPAPPKB
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dra. SRI ENDANG PRAPTANINGSIH, M.Si

Pembina Pembina Tk. I

NIP. 19660712 199403 2 006